

**STRATEGI PERTAHANAN MARITIM JEPANG DALAM MENGHADAPI
ESKALASI AKTIVITAS MILITER TIONGKOK**

DI PERAIRAN JEPANG TAHUN 2022-2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang
Hubungan Internasional



Fiqih Aqilla Ekowidi

NIM 10040220088

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mei, 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fiqih Aqilla Ekowidi

NIM :10040220088

Program Studi : Hubungan Internasional

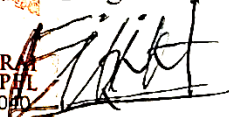
Judul Skripsi : Strategi Pertahanan Maritim Jepang Dalam Menghadapi
Eskalasi Aktivitas Militer Tiongkok Di Perairan Jepang Tahun
2020-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun,
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain,
3. Apabila Skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 31 Mei 2024

Yang Menyatakan


Fiqih Aqilla Ekowidi
NIM 1004022008



METER
TEMPIL
BFCALX144878000

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

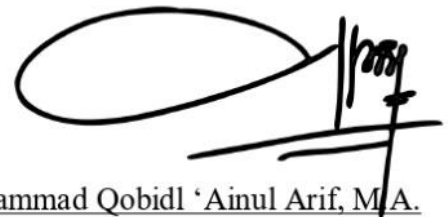
Setelah melakukan bimbingan terhadap Proposal Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fiqih Aqilla Ekowidi
NIM : 10040220088
Program Studi : Hubungan Internasional

Berjudul *Strategi Pertahanan Maritim Jepang dalam Menghadapi Eskalasi Aktivitas Militer Tiongkok di Perairan Jepang Tahun 2020-2023*, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut dapat diujikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional

Surabaya, 31 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, M.A.
NIP 198408232015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Fiqih Aqilla Ekowidi dengan judul **Strategi Pertahanan Maritim Jepang dalam Menghadapi Eskalasi Aktivitas Militer Tiongkok di Perairan Jepang Tahun 2022-2023**, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 26 Juni 2024.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I


Muhammad Qobidh Anul Arif, M.A
NIP 198408232015031002

Penguji II


Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP199104092020121012

Penguji III


Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP199003252018012001

Penguji IV


Dr. Abid Rohman, S.Ag., M.Pd.I
NIP 197706232007101006

Surabaya, 26 Juni 2024

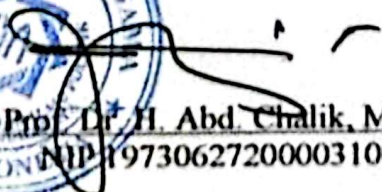
Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan


Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fiqih Agilla Ekowidi
NIM : 10040220088
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : fiqhaqilla@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Strategi Pertahanan Maritim Jepang Dalam Menghadapi Eskalasi
Aktivitas Militer Tiongkok di perairan Jepang Tahun 2022-2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Fiqih A.E.)
nama terang dan tanda tangan

MOTTO

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)." Q.S Al-Anfal (8:60)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

Ekowidi, Fiqih A. “STRATEGI PERTAHANAN MARITIM JEPANG DALAM MENGHADAPI ESKALASI AKTIVITAS MILITER TIONGKOK DI PERAIRAN JEPANG TAHUN 2022-2023.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

This research examines Japan's maritime defence strategy in the face of increasing Chinese military activity in Japanese waters. This research uses a qualitative-descriptive method with secondary data collection through online and offline documents, using Miles and Huberman analysis techniques. Researchers found that Japan, in the face of China's escalation of military activity in Japanese waters, focuses on three Japanese defence objectives. First, patrol cooperation and surveillance of Japanese waters, as well as integrating modern military technology in maritime defence. Second, the strategy of protecting civilians with the ability to evacuate the population to the Japanese mainland and the use of military technology to reduce casualties among SDF personnel.

Keywords: Japan, China, Maritime Defence Strategy, Military Activity Escalation

ABSTRAK

Ekowidi, Fiqih A. “STRATEGI PERTAHANAN MARITIM JEPANG DALAM MENGHADAPI ESKALASI AKTIVITAS MILITER TIONGKOK DI PERAIRAN JEPANG TAHUN 2022-2023.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Penelitian ini mengkaji strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi peningkatan aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data sekunder melalui dokumen daring dan luring, menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Peneliti menemukan bahwa Jepang, dalam menghadapi eskalasi aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang, berfokus pada tiga objektif pertahanan Jepang. Pertama, kerjasama patroli dan pengawasan perairan Jepang, serta melakukan Integrasi teknologi militer modern dalam pertahanan maritim. Kedua, strategi perlindungan terhadap warga sipil dengan kemampuan evakuasi penduduk menuju daratan utama Jepang serta penggunaan teknologi militer untuk mengurangi terjadinya korban di kalangan personil SDF.

Kata Kunci: Jepang, Tiongkok, Strategi Pertahanan Maritim, Eskalasi Aktivitas Militer

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat bertemu dengan orang-orang arif bijaksana yang mengajarkan lebih banyak hal-hal yang jauh lebih bernilai dari pada sekedar bimbingan dalam penelitian dan penulisan skripsi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada bapak Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, M.A. sebagai dosen pembimbing yang senantiasa sabar memberikan saran, bimbingan, dan nasehatnya selama penelitian berlangsung dan selama penulisan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan, saran, kritik dan nasihat dari anggota tim penguji yang selalu dengan sabar memberikan arahan, koreksi dan ilmu-ilmunya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, ibunda Arlik Andajani dan ayahanda Eko Widi Warmanto yang senantiasa berdoa, berusaha dan memberikan kasih sayang untuk penulis. Penulis turut mengucapkan terima kasih untuk IS yang selalu ada untuk menyemangati dan menjadi teman berbagi cerita. Tidak lupa kepada mama Sita dan tante Ninik yang selalu memberikan dukungan, dan pelajaran hidup serta banyak membantu penulis. Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis kepada semua sahabat dekat penulis Irma,

Alvin, Riski, Mbak Indy, Mas Dafa, Mas Koko, dan Mbak Tyas yang telah setia memberi dukungan, berbagi ilmu dan berbagi kebahagiaan.

Selama masa perkuliahan, penulis sangat tertarik dengan isu-isu terkait perselisihan antarnegara, khususnya di wilayah Asia Timur yang mengalami berbagai ketegangan pada dekade ini. Perhatian penulis tertuju pada dinamika geopolitik di kawasan ini, termasuk konflik mengenai pulau-pulau yang disengketakan seperti Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Tiongkok. Penulis tertarik meneliti lebih jauh pertahanan maritim Jepang, melalui tiga aspek, keamanan laut, kekuatan laut, ketahanan manusia

Peneliti menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dari segala aspek, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi kecil ini dapat menjadi alat yang besar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, insyaallah. Aamiin Aamiin Ya Robbal Alamin.

Surabaya, 31 Mei 2024



Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Fokus Penelitian.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Review Literatur	11
6. Sistematika Penulisan Skripsi	25
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL DAN ARGUMENTASI UTAMA	28
1. Landasan Konseptual.....	28

A. Keamanan Maritim	28
B. Strategi Pertahanan Maritim	32
C. Eskalasi Aktivitas Militer.....	36
2. Argumentasi Utama.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
1. Jenis dan Problema Penelitian.....	40
2. Unit dan Peringkat Analisis	40
3. Situasi Sosial, Sampel dan Teknik Sampling	41
4. Teknik Pengumpulan Data	42
5. Teknik Analisis Data	43
6. Teknik Validasi Data	45
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
1. Eskalasi Aktivitas Militer Tiongkok	49
2. Dimensi Pertahanan	53
3. Dimensi Kemanusiaan	74
BAB V PENUTUP.....	81
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	xii

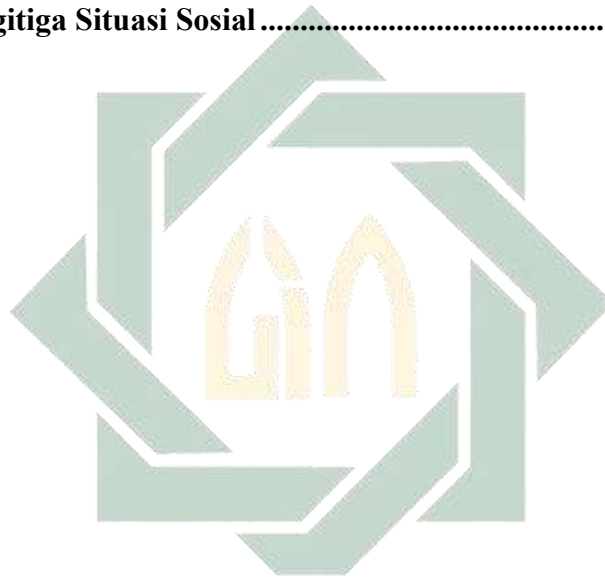
Lampiran Japan National Defense Strategy.....	xii
--	------------



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Pemetaan Eskalasi Militer Tiongkok.....	2
Grafik 2.1 Strategi Keamanan Maritim.....	29
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Strategi Pertahanan Maritim.....	34
Grafik 3.1 Segitiga Situasi Sosial	39



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

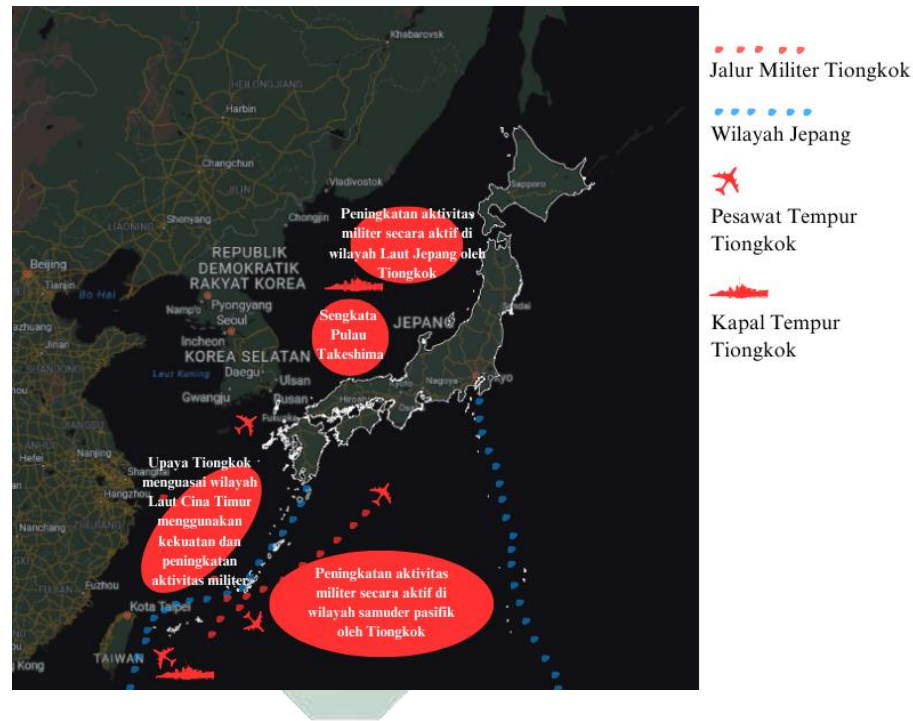
1. Latar Belakang

Panggung geopolitik global mengalami transisi signifikan ke arah Asia Timur, menggantikan posisi yang sebelumnya didominasi oleh Eropa Barat. Indikasi dari perubahan geopolitik ini tercermin melalui berbagai dimensi, satu manifestasi penting dari perubahan ini terletak pada transformasi dan modernisasi kekuatan militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Perkembangan militer Tiongkok yang signifikan ini telah memicu kecemasan di kalangan negara-negara sekitar Tiongkok, yang memunculkan dinamika keamanan baru di kawasan Asia Timur.¹

Tiongkok berusaha menghegemoni kawasan Asia Timur dengan mengklaim sepihak Laut Cina Selatan dan Timur, serta meningkatkan aktivitas militer di wilayah Laut Cina Timur, terutama deretan pulau-pulau Ryukyu yang masih disengketakan, Administrasi Ryukyu di saat ini dipegang oleh Jepang dan Tiongkok mengklaim bahwa pulau Senkaku atau *Diaoyutai Lieyu* milik

¹ Ermaya Suradinata, "Dinamika Pergeseran Geopolitik Ke Asia Timur," <https://rm.id/baca-berita/kolom/192231/dinamika-pergeseran-geopolitik-ke-asia-timur>, 12 Oktober 2023, <https://rm.id/baca-berita/kolom/192231/dinamika-pergeseran-geopolitik-ke-asia-timur>.

mereka dengan dasar historis pada dinasti Ming dan Qing, serta penggunaan peta yang sama, yaitu nine dash line.²



Gambar 1.1: Pemetaan Aktivitas Militer Tiongkok

Sumber: https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_budget/pdf/230330a.pdf.

Pada Tahun 2015 Shinzo Abe mengeluarkan kebijakan peningkatan militer untuk menjaga kedaulatan Jepang sebagai bentuk pelepasan sikap pasifisme Jepang merupakan respon terhadap dinamika kawasan terutama pada RRT. Saat ini Jepang berada di titik balik untuk meningkatkan militer mereka sebagai bentuk penolakan agresi dan pertahanan diri sebagai respon

² Annisa Uliana Sari, "Dilema Keamanan : Urgensi Remiliterisasi Jepang Pada Rezim Shinzo Abe," *Medium* (blog), 8 April 2023, <https://medium.com/@ksmironfire/dilema-keamanan-urgensi-remiliterisasi-jepang-pada-rezim-shinzo-abe-469291e261cc>.

kekhawatiran Jepang jika konflik pecah di Taiwan, Jepang sebagai sekutu Amerika Serikat akan terlibat menghadapi tindakan Tiongkok, hal ini disebabkan oleh fasilitas-fasilitas Amerika Serikat mayoritas berada di wilayah kedaulatan Jepang dan Korea Selatan.³

Tahun 2021, Jepang mendeteksi kapal selam Tiongkok di perairan kepulauan Senkaku Jepang. Ketegangan di Laut Cina Timur dengan Tiongkok semakin mengancam Kedaulatan Jepang, dikarenakan Tiongkok semakin meningkatkan aktivitas militer di perairan Jepang. Kapal selam Tiongkok tersebut bergerak di pulau Amioshima dengan jarak 700 kilometer dari wilayah disengketakan oleh Jepang dan Tiongkok. Jepang mengirimkan Pesawat Pengawasan Laut dan dua kapal tempur penghancur sebagai peringatan dan pengumpulan intelejen untuk menganalisa Tujuan dari Tiongkok. Sebelumnya pada tahun 2020, dengan peristiwa serupa juga terjadi sebelumnya pada pertengahan tahun. Jepang memperingatkan Tiongkok meningkatkan aktivitas militer maritim di Laut Cina Selatan dan Timur, serta meningkatkan pertahanan wilayah lepas pantai dan wilayah utara pulau yang di sengketakan. Pemerintahan Jepang mengatakan, bahwa Tiongkok telah seringkali melakukan pelanggaran

³ “Japan’s pacifism hangs in balance as China and North Korea threats loom,” *BBC News*, 19 Mei 2023, bag. Asia, <https://www.bbc.com/news/world-asia-65643346>.

teritorial Jepang di sekitar kepulauannya, serta seringkali mengancam kapal nelayan Jepang.⁴

Dalam konteks saat ini, Jepang menghadapi tantangan besar di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, akibat peningkatan aktivitas militer RRT yang semakin ekspansif dan intensif mencakup hampir seluruh wilayah perairan dekat Jepang. Situasi ini semakin kritis ketika militer Tiongkok meluncurkan sembilan rudal balistik pada tahun 2022, dimana lima di antaranya masuk ke dalam ZEE Jepang. Keadaan ini secara langsung menempatkan kedaulatan maritim Jepang dalam ancaman serius.⁵ Perencanaan pelatihan militer Tiongkok sebelumnya berada di wilayah yang bertumpukan dengan wilayah ZEE Jepang di Barat, sebanyak seratus pesawat tempur dan bomber dan sepuluh kapal perang berpartisipasi pada pelatihan tersebut.⁶

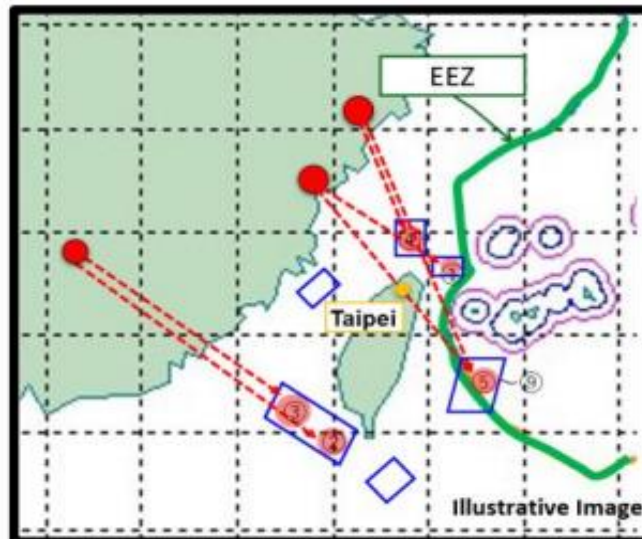
Tahun 2022, Tiongkok dan Rusia melakukan pelatihan militer laut di dekat perairan Jepang. Pelatihan tersebut termasuk pelatihan peluncuran misil dan altileri anti pesawat dan kapal selam. Tiongkok melakukan pelatihan tersebut dengan Rusia sebagai bentuk kerjasama untuk menjaga perdamaian dan

⁴ “Japan Detects Suspected China Submarine near Southern Island,” AP News, 12 September 2021, <https://apnews.com/article/china-japan-beijing-east-china-sea-bc3ed2adae679251b654fd72699f04f5>.

⁵ Japan Ministry of Defense, “Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2023 Budget” (Ministry of Defense), diakses 17 Januari 2024, https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_budget/pdf/230330a.pdf.

⁶ “Chinese Missiles Suspected of Landing in Japan’s Economic Zone,” Al Jazeera, diakses 1 Juli 2024, <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/4/chinese-missiles-suspected-of-landing-in-japans-economic-zone>.

stabilitas di wilayah Asia Pasifik.⁷ Pelatihan militer Tiongkok dan Rusia juga dilakukan pada bulan Juli tahun 2023, di wilayah yang sama berada dekat wilayah laut Jepang dan Semenanjung Korea. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program tahunan militer Tiongkok. Kedua negara tersebut meningkatkan kerjasama militer sebagai parade kekuatan terhadap negara-negara lainnya, terutama Jepang. Pelatihan tersebut melibatkan dua kapal penghancur, dua kapal *frigate* dan kapal penyuplai militer Tiongkok, serta



Gambar 1.2: Peta Jatuhnya Rudal Balistik Militer Tiongkok

⁷ Brad Lendon, "Russia and China Unite for Live-Fire Naval Exercises in Waters near Japan," CNN, 20 Desember 2022, <https://www.cnn.com/2022/12/19/asia/russia-china-naval-exercises-intl-hnk-ml/index.html>.

⁸ Kathrin Hille, "China and Russia Step up Military Co-Operation on Japan's Doorstep," 18 Juli 2023, <https://www.ft.com/content/3a6f7efe-b064-45a7-8125-259a51df8a20>.

Sumber: https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_budget/pdf/230330a.pdf.

Tahun 2022, Tiongkok dan Rusia juga melakukan Pelatihan militer udara dekat wilayah Jepang, pada masa itu Jepang melakukan pertemuan negara-negara Quad, seperti Amerika Serikat, India, Australia yang diselenggarakan di Jepang. Pelatihan tersebut melibatkan Enam pesawat bomber Rusia dan Tiongkok yang dilakukan didekat perairan Jepang. di wilayah abu-abu laut Cina Timur. Tindakan dari kedua negara tersebut dinilai sebagai provokasi oleh pemerintahan Jepang.⁹

Desember di tahun yang sama, Tiongkok mengirimkan 47 pesawat tempur di dekat wilayah kepulauan terpencil Jepang. Ketegangan tersebut terjadi dikarenakan adanya kunjungan juru bicara Nancy Pelosi di Taiwan, sehingga menimbulkan respon oleh Tiongkok, dengan melakukan pelatihan di sekitaran wilayah yang berdekatan dengan Jepang. Tiongkok melintasi wilayah abu—abu persengketaan antara Tiongkok dan Taiwan. Sebagai bentuk tindakan *deterrence* dan provokasi terhadap Taiwan dan Amerika Serikat.¹⁰

⁹ “China, Russia Fly 6 Bombers Near Japan Amid Quad Summit,” diakses 30 Mei 2024, <https://thediplomat.com/2022/05/china-russia-fly-6-bombers-near-japan-amid-quad-summit/>.

¹⁰ Eric Cheung jozuka Jessie Yeung,emiko, “China Sends 47 Aircraft across Taiwan Strait in New Military ‘Strike Drill,’” CNN, 26 Desember 2022, <https://www.cnn.com/2022/12/25/asia/taiwan-china-aircraft-incursions-intl-hnk/index.html>.

Pada bulan yang sama, Jepang melaporkan adanya kapal Tiongkok memasuki wilayah Jepang di barat laut laut. Kapal Survey milik Tiongkok melali wilayah perairan Pulau Yakushima. Kementerian Pertahanan Jepang memaparkan, bahwa kapal survey Tiongkok tersebut merupakan ketujuh kalinya melakukan pelanggaran perbatasan. Pemerintah Jepang juga melaporkan pada tahun 2021, bahwa kejadian serupa terjadi di wilayah perairan Kagoshima. Kapal Tiongkok seringkali memasuki teritorial di wilayah-wilayah terpencil Jepang, termasuk pulau Senkaku yang hingga kini masih disengketakan kedua negara.¹¹

Jepang melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang awalnya berusaha untuk dihindari pasca perjanjian Potsdam 1948 untuk membatasi kekuatan pertahanan militer Jepang supaya tidak menjadi ancaman bagi negara lain, namun disaat kedaulatan Jepang mengalami ancaman pemerintah Jepang melakukan peningkatan pertahanan militer nasional mereka. Penelitian ini memberikan detail terkait strategi Jepang dalam mempertahankan kedaulatan maritim melalui pertahanan nasional Jepang. Pada Tahun 2022-2023 strategi militer Jepang saat ini mengikuti perkembangan modern dan bekerjasama dengan negara-negara sekutu untuk berusaha meningkatkan kekuatan pertahanan militer dari ancaman militer Tiongkok yang saat ini mengalami

¹¹ KYODO NEWS, "Chinese navy vessel enters Japan waters near Kagoshima Pref. islands," Kyodo News+, diakses 3 Juli 2024, <https://english.kyodonews.net/news/2023/02/219ec09fe4a0-chinese-navy-vessel-enters-japan-waters-near-kagoshima-pref-islands.html>.

eskalasi aktivitas di sekitar wilayah maritim Jepang. Penelitian strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi meningkatnya aktivitas militer yang dilakukan oleh Tiongkok di perairan Jepang, terutama dengan fokus pada konteks pertahanan wilayah maritim. Dalam lingkup penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara rinci bagaimana Jepang merumuskan dan melaksanakan strategi-strategi yang relevan untuk mempertahankan keutuhan wilayah maritimnya, khususnya di wilayah Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.

Analisis dalam penelitian ini akan mencakup deskripsi mendalam mengenai berbagai aspek dari strategi pertahanan maritim Jepang, termasuk pada penggunaan kekuatan militer dalam mengamankan perairan yang bersangkutan. Selain itu, penelitian juga akan mengulas dampak dan implikasi dari strategi-strategi tersebut terhadap keamanan nasional Jepang secara lebih luas. Dengan mengambil pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas dinamika keamanan di kawasan tersebut, serta relevansi strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di tingkat regional maupun global.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, pertanyaan penelitian ini adalah:
"Bagaimana strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi peningkatan aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang pada tahun 2022-2023?"

3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi eskalasi aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang tahun 2022-2023.

4. Manfaat Penelitian

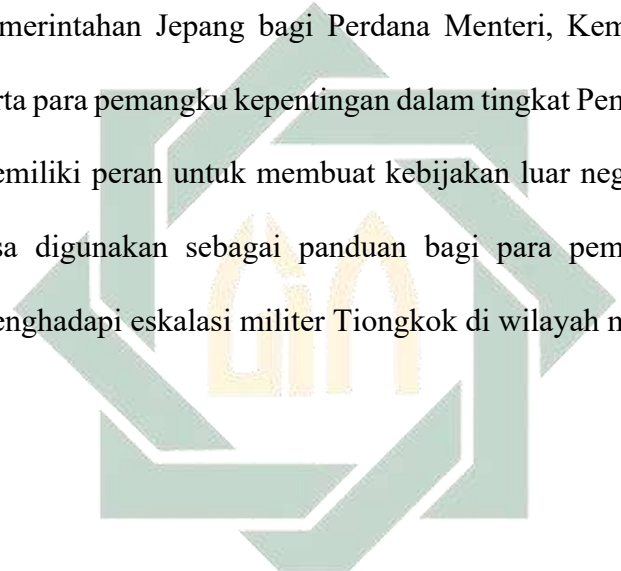
Penelitian ini untuk lebih lanjut dapat bermanfaat bagi para akademisi dan para praktisi pembuat kebijakan. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut:

1. Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional terutama pada studi Asia Timur. Hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi akademisi dan digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa kontribusi dalam lingkungan praktisi yang memiliki keterkaitan dalam Hubungan Internasional. Kontribusi laporan penelitian ini ditujukan bagi Pemerintahan Jepang bagi Perdana Menteri, Kementerian Luar Negeri, serta para pemangku kepentingan dalam tingkat Pemerintahan Jepang yang memiliki peran untuk membuat kebijakan luar negeri. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai panduan bagi para pembuat kebijakan dalam menghadapi eskalasi militer Tiongkok di wilayah maritim Jepang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

5. Review Literatur

Dalam dekade terakhir, transformasi dalam kebijakan pertahanan dan militer Jepang telah menandai sebuah era baru. Di bawah kepemimpinan Shinzo Abe dan Fumio Kishida, Jepang mengambil langkah-langkah signifikan yang mengubah paradigma keamanannya dari tradisi pasifisme yang lama menjadi pendekatan yang lebih realistis dan defensif.

Namun, seiring waktu, kebijakan keamanan Jepang mengalami perubahan signifikan, terutama dengan kembalinya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri sejak Desember 2012. Abe memimpin upaya untuk memperkuat peran politik dan militer Jepang. Pada tahun 2014, Kabinet Jepang meratifikasi reinterpretasi Artikel 9 Konstitusi, memungkinkan peningkatan kapabilitas militer. Meskipun langkah ini mendapat kritik, terutama dari masyarakat Jepang yang memiliki sikap anti-militer akibat pengalaman sejarah mereka, Abe tetap melanjutkan kebijakan tersebut. Dalam penelitian berjudul "Pengaruh Kebijakan Pemerintahan Shinzo Abe Terhadap Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang (Periode 2015 - 2019)", penulis menggali isu stabilitas kawasan regional dan implikasinya. Peningkatan kapabilitas militer Jepang dipengaruhi oleh faktor domestik, khususnya peran partai politik seperti LDP, dan faktor sistemik, terutama dalam dinamika kawasan yang menciptakan security dilemma. Situasi ini terkait dengan ketegangan antara Jepang,

Tiongkok, dan Korea Utara, di mana peningkatan kekuatan satu negara dapat memicu respons negara lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Inilah yang menjadi latar belakang kebijakan Jepang untuk meningkatkan kapabilitas militer, terutama menghadapi konflik di Kepulauan Senkaku atau Diaoyu dengan Tiongkok.¹²

Konteks politik internasional saat ini mengalami transformasi yang berdampak pada pengaruh negara-negara atau kawasan tertentu. Meskipun kerjasama ekonomi menjadi fokus utama dalam sistem ekonomi global, namun sejumlah negara masih memprioritaskan peningkatan kapasitas militer sebagai bagian dari strategi politik mereka. Kekuatan militer tetap menjadi faktor dominan dalam menjaga stabilitas domestik, regional, dan global, yang tercermin dalam meningkatnya anggaran belanja militer dan pembaharuan alat utama sistem pertahanan.

Peningkatan kapasitas militer ini seringkali digunakan sebagai instrumen untuk menegaskan kekuatan dan sebagai deterensi terhadap negara-negara lain atau kawasan tertentu. Oleh karena itu, perlombaan dalam mengembangkan teknologi militer modern menjadi suatu keharusan bagi negara-negara tersebut, yang pada gilirannya dapat mengkonsolidasikan posisi mereka sebagai aktor utama dalam politik internasional.

¹² Alfonz Maulana Ramadhan dan Akmal Tawakal, "KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SHINZO ABE TERHADAP PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG DITINJAU DARI SECURITY DILEMMA THEORY," *GLOBAL INSIGHT JOURNAL* 8, no. 1 (17 Mei 2023), <https://doi.org/10.52447/gij.v8i1.6607>.

Kenaikan anggaran militer, terutama oleh Tiongkok, juga mencerminkan dinamika keamanan regional, terutama di Asia Timur, di mana konstelasi politik internasional masih dipengaruhi oleh sejarah konflik masa lalu, termasuk keterlibatan Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Tiongkok, sebagai salah satu aktor utama dalam kawasan ini, melalui peningkatan kapasitas militer mereka, mencoba untuk memperkuat stabilitas keamanan dan politik regional. Ini juga sejalan dengan pola politik internasional yang masih terpengaruh oleh aliansi masa lalu, baik dari blok Barat maupun Timur. Meskipun ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, Tiongkok tetap konsisten dalam upaya modernisasi militer mereka sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keamanan regional. Keterlibatan Tiongkok dalam konflik masa lalu dengan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan juga menjadi pertimbangan penting dalam strategi militer mereka, dengan tujuan menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan militer yang kuat. Dalam konteks politik internasional yang anarkis, Tiongkok juga terlibat dalam aliansi militer untuk mengimbangi pengaruh poros Barat, termasuk melalui kemitraan dengan negara-negara seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran.¹³

Perkembangan dan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan selama dekade terakhir menimbulkan beragam spekulasi, baik positif maupun negatif, termasuk dugaan mengenai intensi Tiongkok untuk menjadi hegemon baru di

¹³ Laode Muhamad Fathun, "PENGARUH PENINGKATAN KEKUATAN MILITER TIONGKOK TERHADAP KEAMANAN STABILITAS REGIONAL ASIA TIMUR" 2, no. 2 (2016).

wilayah tersebut. Kehadiran Tiongkok di kawasan ini telah terlihat sejak era Perang Dingin, dengan Tiongkok memberikan bantuan keuangan dan perdagangan kepada negara-negara di Pasifik Selatan. Negara-negara besar, terutama negara Barat, memberikan ruang bagi kehadiran Tiongkok di kawasan ini sebagai penyeimbang kehadiran Uni Soviet. Kesan tersebut semakin diperkuat dengan intensifikasi hubungan diplomatik antara Tiongkok dan negara-negara seperti Selandia Baru dan Australia selama Perang Dingin.

Seiring berjalannya waktu, perhatian Tiongkok terhadap Pasifik Selatan semakin meningkat, terutama ditandai dengan peningkatan bantuan ekonomi yang mereka berikan kepada negara-negara di wilayah tersebut. Tiongkok telah menjadi donor terbesar ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat, memberikan bantuan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat perdagangan, infrastruktur, kemampuan pemerintah dan militer, serta pengembangan sumber daya alam di Pasifik Selatan. Bantuan ekonomi yang tidak bersyarat menjadi daya tarik utama bagi negara-negara di kawasan tersebut, yang sebagian besar memiliki pendapatan nasional yang rendah. Selain bantuan ekonomi, kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan juga didukung oleh diplomasi kultural, seperti pendirian sekolah hukum, pertukaran pelajar, dan pengajaran Bahasa Mandarin. Meskipun belum ada kesimpulan tunggal mengenai tujuan utama Tiongkok di Pasifik Selatan, namun potensi Tiongkok untuk menjadi hegemon di kawasan tersebut tetap patut dipertimbangkan. Dengan perspektif realisme strategis,

kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan dapat dilihat sebagai bagian dari strategi global mereka untuk mengamankan kepentingan strategis tanpa menggantikan hegemon yang sudah ada.

Tiongkok menggunakan berbagai strategi adaptasi, penyelesaian, dan eksploitasi perbedaan untuk bertahan dalam persaingan global. Meskipun Tiongkok ingin meningkatkan hubungannya dengan kawasan Pasifik Selatan, namun hal ini juga menjadi bagian dari upaya Tiongkok untuk menangkap peluang kepentingan global yang dapat dimaksimalkan dari kawasan tersebut. Dalam konteks ini, Tiongkok tidak hanya ingin menegaskan kehadirannya di Pasifik Selatan, tetapi juga ingin membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan wilayah tersebut.¹⁴

Hubungan antara Tiongkok dan Taiwan telah menjadi subjek konflik yang berkelanjutan sejak Tiongkok berubah menjadi republik pada tahun 1945. Konflik ini semakin memanas seiring berjalannya waktu, dengan Amerika Serikat juga terlibat dalam membantu Taiwan menghadapi ancaman dari Tiongkok sejak tahun 1955. Belakangan, pada 4 Oktober, Tiongkok meningkatkan tensi dengan mengirim 52 pesawat tempur melintasi wilayah udara Taiwan, jumlah terbesar sejak serangan serupa yang dilaporkan oleh Taiwan pada tahun sebelumnya. Konflik Taiwan-Tiongkok memiliki implikasi

¹⁴ Vinsensio Ma Dugis, "Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Stratejik," *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 1 (22 Februari 2018): 1, <https://doi.org/10.20473/jgs.9.1.2015.1-18>.

besar dalam geopolitik Asia Timur dan sering kali menentukan dinamika hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Taiwan, meskipun memiliki perkembangan ekonomi maju, tidak memiliki kekuatan politik yang setara dengan negara-negara lain yang diakui secara internasional.

Namun, hubungan Taiwan-Tiongkok tidak selalu berjalan mulus. Presiden Chen Shui-bian dari Partai Progresif Demokratik (DPP), yang mendukung pemisahan permanen dari Tiongkok, memperkuat posisi politik Taiwan dalam hal kemerdekaan. Namun, kebijakan tersebut diimbangi oleh pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Ma Ying-jeou dari KMT, yang berupaya mempererat hubungan Taiwan-Tiongkok melalui perjanjian perdagangan. Namun, upaya-upaya untuk mempererat hubungan Taiwan-Tiongkok sering kali menimbulkan protes di dalam negeri, seperti yang terjadi dengan protes besar-besaran pada Maret 2014 yang dikenal sebagai Gerakan Bunga Matahari. Gerakan ini menentang perjanjian perdagangan antara Taiwan dan Tiongkok yang dianggap akan meningkatkan ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok. Selama ini, AS telah memainkan peran penting dalam membantu Taiwan menghadapi ancaman dari Tiongkok dan memperkuat sistem keamanan mereka dengan pasokan alutsista dari AS. Konflik antara Tiongkok dan Taiwan, di antara aktor-aktor lainnya, terus menjadi pusat

perhatian dalam geopolitik Asia Timur dan menentukan hubungan antara Tiongkok, Taiwan, dan Amerika Serikat.¹⁵

Kawasan Asia Timur merupakan wilayah dengan dinamika hubungan antar negara yang sangat kompleks. Setiap negara dalam kawasan ini memiliki karakteristik dan instrumen tersendiri dalam menunjukkan posisinya. Tiongkok, dengan jumlah penduduk terbesar dan ekonomi yang berkembang pesat, memiliki kemampuan produksi senjata yang signifikan. Di sisi lain, Jepang dan Korea Selatan memiliki keunggulan teknologi yang tinggi. Korea Utara sebagai kekuatan nuklir juga menjadi ancaman yang perlu diperhatikan. Fakta sejarah, seperti Perang Dunia I dan II serta Perang Dingin, juga mempengaruhi dinamika hubungan antar negara di kawasan ini.

Dalam konteks Perang Dingin, terdapat konsep 'Hobbesian Fear', di mana negara-negara adikuasa cenderung bersikap defensif terhadap provokasi negara lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan di antara mereka. Setelah berakhirnya Perang Dingin, kawasan Asia Timur menjadi pusat perhatian internasional dengan persaingan antara Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok dalam mengusahakan kepentingan nasional masing-masing. Meskipun telah terjadi perkembangan politik internasional yang mengarah pada hubungan multilateral dan upaya

¹⁵ Rendy Adityo Nugroho, "Strategi Peningkatan Keamanan Taiwan Dalam Menghadapi China," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 2, no. 1 (9 Mei 2022): 1–11, <https://doi.org/10.31605/lino>.

perdamaian, tetapi tantangan keamanan seperti di Semenanjung Korea masih berlanjut.

Asia Timur juga menjadi wilayah yang strategis dalam konteks hegemoni global, terutama antara AS dan Tiongkok. Tiongkok sebagai negara yang sedang berkembang pesat berusaha melakukan counter-hegemoni terhadap AS dengan menggunakan kekuatan ekonominya untuk pengembangan militer dan strategi geopolitik seperti Chain Island. Sementara AS, sebagai pemimpin keamanan regional, melakukan upaya rebalancing dan kerjasama keamanan dengan sekutunya untuk menjaga stabilitas kawasan. Dalam upaya memenangkan war of position, Tiongkok perlu membentuk common sense di kawasan Asia Timur tanpa harus melakukan pendekatan koersif yang dapat menimbulkan resistensi dari negara-negara tetangganya. Namun, jika Tiongkok ingin menjadi pemimpin keamanan di kawasan dengan cepat, mereka harus mempertimbangkan risiko dan proyeksi untung-rugi dalam mengajak AS ke dalam Thucydides Trap. Secara keseluruhan, rivalitas antara AS dan Tiongkok menggambarkan kondisi di mana paradigma lama sedang mati dan paradigma baru belum lahir.¹⁶

Kebijakan Pertahanan adalah seni atau ilmu yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam situasi konflik. Bull juga menyatakan bahwa strategi

¹⁶ Lalu Azhar Rafsanjani, Lalu Putrawandi Karjaya, dan Khairur Rizki, "Rivalitas Amerika Serikat (AS) dan China dalam Menjadi Security Orderer di Asia Timur," *Indonesian Journal of Global Discourse* 2, no. 1 (21 November 2020): 27–44, <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i1.6>.

militer lebih menekankan tujuan politik daripada tujuan militer itu sendiri. Sementara itu, negara menggunakan kekuatan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, yang mendorong mereka untuk memaksimalkan pertahanan dan melakukan aliansi dengan negara-negara yang kuat demi keamanan mereka. Saat ini, situasi keamanan internasional sedang dipengaruhi oleh persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dengan Tiongkok, baik dalam hal ekonomi, kekuatan, maupun pengaruh di dunia internasional. Tiongkok sedang mengalami peningkatan kekuatan yang menjadi tantangan bagi AS. AS harus lebih berfokus secara regional di sekitar Tiongkok tanpa memprovokasi, dengan mendalami aliansi dan kemitraan terutama di Asia Timur.

Dalam konteks hukum laut, negara-negara memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen di wilayah laut mereka. Namun, tumpang tindih klaim wilayah antar negara dapat menyebabkan ketegangan, seperti yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok. Dalam situasi ini, Jepang terus meningkatkan kapabilitas pertahanannya sebagai respons terhadap ancaman dari Tiongkok. Meskipun demikian, Jepang tetap berusaha menjaga pendekatan yang defensif dan tidak agresif. Prediksi kedepannya adalah bahwa ketegangan antara Jepang dan Tiongkok akan terus berlanjut, sehingga Jepang

akan terus meningkatkan kapabilitas pertahanannya untuk menjaga keamanan negaranya dari ancaman.¹⁷

Dalam penelitian yang berjudul Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok oleh La Ode Muhammad Ilham Gafur, menemukan kepentingan Jepang bersama aliansinya yang tertera dalam Buku Putih Pertahanan Jepang 2016 yakni menjaga dan memelihara perdamaian, keamanan, stabilitas kawasan, dan lingkungan yang berada di sekitar Jepang maupun internasional. Impelementasi strategi pertahanan Jepang dengan aliansi Jepang-Amerika Serikat menghasilkan penemuan yang mengindikasikan adanya militerisasi atau normalisasi militer Jepang yang dibuktikan dengan adanya peningkatan pada kapabilitas militer berikut seperti, anggaran militer, pelebaran peran militer, dan aktivitas ekonomi lainnya dalam bidang militer. Selain itu, Shinzo Abe juga berusaha menyusun kerangka hukum yang sah untuk mendukung proses normalisasi militer. Selanjutnya, Amerika Serikat menjadi pihak ketiga yang menghindari kemungkinan konflik langsung antara Jepang dengan Tiongkok, dan menjadikan aliansi ini sebagai elemen stabilisasi di wilayah Asia

¹⁷ M Ghazy Ramadhan Jauhari, “KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TERHADAP PENINGKATAN KEHADIRAN MILITER TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK TIMUR, 2016—2019,” 2023.

Timur. Kemudian, dalam penelitian tersebut juga dijelaskan mengenai Aliansi tersebut yang berperan dalam pencegahan dan respons terhadap potensi ancaman di wilayah yang berkembang serta mengganggu keamanan Jepang.

Saat ini, Jepang memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan kepada Amerika Serikat dan mitra lainnya yang memiliki hubungan yang erat, serta memberikan pertahanan terhadap negara-negara yang secara langsung mengancam keamanan nasionalnya. Selain itu, Jepang telah mengembangkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Australia, dan menjalin kemitraan pertahanan dengan India sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok. Dampak aliansi ini terhadap stabilitas regional Asia Timur adalah bahwa kerjasama antara kedua negara dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan bagi negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Utara untuk menyadari bahwa keberadaan aliansi bukanlah hal yang remeh. Dengan kekuatan militer dan pertahanan yang kuat, negara-negara di wilayah tersebut mungkin akan mempertimbangkan kembali peningkatan kapabilitas militer mereka. Namun, meningkatnya kemampuan pertahanan Jepang juga dapat menyebabkan normalisasi militer di Jepang, yang

pada gilirannya dapat mengancam stabilitas regional karena potensi perubahan dinamika kekuatan militer di kawasan tersebut.¹⁸

Penelitian berjudul *Kepentingan Jepang Dalam Kerja sama Pertahanan dan Keamanan dengan Australia (2020-2022)* oleh Fathia Kinarya dan Feyza Raharsh Lumintosari. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang Perang Dingin yang mendorong Jepang melakukan perubahan pada dinamika keamanannya secara fundamental dan struktural pada strateginya. Selain itu, Amerika Serikat, sebagai sekutu Jepang, juga berperan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang.

Tiongkok yang berpengaruh di kawasan merupakan salah satu faktor Jepang memperkuat keberadaan Jepang adalah melalui kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat dan Australia. Jepang dan Australia telah lama menjalin hubungan kerjasama dengan tujuan yang sama, yaitu memperkuat keberadaan mereka di wilayah Asia Pasifik. Kedua negara ini sering berkolaborasi baik dalam bidang militer maupun ekonomi. Pada tahun 2014, mereka melaksanakan latihan militer reguler untuk meningkatkan interoperabilitas antara Japan Self Defense Force (JSDF) dan Australian Defense Force (ADF). Sebelumnya, Jepang juga melakukan pembelian

¹⁸ “STRATEGI PERTAHANAN JEPANG DI BAWAH ALIANSI JEPANG-AMERIKA SERIKAT DALAM MENGHADAPI PENINGKATAN PENGARUH TIONGKOK - CORE,” diakses 14 Mei 2024, <https://core.ac.uk/display/89562172>.

peralatan pertahanan, termasuk kendaraan lapis baja infanteri Bushmaster, dari Australia. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan operasi militer bersama, meningkatkan frekuensi latihan militer bersama, dan seiring berjalannya waktu, memperluas kerjasama penting di bidang intelijen. Penguatan pertahanan dan keamanan Jepang merupakan respons terhadap ancaman nuklir dari Korea Utara, yang secara konsisten melakukan uji coba nuklir yang sering kali melintasi batas wilayah Jepang dan menimbulkan kekhawatiran di negara tersebut.¹⁹

Kebijakan Pertahanan Jepang Terhadap Peningkatan Kehadiran Militer Tiongkok Di Laut Tiongkok Timur, 2016—2019 oleh M.Ghazy Ramadhan Jauhari. Dalam penelitiannya memaparkan bahwa di Asia Timur, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan berperan aktif dalam menjaga keseimbangan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Dalam konteks keamanan militer, mereka mendorong keterlibatan AS dalam jangka panjang di wilayah ini sebagai penyeimbang terhadap pengaruh yang semakin meningkat dari Tiongkok. Sejak Perang Dunia II, Jepang telah mematuhi konstitusi yang melarang penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik internasional. Namun, kehadiran militer AS di Jepang dan reinterpretasi terhadap Konstitusi Artikel 9 menyebabkan dilema terhadap

¹⁹ Feyza Lumintosari dan Fathia Kinarya, “Kepentingan Jepang Dalam Kerja Sama Pertahanan Dan Keamanan Dengan Australia (2020-2022),” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 3, no. 1 (20 Juni 2023): 35–48, <https://doi.org/10.31605/lino>.

stabilitas keamanan Jepang. Jepang bergantung pada militer AS untuk pertahanan dan keamanannya, tetapi juga dipaksa untuk meningkatkan kekuatan militer sendiri, yang bertentangan dengan prinsip konstitusionalnya. UNCLOS 1982 memberikan negara hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen serta sumber daya alamnya. Namun, sengketa perbatasan laut antar negara sering terjadi, terutama di Laut Tiongkok Timur, karena tumpang tindihnya klaim wilayah. Konflik antara Tiongkok dan Jepang, terutama terkait klaim atas Pulau Senkaku yang kaya akan sumber daya alam, merupakan contoh konkret dari dampak tumpang tindih klaim wilayah terhadap stabilitas regional.

Jepang memiliki keuntungan geografis strategis sebagai negara kepulauan di Laut Tiongkok Timur. Hubungannya dengan AS, yang ditandai dengan pangkalan militer AS di Jepang, meningkatkan potensi strategisnya di wilayah tersebut. Hal ini memberikan Jepang potensi signifikan dalam geopolitik regional, terutama dalam penelitian dan pengembangan di Laut Tiongkok Timur. Penguatan kapabilitas pertahanan Jepang, terutama pada Japan Airborne Self-defense Force dan Japan Maritime Self-defense Force, selama periode 2016-2019. Ini disebabkan oleh kondisi aksi-reaksi antara Jepang dan Tiongkok terkait sengketa perbatasan di Laut Tiongkok Timur. Tingginya kehadiran militer Tiongkok memaksa Jepang meningkatkan daya deteksi radar pertahannya dan modernisasi aset militer untuk melindungi

wilayahnya dari pelanggaran teritorial. Meskipun Tiongkok memiliki kapabilitas militer tertinggi di wilayah Asia Timur, Jepang merespons ancaman tersebut dengan strategi pertahanan yang bersifat defensif. Jepang mengejar kemampuan militer yang kuat untuk dapat mandiri dalam pertahanan negaranya tanpa ketergantungan penuh pada AS.²⁰

Pembahasan terkait dengan penelitian terdahulu tidak mendeskripsikan secara detail terkait penjelasan spesifik pada konteks pertahanan maritim, sementara itu Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi eskalasi aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang, terutama dalam konteks pertahanan wilayah maritim. Dengan fokus pada wilayah Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana strategi Jepang dalam mempertahankan wilayah maritimnya menggunakan kekuatan militer, serta implikasi dari upaya tersebut terhadap keamanan nasional Jepang.

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian dapat berjalan secara terukur dan sistematis maka penelitian peneliti, untuk sementara untuk rancangan sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut, Pendahuluan penelitian ini dimulai dengan memberikan

²⁰ Jauhari, “KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TERHADAP PENINGKATAN KEHADIRAN MILITER TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK TIMUR, 2016—2019.”

gambaran umum tentang konteks penelitian. Latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian akan diuraikan secara rinci, menyertakan rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian. Bab ini juga mencakup tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, serta tinjauan literatur yang telah dilakukan. Penelitian ini akan membahas definisi konseptual yang relevan dengan topik penelitian dan menjelaskan sistematika pembahasan yang akan diterapkan.

Peneliti akan menjelaskan secara rinci tentang metodologi penelitian yang digunakan. Ini mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, serta subyek dan obyek penelitian. Teknik pengumpulan dan analisis data juga akan diuraikan secara mendalam. Penelitian ini akan memaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Peneliti akan membandingkan hasil penelitian dengan konsep relevan dan temuan penelitian lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, bab ini akan menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada dalam domain penelitian yang sama.

Hasil penelitian akan disimpulkan dan temuan-temuan penting yang diperoleh akan ditegaskan. Selain itu, bab ini juga akan membahas implikasi

penelitian, keterbatasan penelitian, serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, bab ini menjadi penutup yang merinci hasil dan kontribusi penelitian secara menyeluruh.



BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL DAN ARGUMENTASI UTAMA

1. Landasan Konseptual

A. Keamanan Maritim

Pertahanan Maritim adalah sebuah istilah yang menarik perhatian terhadap tantangan-tantangan baru dan menggalang dukungan untuk mengatasi hal tersebut. Melalui Pemikiran Christian Bueger memberikan pandangan yang mendalam tentang konsep-konsep utama yang terlibat dalam keamanan maritim suatu negara. Konsep-konsep tersebut, yaitu kekuatan laut, keselamatan laut, ekonomi laut, dan keamanan manusia, dapat memberikan fondasi yang kokoh dalam mengatasi tantangan dan ancaman di wilayah maritim.²¹

Diskusi mengenai keamanan maritim seringkali ditunjukkan dengan ancaman yang ada di domain maritim. Mereka merujuk pada ancaman-ancaman seperti sengketa antar-negara di laut, terorisme maritim, perompakan, perdagangan narkoba, manusia dan barang-barang terlarang, proliferasi senjata, penangkapan ikan ilegal, kejahatan lingkungan, atau kecelakaan dan bencana maritim. Argumennya kemudian adalah bahwa

²¹ Christian Bueger, "What is maritime security?," ScienceDirect, 2015, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X14003327?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=880ad2d0580368e3.

keamanan maritim harus didefinisikan sebagai ketiadaan ancaman-
ancaman tersebut.²²



Grafik 2.1: Strategi Keamanan Maritim

Bueger, “What is maritime security?”

Kekuatan laut, atau *sea power*, menjadi fokus utama dalam menjaga kedaulatan maritim dan melawan ancaman dari luar. Penggunaan kekuatan militer menjadi kunci dalam mempertahankan kepentingan nasional di laut, termasuk dalam menjaga keamanan perairan dan menanggapi ancaman potensial.

Keselamatan laut, atau *marine safety*, menjadi prioritas penting dalam meminimalkan risiko kecelakaan dan bencana di laut. Keselamatan

²² Ibid.

maritim merupakan definisi dari keselamatan jiwa, kesehatan dan properti dari risiko lingkungan dan operasional. Pendekatan keselamatan maritim mencakup hal-hal seperti kebebasan dari bahaya maritim, kebebasan dari kerugian kesehatan manusia, dan ketiadaan kerugian finansial. Definisi keselamatan dapat didefinisikan sebagai kondisi sistem laut (kapal, lingkungan laut, personal) dimana tidak ada elemen-elemen tidak mengancam elemen lainnya dari sistem tersebut. Kondisi bahaya disebabkan oleh kecelakaan maritim, yang dipahami sebagai peristiwa yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian signifikan baik secara material dan personal.²³ Upaya pencarian dan penyelamatan, pemantauan lingkungan laut, dan penegakan hukum maritim menjadi bagian integral dalam menjaga keselamatan rute transportasi laut dan mencegah kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan atau insiden di laut.

Ekonomi laut, atau *blue economy*, menjadi motor penggerak dalam mengembangkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pengembangan sektor-sektor seperti perikanan, pariwisata, energi terbarukan, dan

²³ Kamil Formela, Tomasz Neumann, dan Adam Weintrit, "Overview of Definitions of Maritime Safety, Safety at Sea, Navigational Safety and Safety in General," *TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation* 13 (1 Juni 2019): 285–90, <https://doi.org/10.12716/1001.13.02.03>.

transportasi laut menjadi strategi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.²⁴

Keamanan manusia, atau *human security*, menekankan pentingnya perlindungan individu dan komunitas yang tinggal di wilayah maritim. Konsep keamanan manusia yang dipromosikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pertama kali diperkenalkan secara resmi dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1994. Konsep ini menekankan pentingnya perlindungan individu dari berbagai ancaman yang mengancam kesejahteraan dan martabat manusia. Berbeda dengan pandangan tradisional tentang keamanan yang berfokus pada negara, keamanan manusia menitikberatkan pada individu dan komunitas. Keamanan manusia mencakup dua aspek utama: kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*) dan kebebasan dari kekurangan (*freedom from want*). Kedua aspek ini mencakup perlindungan dari kekerasan serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perawatan kesehatan.²⁵ Upaya untuk mencegah ancaman seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan terorisme maritim menjadi bagian integral dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan manusia di laut.²⁶

²⁴ Bueger, "What is maritime security?"

²⁵ United Nations, *Human Development Report 1994* (Oxford New York, N.Y: Oxford Univ. Pr, 1994).

²⁶ Bueger, "What is maritime security?"

B. Strategi Pertahanan Maritim

Konsep strategi pertahanan maritim merupakan pendekatan militer maritim dalam menjaga kedaulatan wilayah dan kepentingan nasional terutama di perairan. Ketidakamanan maritim diukur melalui empat indikator yang dipaparkan oleh Bueger, dari segi keselamatan laut, keamanan laut, keamanan manusia. Strategi pertahanan maritim dapat digunakan untuk menjawab ketidakamanan maritim, yang dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi pertahanan dan dimensi kemanusiaan. Melalui dimensi pertahanan untuk melindungi wilayah laut, peningkatan kekuatan laut sangat penting untuk melindungi keselamatan di wilayah maritim dan daratan dari ancaman yang datang dari laut. Pada aspek kemanusiaan dalam melindungi kepentingan nasional, penjaminan kesejahteraan dan keselamatan warga di daratan juga merupakan hal yang penting, pasukan militer akan berusaha untuk melindungi dan mengevakuasi penduduk sipil jika terjadi ancaman melalui laut.

Strategi pertahanan laut menurut Suhirwan, *dkk*, merupakan suatu pendekatan yang dirancang dalam menjaga kedaulatan wilayah suatu negara, melindungi kepentingan nasional di wilayah laut, serta memastikan keamanan dan keselamatan navigasi maritim. Strategi pertahanan laut mencakup berbagai aspek seperti, kekuatan angkatan

laut, keamanan maritim, hukum laut, dan kerjasama internasional digunakan untuk mengatasi berbagai ancaman yang datang dari laut.²⁷

Pertahanan wilayah laut saat ini, lebih berfokus pada wilayah pesisir dibandingkan di lautan terbuka. Penguasaan laut post-modern lebih berfokus pada perlindungan kekuatan dan dominasi ruang pertempuran di wilayah pesisir pantai, sehingga kondisi tersebut berbeda dari lautan terbuka serta ancaman berbasis di darat lebih terlihat, perubahan ini sangat berbeda dibanding dengan pertahanan laut di masa perang dingin. Pada proyeksi kekuatan laut, daratan merupakan suber ketidakaturan maritim, maka dari itu angkatan laut biasanya hanya akan menangani gejala masalah, bukan penyebab dari suatu ancaman dikarenakan laut memiliki dampak paling krusial terhadap daratan.²⁸

Tujuan utama dari strategi pertahanan laut, untuk menjaga kedaulatan wilayah laut dalam melindungi batas-batas wilayah maritim negara dari ancaman eksternal dan pelanggaran hukum. Strategi ini juga untuk melindungi kepentingan nasional yang menjamin keamanan sumber daya alam laut, termasuk kekayaan biota laut dan sumber daya

²⁷ Suhirwan Suhirwan, "Indonesia Sea Defense Strategy In Overcoming Maritime Threats," *International Journal of Education and Social Science Research* 4, no. 3 (Mei 2021): 205–33, https://ijessr.com/uploads2021/ijessr_04_452.pdf.

²⁸ Geoffrey Till, "Maritime Strategy in a Globalizing World," *Orbis* 51, no. 4 (1 Januari 2007): 569–75, <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2007.08.002>.

bawah laut. Pertahanan laut juga memastikan keamanan dan keselamatan bernavigasi dalam bentuk menjaga jalur perdagangan maritim yang bebas serta aman dari ancaman seperti pembajakan dan terorisme maritim. Peningkatan kekuatan angkatan laut juga merupakan bentuk pertahanan laut untuk menghadapi berbagai ancaman dan melaksanakan operasi militer yang dilakukan secara individu maupun dengan negara lainnya. Proyeksi kekuatan laut sangat penting untuk melindungi, kekuatan angkatan laut merupakan pertahanan secara tidak langsung berada di daratan pesisir dibandingkan operasi di lautan, karena sebagian besar masyarakat hidup dan industri berada di wilayah daratan pesisir merupakan wilayah krusial dapat terancam kapan, sehingga wilayah tersebut menjadi tempat ideal dalam memproyeksikan kekuatan maritim.²⁹

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

²⁹ Suhirwan, "Indonesia Sea Defense Strategy In Overcoming Maritime Threats.", 2021



Gambar 2.2: Kerangka Konseptual Strategi Pertahanan Maritim

Sumber: Christian Bueger, "What is maritime security?," 2015

Geoffrey Till, "Maritime Strategy in a Globalizing World 2007.

Suhirwan, "Indonesia Sea Defense Strategy In Overcoming Maritime Threats.", 2021.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Integrasi konsep strategi pertahanan maritim dengan konsep keamanan maritim, Meliputi Dimensi pertahanan dari dua indikator keamanan maritim, yaitu sea power dan marine safety yang berfokus pada kemampuan militer dan keselamatan maritim suatu negara. Dimensi Kemanusiaan yang berfokus pada human security untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat Jepang, terutama di daerah pesisir dan persengketaan dengan negara lain.

C. Eskalasi Aktivitas Militer

Istilah "eskalasi" pertama kali muncul pada era 1950-an di Britania dalam literatur strategis Barat. Pada awalnya, istilah ini mencakup dua makna yang berbeda, mencerminkan kompleksitas konsep tersebut dalam konteks konflik bersenjata. Makna pertama mengacu pada tindakan yang disengaja untuk meningkatkan tingkat kekerasan atau memperluas area pertikaian dalam konflik. Dalam konteks ini, eskalasi dianggap sebagai strategi tawar-menawar yang dimaksudkan untuk memaksa lawan untuk mengubah perilakunya sesuai dengan keinginan pihak yang melakukan eskalasi. Dengan kata lain, peningkatan tingkat kekerasan atau perluasan area pertikaian merupakan upaya sadar untuk mencapai tujuan tertentu dalam konflik bersenjata.³⁰

Pentingnya konsep ini terletak pada pemahaman bahwa tindakan eskalasi tersebut sering kali bertujuan untuk mempengaruhi perilaku lawan dan mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pihak yang melakukan eskalasi. Konsep eskalasi dalam makna kedua menggambarkan proses yang tidak disengaja di mana konflik menjadi semakin meluas atau intensif tanpa adanya niatan awal yang jelas untuk meningkatkan kekerasan atau memperluas pertikaian.

³⁰ Paul K. Davis dan Peter Stan, "Concepts and Models of Escalation" (RAND Corporation, 1 Januari 1984), <https://www.rand.org/pubs/reports/R3235.html>.

Dalam konteks ini, eskalasi mungkin terjadi sebagai hasil dari serangkaian peristiwa yang memicu reaksi bertahap dari pihak yang terlibat dalam konflik. Misalnya, tindakan militer yang diambil oleh satu pihak dapat memicu tanggapan yang lebih agresif dari pihak lain, yang pada gilirannya memperdalam atau memperluas konflik secara keseluruhan. Dalam konteks ini, eskalasi dianggap sebagai suatu proses yang lebih organik dan tidak terencana, yang seringkali sulit untuk dikendalikan atau diprediksi akibatnya.³¹

Penelitian tradisional mengenai eskalasi, yang sebagian besar berlandaskan pada model era Perang Dingin, tidak memadai dalam mempertimbangkan teknologi baru seperti perang siber dan drone. Kerangka kerja yang ada seringkali membandingkan teknologi baru secara individual dengan kekuatan tradisional, sehingga gagal memperhitungkan berbagai cara negara menggunakan kekuatan militer. Hal ini menghasilkan pemahaman yang terbatas dan tidak akurat mengenai dinamika eskalasi. Untuk mengatasi masalah ini, Lin-Greenberg mengusulkan kerangka kerja baru berbasis sarana yang mengevaluasi eskalasi berdasarkan kehadiran fisik dan visibilitas tindakan militer.³²

³¹ Ibid.

³² Erik Lin-Greenberg, "Evaluating Escalation: Conceptualizing Escalation in an Era of Emerging Military Technologies," *The Journal of Politics* 85, no. 3 (Juli 2023): 1151–55, <https://doi.org/10.1086/723974>.

Kerangka ini mengkategorikan tindakan militer pada tangga eskalasi, di mana tindakan yang lebih terlihat secara fisik dan hadir secara nyata dianggap lebih eskalatif. Tindakan seperti serangan darat dan pemboman dipersepsikan sebagai sangat eskalatif, sedangkan serangan siber dipandang paling tidak eskalatif. Serangan drone berada di antara kedua ekstrem tersebut. Survei asli dilakukan dengan melibatkan para ahli kebijakan luar negeri dari Amerika Serikat, India, dan Singapura untuk memeringkat berbagai tindakan militer berdasarkan potensi eskalasi yang mereka persepsikan. Hasil survei menunjukkan adanya konsistensi yang tinggi dalam persepsi eskalasi di ketiga negara, yang menunjukkan adanya pemahaman bersama mengenai tangga eskalasi. Studi ini menyoroti bahwa pandangan tradisional tentang eskalasi perlu diperbarui untuk mencerminkan kompleksitas yang diperkenalkan oleh teknologi baru. Hal ini mencakup pemahaman mengenai bagaimana berbagai sarana serangan dipersepsikan dalam hal visibilitas dan kehadiran fisik.³³

2. Argumentasi Utama

Strategi pertahanan Jepang dalam menghadapi Tiongkok di Perairan Jepang. Jepang melakukankerjasama patroli dan pengawasan perairan Jepang.,

³³ Ibid.

Melakukan Integrasi teknologi militer modern dalam pertahanan maritim, dan strategi perlindungan terhadap warga sipil dengan kemampuan evakuasi penduduk menuju daratan utama Jepang serta penggunaan teknologi militer untuk mengurangi terjadinya korban di kalangan personil SDF



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Problema Penelitian

Penelitian yang berjudul "strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi eskalasi aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang tahun 2020-2023" menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam konteks hubungan internasional, penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terkait dengan strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi eskalasi aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang. Pendekatan ini menggunakan data dan fakta yang ada untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang tujuan penelitian tersebut. Dengan mengumpulkan data yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum mengenai Strategi Pertahanan Maritim Jepang.³⁴

2. Unit dan Peringkat Analisis

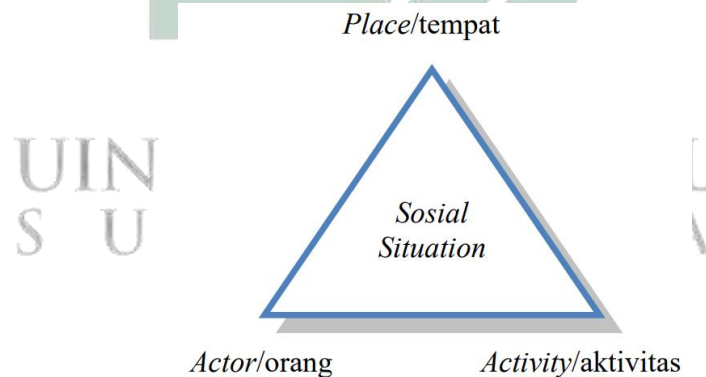
Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada negara terkait dan sumber-sumber informasi lain yang dikumpulkan untuk analisis. Penggunaan objek penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan penelitian dan membantu peneliti agar tidak terjebak dalam jumlah data yang terlalu banyak. Tingkat

³⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage, 2014).

analisis dalam penelitian ini terfokus pada tingkat negara, di mana penelitian dilakukan berfokus pada strategi pertahanan nasional suatu negara. Dengan demikian, penelitian ini akan melakukan analisis yang komprehensif dalam memahami strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi eskalasi aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang.

3. Situasi Sosial, Sampel dan Teknik Sampling

Penelitian kualitatif dilakukan pada sosial tertentu dari situasi sosial yang individu hingga ke tahap masyarakat yang kompleks. Berikut merupakan contoh gambar dan pandangan penelitian situasi sosial digambarkan sebagai berikut³⁵:



Gambar 3.1Segitiga Situasi Sosial

Sumber: Ustiawaty dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.

³⁵ Jumari Ustiawaty dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.

Sebagai aktor utama, Jepang mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman negara lain. Jepang berusaha untuk mengatasi ancaman dari Tiongkok melalui strategi pertahanan nasional di Laut Jepang. Serta mencegah adanya konflik laut internasional di Laut Jepang terutama pada provokasi Tiongkok beberapa tahun terakhir menggunakan gerakan militer melalui laut.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen terkait dengan Pertahanan Militer Jepang. Dokumen resmi seperti perjanjian, pernyataan resmi, atau kebijakan, akan menjadi sumber utama yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Selain itu, peneliti juga akan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen online yang dikaji melalui pemahaman orang dengan latar belakang dan pengetahuan tinggi dalam bidang hubungan internasional. Dokumen-dokumen online, seperti artikel, laporan, atau analisis dari ahli hubungan internasional, akan memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih luas terkait isu yang diteliti.

Menggunakan data sekunder dari studi dokumen strategi pertahanan Jepang yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan pemahaman orang hubungan

³⁶ Meira Prastini, Sirwan Yazid Bustami, dan Kinanti Rizsa Sabilla, "STRATEGI PERTAHANAN JEPANG DALAM MERESPON AGRESIVITAS MILITER TIONGKOK DI ASIA TIMUR MELALUI PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN AUSTRALIA TAHUN 2014," t.t.

internasional yang memiliki strata tinggi akan memberikan kerangka yang komprehensif dan mendalam dalam menyusun skripsi ini. Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kritis dan diintegrasikan untuk menghasilkan temuan yang solid dan memberikan wawasan yang berharga terkait dengan strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi eskalasi aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang tahun 2022-2023.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan melalui serangkaian langkah yang melibatkan persiapan data yang sudah terkumpul, lalu disajikan dengan model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data ini terdiri dari tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.³⁷

i. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada serangkaian proses yang melibatkan pemilihan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data yang terdapat dalam korpus lengkap catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dalam melakukan kondensasi, tujuannya adalah untuk memperkuat data, dengan

³⁷ Miles, Matthew B. , A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edition 3 (Los Angeles London New Delhi Singapore Washington DC: Sage, 2014).

menghindari istilah "reduksi data" karena konotasi bahwa ada kelemahan atau kehilangan informasi dalam proses tersebut. Selama pengumpulan data berlangsung, episode-episode kondensasi data terus menerus terjadi, termasuk penulisan ringkasan, pengodean, pengembangan tema, pembentukan kategori, dan penulisan memo analitis. Proses kondensasi atau transformasi data juga berlanjut setelah penelitian lapangan selesai, hingga laporan akhir diselesaikan.

ii. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data yang baik dalam penelitian kualitatif melibatkan analisis data yang tepat. Validitas data dapat dikonfirmasi melalui penggunaan matriks, jaringan, grafik, dan tabel yang relevan. Miles dan Huberman menekankan pentingnya membatasi penyajian data yang telah dikompilasi agar tidak mengarah pada kesimpulan dan tindakan yang diambil setelahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan integrasi penelitian yang baik. Dengan melakukan analisis yang cermat, peneliti dapat mengamati peristiwa yang terjadi dan pada akhirnya menyusun kesimpulan yang tepat.

iii. Verifikasi Data

Dalam penelitian, penting untuk melakukan verifikasi terhadap temuan yang telah ditemukan. Bagian dari proses verifikasi ini adalah penarikan kesimpulan yang merupakan bagian integral dari keseluruhan penelitian. Dalam konteks ini, penting untuk menguji keabsahan makna atau isi data yang telah dikumpulkan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melakukan verifikasi yang teliti, peneliti dapat memperkuat kepercayaan terhadap temuan yang telah ditemukan dan memastikan validitas kesimpulan yang dihasilkan.

6. Teknik Validasi Data

Dalam penelitian kuantitatif, untuk memperoleh data yang memiliki validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang tinggi, diperlukan penggunaan instrumen yang valid dan reliabel. Selain itu, penelitian tersebut juga perlu dilakukan pada sampel yang representatif terhadap jumlah populasi yang diteliti, serta pengumpulan dan analisis data harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Penelitian kualitatif juga merupakan bentuk penelitian yang mengikuti disiplin ilmiah yang ketat. Seperti halnya dalam penelitian pada

umumnya, setiap kegiatan penelitian kualitatif haruslah bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang memiliki relevansi signifikan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini dianggap penting atau memiliki nilai yang cukup bermakna. Selain itu, penelitian kualitatif juga harus digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih sesuai diselesaikan melalui pendekatan kualitatif, dan harus mematuhi pedoman-pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁸

i. Credibility

Kriteria ini menegaskan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Hal ini berarti bahwa hasil dari penelitian kualitatif harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pembaca yang memiliki kritik yang tinggi dan diterima oleh responden yang memberikan informasi selama proses pengumpulan data berlangsung.

ii. Transferability

Kriteria tersebut menegaskan bahwa dalam penelitian, data dan informasi yang dikumpulkan harus memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Ini mengimplikasikan bahwa hasil dari penelitian kualitatif harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pembaca yang memiliki kemampuan kritis yang matang, serta diterima oleh responden yang

³⁸ Ustiawaty dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.

telah memberikan informasi selama proses pengumpulan data berlangsung.

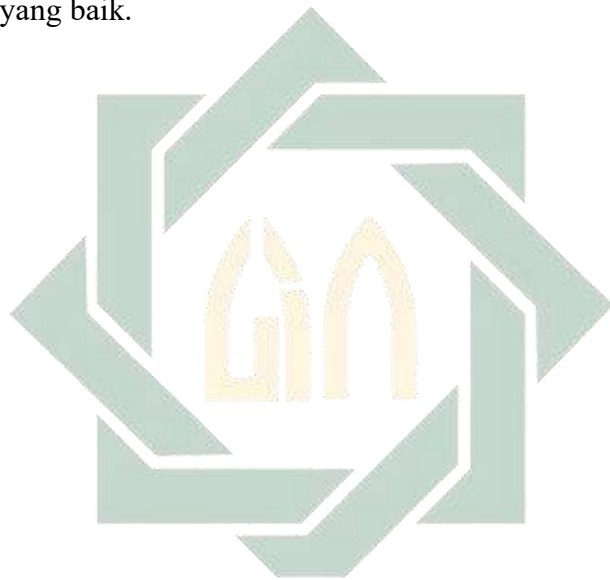
iii. Dependability

Kriteria ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai mutu dari proses penelitian kualitatif. Untuk mengevaluasi apakah hasil dari penelitian kualitatif memiliki mutu yang baik atau tidak, penting bagi seseorang untuk memeriksa apakah peneliti telah melakukan proses dengan teliti atau malah membuat kesalahan dalam beberapa tahapan, termasuk merencanakan konseptualisasi penelitian, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data atau informasi yang telah terkumpul dalam laporan penelitian yang disusun.

iv. Confirmability

Kriteria ini digunakan sebagai landasan untuk menilai mutu dari hasil penelitian. Jika "*dependability audit*" digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari proses yang dilalui oleh peneliti hingga menghasilkan hasil penelitian, maka "*confirmability audit*" dapat dilakukan secara bersamaan dengan "*dependability audit*". Namun, fokus dari "*confirmability audit*" terletak pada pertanyaan apakah data, informasi, interpretasi, dan elemen lainnya dalam laporan penelitian didukung oleh materi-materi yang terdokumentasi dalam "*audit trail*". Apabila "*confirmability audit*" menetapkan bahwa hasil penelitian telah

memenuhi keempat standar dari sebuah penelitian (*truth value, applicability, consistency, dan neutrality*), maka hasil penelitian tersebut dapat dianggap dapat diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa hasil penelitian tersebut memiliki mutu yang baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eskalasi Aktivitas Militer Tiongkok

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi eskalasi aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen, termasuk laporan resmi pemerintah Jepang, data anggaran pertahanan, serta laporan dan analisis dari lembaga internasional selama periode 2022-2023, penelitian ini menemukan bahwa Jepang telah secara signifikan meningkatkan kapabilitas militernya dalam menghadapi aktivitas militer Tiongkok di perairan sekitar Jepang.

Peningkatan aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang memberikan ancaman bagi keamanan nasional Jepang, terutama jatuhnya rudal balistik latihan militer Tiongkok di wilayah perairan Jepang tahun 2022. Menurut Greenberg pada eskalasi militer modern, bahwa pemboman di suatu wilayah negara pada tangga eskalasi, bersifat sangat eskalatif.

Tiongkok juga melakukan pelatihan militer baik secara individu maupun bersama dengan Rusia di dekat wilayah Jepang dari tahun 2022-2023. Hal ini menimbulkan ketidakamanan Wilayah Jepang, terutama perairannya. Menurut Bueger, bahwa keamanan suatu negara diukur melalui empat indikator, yaitu

kekuatan laut, keselamatan laut, keamanan manusia, dan ekonomi biru. Kasus ketidakamanan Jepang mencakup tiga indikator keamanan maritim, yaitu pada kekuatan laut Tiongkok yang mengancam Jepang yang dapat membahayakan wilayah Jepang, pada keselamatan laut perairan yang mengalami ancaman dari pelatihan militer Tiongkok yang dapat memicu insiden atau kecelekaan secara militer yang dapat meningkatkan ketegangan antar kedua negara, dan keamanan manusia penduduk Jepang di wilayah terpencil yang berdekatan dengan area abu-abu. Namun secara Ekonomi biru, Tiongkok tidak menunjukkan adanya ancaman.

Respon Jepang dalam menghadapi eskalasi aktivitas militer Tiongkok, pandangan peneliti menggunakan konsep strategi pertahanan militer, yaitu melalui dimensi pertahanan dan dimensi kemanusiaan. Pada dimensi pertahanan Jepang mengadakan patroli dan pemantauan bersama dengan negara-negara sekutu di perairan Jepang, mengintegrasikan teknologi militer modern dalam pertahanan laut, dan dimensi pertahanan melalui strategi untuk melindungi warga sipil dengan kemampuan mengevakuasi penduduk ke wilayah utama Jepang serta penggunaan teknologi militer untuk mengurangi korban di antara personil SDF. Kemampuan pertahanan adalah penjamin utama bagi keamanan Jepang. Kemampuan ini akan mencegah ancaman mencapai Jepang, dan jika ancaman tersebut sampai ke Jepang, ancaman itu akan dihentikan dan dikalahkan, sehingga menunjukkan tekad dan kemampuan Jepang untuk mempertahankan diri sampai akhir.

Ancaman muncul ketika ada kemampuan untuk menimbulkan kerugian yang digabungkan dengan niat untuk melakukannya, namun menilai niat negara lain secara akurat dari luar sangat sulit. Ketika proses pengambilan keputusan suatu negara tidak transparan, ancaman dapat muncul kapan saja. Untuk melindungi negara dari negara-negara seperti itu, diperlukan kemampuan pencegahan yang membuat pihak lain menyadari bahwa perubahan sepihak terhadap status quo dengan kekerasan adalah sulit, serta mengembangkan kemampuan pertahanan yang berfokus pada kemampuan lawan.

Mengenai kemampuan pertahanan masa depan, Jepang perlu memperkuat kemampuan pertahanannya secara mendasar sehingga dapat menanggapi cara-cara baru dalam berperang, dan dengan demikian mencegah lawan memiliki niat untuk melancarkan agresi terhadap Jepang.

Jepang juga akan membangun arsitektur pertahanan nasional secara keseluruhan dengan mengintegrasikan kekuatan nasionalnya, termasuk kemampuan diplomatik, intelijen, ekonomi, dan teknologinya, serta secara sistematis menggabungkan semua kebijakan.

Fondasi yang kokoh dalam mengatasi tantangan dan ancaman di wilayah maritim dengan tiga indikator konsep strategi pertahanan maritim, yaitu indikator kekuatan laut Jepang melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan kemampuan pertahanan maritim dan bekerjasama dalam bidang

keamanan dengan negara-negara lain, indikator keselamatan laut edukasi publik, Kementerian Pertahanan Jepang juga memberikan panduan kepada nelayan, tentang cara merespons dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi, dan indikator keamanan manusia melalui upaya untuk mempertahankan keamanan warga sipil.

Jepang merumuskan strategi keamanan nasional pada tahun 2022, pada strategi pertama mencantumkan kekuatan diplomatik sebagai salah satu elemen utama dari kekuatan nasional keseluruhan untuk keamanan kedaulatan Jepang. Pandangan Jepang dapat memberikan perlindungan bagi warga sipil ketika menghadapi situasi tidak darurat dan situasi pascaperang yang kompleks, dengan melalui langkah-langkah konkret untuk memperkuat kemampuan pertahanan secara fundamental, dan mengambil tindakan pada peningkatan anggaran untuk kebutuhan pertahanan militer hingga 2027. Jepang memanfaatkan kekuatan nasional secara komprehensif termasuk diplomasi dan kemampuan pertahanan. Hal ini diperlukan guna melindungi nyawa rakyat Jepang dan cara hidup dalam kedamaian, melalui peningkatan kemampuan pencegahan dan penanganan Jepang, serta mengurangi kemungkinan serangan bersenjata itu sendiri.³⁹

³⁹ “Written Interview with Prime Minister KISHIDA Fumio by the Lithuanian Radio and Television (LRT),” Prime Minister’s Office of Japan, diakses 22 Juni 2024, https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202307/11interview.html.

2. Dimensi Pertahanan

Jepang akan bekerja sama dengan sekutu-sekutunya, negara-negara yang berpikiran sama, dan lainnya untuk mempromosikan upaya memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan, serta menjamin keselamatan, serta mempertahankan dan mengembangkan tatanan maritim internasional berdasarkan nilai-nilai universal, termasuk aturan hukum. Jepang untuk meningkatkan pengawasan maritim, pelatihan dan latihan bilateral, serta kunjungan ke pelabuhan luar negeri, serta melakukan kegiatan an pengumpulan intelijen.⁴⁰

A. Marine Safety

Jepang secara aktif berpartisipasi dalam latihan maritim internasional untuk meningkatkan interoperabilitas dan kecakapan taktis angkatan lautnya. Latihan-latihan ini sangat penting untuk memperkuat keamanan regional dan mengatasi ancaman maritim bersama, termasuk ancaman militer Tiongkok.

i. Peningkatan Kapasitas Pemantauan dan Pengawasan Perairan

Peningkatan kapasitas pemantauan melalui teknologi canggih seperti satelit, radar, dan drone juga menjadi fokus utama Jepang. Ini

⁴⁰ “DEFENSE of JAPAN 2023” (MINISTRY of DEFENSE JAPAN, 2023), https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/wp2023/DOJ2023_EN_Full.pdf.

memungkinkan Jepang untuk mendeteksi dan menanggapi aktivitas maritim yang mencurigakan atau mengancam lebih cepat dan efisien.⁴¹

Kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh MSDF dan ASDF di sekitar Jepang. Kegiatan ini mencakup penggunaan pesawat patroli dan radar di seluruh Jepang untuk memantau dan melakukan surveilans atas wilayah Jepang dan sekitarnya. MSDF melakukan kegiatan ini secara terus menerus selama 24 jam. Selain itu, ada juga kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan di jalur-jalur utama oleh pos penjaga MSDF, unit pengawasan pantai GSDF, dan aset lainnya, juga dilakukan 24 jam.

Tujuan dari kegiatan ini untuk menjaga kewaspadaan dan respons cepat terhadap berbagai situasi yang mengancam Jepang, dengan menggunakan kapal, pesawat, dan sarana lainnya secara fleksibel sesuai kebutuhan. Informasi yang diperoleh dari kegiatan pemantauan dan pengawasan ini dibagikan dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Penjaga Pantai Jepang (JCG), untuk memperkuat koordinasi. Aktivitas kapal-kapal angkatan laut Tiongkok yang semakin aktif di perairan sekitar Kepulauan Senkaku dan Kepulauan Nansei. Dalam konteks ini, kapal-kapal Penjaga Pantai

⁴¹ Kementerian Pertahanan Jepang, "Medium Term Defense Program (FY 2019 - FY 2023)," 2018, https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2019/pdf/chuki_seibi31-35_e.pdf.

Tiongkok telah berulang kali melakukan intrusi ke perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku, serta kapal-kapal angkatan laut Tiongkok yang terdeteksi berlayar di perairan teritorial dan perairan berdekatan Jepang di sekitar Kepulauan Nansei. MOD/SDF Jepang berkomitmen untuk terus mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk kegiatan pemantauan dan pengawasan, dengan urgensi tinggi untuk melindungi perairan teritorial Jepang dari ancaman tersebut.⁴²

Jepang memperkuat kerjasama dengan negara-negara sekutunya seperti Amerika Serikat dan Australia. Salah satu contoh konkret adalah operasi Joint Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) yang dilakukan oleh Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF) bersama Angkatan Laut Amerika Serikat (U.S. Navy). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan memastikan pemantauan yang berkelanjutan di wilayah sekitar Jepang. Operasi ISR bersama ini memungkinkan ketiga negara untuk mengintegrasikan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian mereka, yang sangat penting untuk operasi gabungan. Kerjasama ini memastikan bahwa wilayah sekitar Jepang dipantau secara terus-menerus, membantu mendeteksi dan menanggapi potensi ancaman lebih cepat.

⁴² “DEFENSE of JAPAN 2023.”

Operasi ISR memperkuat hubungan pertahanan antara Jepang, Amerika Serikat, dan Australia, yang penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Ketiga negara dapat berbagi data intelijen yang kritis, meningkatkan kemampuan mereka untuk merespons ancaman maritim dan militer dengan lebih efektif.⁴³

Seiring dengan memburuknya lingkungan keamanan di sekitar Jepang, memperkuat kemampuan pengumpulan intelijen di wilayah sekitar menjadi isu mendesak. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengumpulan intelijen Aliansi Jepang-AS. Langkah ini sangat penting untuk mencegah dan menekan tindakan provokatif terhadap Jepang serta upaya mengubah status quo oleh negara-negara tetangga. Selain itu, didirikan Sel Analisis Informasi Bilateral Jepang-AS (BIAC) untuk menganalisis bersama informasi yang dikumpulkan oleh aset pengumpulan intelijen AS dan Jepang, termasuk MQ-9.

Untuk memastikan keselamatan dan ketenangan pikiran penduduk setempat, Biro Pertahanan Kyushu mendirikan Kantor Penghubung Kanoya pada Agustus 2022. Kantor ini bertugas menanggapi pertanyaan dari penduduk setempat serta berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otoritas lokal terkait penempatan sementara

⁴³ “Medium Term Defense Program (FY 2019 - FY 2023).”

MQ-9. Selain itu, sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan penduduk setempat, MOD/SDF telah merencanakan dan melaksanakan berbagai acara pertukaran dengan personel militer AS dan akan terus aktif mempromosikan acara-acara tersebut.

Program ini akan mempertahankan dan memperkuat basis produksi dan teknologi pertahanan Jepang melalui peningkatan jumlah produksi pesawat dan pengembangan generasi berikutnya dari insinyur yang sukses di kancah internasional. Kerja sama trilateral ini tidak hanya akan membentuk dasar untuk kolaborasi yang lebih luas dengan Inggris dan Italia, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan Eropa di tengah lingkungan keamanan yang semakin berat.⁴⁴

Ketiga negara dalam mencapai pengembangan bersama pesawat tempur generasi berikutnya, perlu dipertimbangkan tidak hanya aspek teknis tetapi juga politik dan institusional, termasuk hukum dan regulasi nasional serta kondisi industri masing-masing negara. Tim GCAP dari tiga negara tidak hanya berkomunikasi melalui konferensi video harian, tetapi juga saling berkunjung di Jepang, Inggris, dan Italia untuk melakukan diskusi internasional, dengan partisipasi industri

⁴⁴ Ibid.

internasional. Berpartisipasi dalam diskusi dengan individu yang memiliki latar belakang linguistik dan budaya yang berbeda, serta kunjungan ke fasilitas industri di luar negeri, telah menjadi pengalaman yang sangat membangkitkan semangat. Melalui GCAP, saya telah diberi kesempatan unik untuk berkontribusi secara internasional dalam pengembangan pesawat baru ini. Seiring dengan kemajuan kolaborasi di masa depan, hubungan lintas batas ini akan semakin diperdalam. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan keamanan, MOD juga perlu menyesuaikan pendekatannya. Program kerjasama Jepang-Inggris-Italia ini merupakan inisiatif baru dari MOD yang belum pernah ada sebelumnya. GCAP mewakili impian ribuan individu yang terlibat dalam proyek ini, termasuk pejabat administrasi, teknis, operator ASDF, dan staf industri yang terlibat dalam perancangan dan produksi pesawat.⁴⁵

ii. Free And Open Indo Pacific(FOIP)

Perdana Menteri Kishida kemudian menyatakan bahwa ia akan memperkuat upaya untuk mewujudkan "Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Menanggapi hal tersebut, Presiden Biden menyatakan

⁴⁵ "DEFENSE of JAPAN 2023."

dukungannya terhadap inisiatif Perdana Menteri Kishida dan menegaskan kembali komitmen AS yang tak tergoyahkan terhadap kawasan ini. Tatanan maritim yang bebas dan terbuka, yang bergantung pada supremasi hukum, merupakan fondasi bagi stabilitas dan kemakmuran masyarakat internasional. Kawasan Indo-Pasifik berada di pusat vitalitas dunia, dan merupakan rumah bagi lebih dari setengah populasi dunia. Penting untuk membangun kawasan ini sebagai ruang bersama global yang bebas dan terbuka untuk memastikan perdamaian dan kemakmuran seluruh kawasan. Sementara itu, terdapat berbagai tantangan untuk mewujudkan FOIP di kawasan ini, termasuk di sekitar Jepang, seperti modernisasi militer yang cepat dan kegiatan militer yang intensif.⁴⁶

Berdasarkan visi FOIP, MOD/SDF akan mempromosikan upaya seperti kunjungan pelabuhan oleh kapal angkatan laut dan pesawat terbang dalam berbagai kesempatan dengan negara-negara lain yang memiliki kesadaran yang sama akan keamanan maritim berdasarkan aturan internasional yang ada, seperti melalui pelatihan dan latihan bersama. Dengan cara ini, JMSDF akan secara aktif dan nyata menunjukkan kesediaan dan kemampuannya untuk stabilitas tatanan maritim berdasarkan aturan internasional yang ada. Selain itu,

⁴⁶ Ibid.

untuk lebih memperkuat kemampuan penangkalan bersama Jepang dan Amerika Serikat secara terintegrasi, Jepang akan mendorong kerja sama, peningkatan interoperabilitas, dll. yang terkait dengan operasi lintas domain. Dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung kemampuan tanggapan bersama yang efektif, Jepang juga akan memperkuat upaya yang terkait dengan keamanan informasi dan keamanan siber, serta kerja sama alutsista dan teknologi. Selain itu, langkah-langkah untuk mendukung penempatan Pasukan A.S. di Jepang akan terus dilaksanakan.

Jepang dalam menjalankan visi FOIP, secara strategis mempromosikan operasi keamanan multiaspek dan berlapis-lapis, Jepang akan semakin mendorong pembentukan kerangka kerja kebijakan, sekaligus mempromosikan kerja sama dan pertukaran pertahanan termasuk pelatihan dan latihan bilateral/multilateral serta kerja sama alutsista dan teknologi. Sementara dipandu oleh visi FOIP, Jepang akan lebih lanjut mempromosikan kerja sama dan pertukaran pertahanan bilateral dan multilateral. Secara khusus, dengan mempertimbangkan kebijakan kolaborasi dengan negara-negara yang berpandangan sama dan negara-negara lain yang ditunjukkan dalam NDS, selain pertukaran tingkat tinggi, dialog kebijakan, pertukaran layanan-ke-layanan, dan pertukaran personel seperti perwira

penghubung, Jepang akan menggabungkan secara tepat, tergantung pada karakteristik setiap layanan SDF, dan mengimplementasikannya secara strategis, prakarsa khusus dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan serta situasi masing-masing negara, seperti kunjungan pelabuhan strategis, pelatihan dan latihan bilateral/multilateral, kerja sama alutsista dan teknologi, pengembangan kapasitas, dan kegiatan Kerja Sama Perdamaian Internasional, untuk meningkatkan interoperabilitas di antara SDF dan angkatan bersenjata negara-negara yang berpandangan sama serta memperkuat kehadiran Jepang. Dengan Aliansi Jepang-A.S, sebagai landasannya, kebijakan Jepang adalah memperdalam kerja sama dengan negara-negara yang berpandangan sama dan lebih lanjut mempromosikan upaya untuk mewujudkan FOIP melalui prakarsa Jepang-Australia-India-A.S. (Quad), dll. Sehubungan dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, negara-negara Kepulauan Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan negara-negara Amerika Latin, kerja sama akan diperkuat untuk mewujudkan FOIP dengan memanfaatkan berbagai macam cara.

Sebagai contoh, Pertemuan Pemimpin Quad yang diadakan pada kesempatan KTT G7 Hiroshima pada bulan Mei 2023, para

pemimpin menegaskan kembali komitmen kuat mereka terhadap visi bersama FOIP.⁴⁷

MOD/SDF bekerja untuk mempertahankan penggunaan jalur laut yang stabil dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan yang disebutkan di atas dan memastikan bahwa SDF memiliki akses yang stabil ke pelabuhan dan bandara mereka. MOD/SDF juga mempromosikan kerjasama dan pertukaran pertahanan, seperti latihan bilateral/multilateral dan peningkatan kapasitas, untuk memungkinkan negara-negara ini memainkan peran yang lebih efektif demi stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat, yang merupakan sekutu Jepang, Australia, India, negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, Kanada, dan Selandia Baru, merupakan negara-negara yang tidak hanya memiliki nilai-nilai fundamental yang sama dengan Jepang tetapi juga memiliki ikatan geografis dan historis dengan kawasan Indo-Pasifik. MOD/SDF telah mendorong negara-negara ini untuk terlibat lebih banyak di kawasan Indo-Pasifik dan mempromosikan kerja sama dan pertukaran pertahanan sehingga kerja sama yang lebih efektif dapat dicapai daripada upaya sepihak oleh Jepang.⁴⁸

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

iii. Quad Summit

Jepang telah memimpin upaya revitalisasi Quad, di mana mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, yang meninggal pada Juli 2022, adalah salah satu pendukung utamanya. Dorongan Jepang untuk memperkuat Quad terutama dipengaruhi oleh kekhawatiran atas meningkatnya kekuatan, pengaruh, dan ketegasan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, serta sengketa teritorial dan sejarah konflik yang ada antara kedua negara. Jepang berusaha untuk membentuk tatanan regional yang tidak didominasi oleh dominasi ekonomi, geografis, dan strategis Tiongkok.⁴⁹

Meskipun aliansi dengan Amerika Serikat tetap menjadi fondasi keamanan Jepang, negara ini juga telah berupaya secara konsisten untuk membangun hubungan keamanan yang lebih erat dengan Australia dan India. Selama satu dekade terakhir, Jepang telah memperkuat hubungan pertahanannya dengan Australia, yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Akses Timbal Balik (*Reciprocal Access Agreement*) yang mirip dengan Perjanjian Status

⁴⁹ “Quad Joint Leaders’ Statement,” Ministry of Foreign Affairs of Japan, diakses 23 Juni 2024, https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1e_000401.html.

Pasukan (*Status of Forces Agreement*) untuk mengatur aturan dan prosedur bagi pasukan yang berkunjung. Australia menggunakan praktik dan peralatan yang serupa dengan Jepang, sehingga mempermudah kerja sama di antara kedua negara. Jepang juga telah menandatangani Perjanjian Akuisisi dan Layanan Lintas (*Acquisition and Cross-servicing Agreement*) dengan India, serta beberapa perjanjian lainnya yang mencakup perlindungan informasi militer rahasia dan transfer peralatan serta teknologi pertahanan. Latihan-latihan bilateral dengan kedua negara tersebut semakin meningkat baik dalam jumlah maupun kecanggihannya.⁵⁰

Pada akhir tahun 2022, Jepang merilis dokumen keamanan yang diperbarui, yang berpotensi mengubah pendekatan negara ini terhadap keamanan dan secara signifikan meningkatkan kemampuan pencegahannya. Selain mengembangkan kemampuan pertahanan internal, Jepang juga memperdalam hubungan pertahanannya dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan serupa di kawasan ini, khususnya yang tergabung dalam Quad.⁵¹

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

iv. Perjanjian Keamanan Jepang dan Amerikat Serikat dalam Penempatan *United States Forces of Japan* (USFJ)

Tahun 2022, Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat terkait keberadaan pasukan AS di Jepang sebagai sikap deterrence, Mengingat dampak dari penempatan Pasukan Amerika Serikat Terhadap lingkungan hidup penduduk lokal, diperlukan upaya yang sesuai dengan situasi aktual di setiap area sebagai pengurangan upaya dampak tersebut. Penyesuaian ulang pasukan AS secara khusus merupakan langkah inisiatif Jepang untuk mengurangi dampak terhadap komunitas lokal, termasuk di Okinawa dan memperkuat lebih lanjut pertahanan dan respon aliansi Jepang-Amerika Serikat. Maka dari itu, kementerian pertahanan akan melakukan penyesuaian dan langkah inisiatif lainnya serta berupaya untuk memperoleh kesepahaman dan kerjasama dengan komunitas lokal sebagai tuan rumah dari fasilitas dan area penempatan Pasukan AS.⁵²

Kondisi lingkungan keamanan di sekitar Jepang yang semakin parah, penting untuk mempertahankan keberadaan Pasukan AS dan kesiapannya untuk bertindak dengan cepat dan fleksibel dalam situasi

⁵² “DEFENSE of JAPAN 2023.”

darurat di Jepang dan sekitarnya, bahkan dalam masa damai, sehingga Aliansi Jepang-Amerika Serikat berdasarkan Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat berfungsi sebagai kekuatan penangkal yang cukup untuk kontribusi pada perdamaian dan stabilitas pertahanan Jepang dan wilayah. Jepang menerima penempatan Pasukan AS berdasarkan Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat yang merupakan batu penjuru dari Pengaturan Keamanan Jepang-Amerika Serikat. Selain itu, penting untuk mewujudkan penempatan Pasukan AS yang stabil guna memberikan respons bersama yang cepat terhadap serangan bersenjata terhadap Jepang berdasarkan Pasal 5 dari Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat. Selain Pasukan AS di Jepang (USFJ), tindakan untuk pertahanan Jepang juga dilakukan dengan penguatan yang tepat waktu. USFJ diharapkan menjadi basis untuk hal tersebut.⁵³

Meskipun Pasal 5 dari Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat menetapkan kewajiban AS untuk membela Jepang, AS diberi hak untuk menggunakan fasilitas dan area di Jepang berdasarkan Pasal 6 untuk tujuan menjaga keamanan Jepang dan perdamaian dan

⁵³ Ibid.

keamanan internasional di Timur Jauh. Oleh karena itu, meskipun kewajiban dari masing-masing pihak tidak sama, secara keseluruhan seimbang. Perjanjian Status Pasukan Jepang-Amerika Serikat (SOFA) menetapkan masalah yang berkaitan dengan fasilitas dan area USFJ serta status USFJ, termasuk penyediaan fasilitas dan area untuk digunakan oleh USFJ (fasilitas dan area USFJ), dan memenuhi persyaratan tenaga kerja USFJ. Selain itu, Perjanjian Tambahan tentang Lingkungan meningkatkan kerjasama untuk pengelolaan lingkungan terkait USFJ, dan Perjanjian Tambahan tentang Komponen Sipil mengklarifikasi cakupan komponen sipil, dan lain-lainnya.⁵⁴

Pada pertemuan "2+2" pada Januari 2023, Jepang dan Amerika Serikat memutuskan untuk mengoptimalkan postur Pasukan AS dengan memperkuat lebih lanjut postur Pasukan AS di Jepang (USFJ) agar memiliki kemampuan yang lebih serbaguna, tangguh, dan mobile, serta dengan menyesuaikan kembali Rencana Penyesuaian yang sudah disesuaikan pada tahun 2012. Secara khusus, disepakati bahwa Markas Divisi Marinir ke-3 dan Resimen Marinir ke-12 akan

⁵⁴ Ibid.

tetap berada di Okinawa, dan bahwa Resimen Marinir ke-12 akan diubah menjadi Resimen Pesisir Marinir pada tahun 2025.

Jepang dalam menyesuaikan kembali Rencana Penyesuaian, prinsip dasar Rencana Penyesuaian saat ini tetap dipertahankan, dengan pertimbangan utama untuk mengurangi dampaknya terhadap Okinawa. Secara khusus, Jepang dan Amerika Serikat telah mengkonfirmasi bahwa (1) jumlah personel Korps Marinir AS di Okinawa setelah penyesuaian akan tetap sekitar 10.000 orang; (2) penyesuaian tidak akan mempengaruhi tanah yang dijadwalkan untuk dikembalikan dalam Rencana Konsolidasi Okinawa, dan juga tidak akan mempengaruhi kemajuan dari Fasilitas Penggantian Laut (FRF) di Camp Schwab; dan (3) tidak akan ada perubahan dalam awal relokasi personel Korps Marinir dari Okinawa ke Guam, yang akan dimulai pada tahun 2024. Ditambah dengan peningkatan kemampuan dan postur SDF, inisiatif ini akan sangat meningkatkan kemampuan penangkalan dan respons dari Aliansi Jepang-Amerika Serikat. Jepang akan terus melakukan konsultasi mendalam untuk lebih mengoptimalkan postur USFJ.

v. Vanguard Pacific 2022

Pada tahun 2022, Angkatan Laut Kerajaan Australia (RAN), Angkatan Laut Kerajaan Kanada (RCN), Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF), Angkatan Laut Republik Korea (ROK), dan Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar bersama untuk melaksanakan latihan maritim Pacific Vanguard (PV) 2022 yang berakhir pada 29 Agustus di Laut Filipina. Latihan PV22 memberikan kesempatan kepada lima angkatan laut tersebut untuk meningkatkan keterampilan dalam operasi maritim, peperangan anti-kapal selam, latihan tembak langsung dengan rudal, dan pengisian bahan bakar di laut. Tahun ini, JMSDF menjadi tuan rumah latihan tersebut.⁵⁵

JMSDF mengirimkan kapal perusak helikopter JS Izumo (DDH 183), kapal perusak JS Takanami (DD 110), pesawat patroli maritim Kawasaki P-1 dan UP-3D, helikopter SH-60K Seahawk, serta sebuah kapal selam. Angkatan Laut Amerika Serikat turut serta dengan kapal perusak kelas Arleigh Burke USS Barry (DDG 52), kapal kargo dan amunisi kelas Lewis dan Clark USNS Alan Shepard (T-AKE 3), personel Korps Marinir Angkatan Laut ke-3, dan berbagai pesawat

⁵⁵ “Allied, U.S. Forces Conduct Exercise Pacific Vanguard 2022,” Commander, U.S. 7th Fleet, diakses 23 Juni 2024, <https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/3143447/allied-us-forces-conduct-exercise-pacific-vanguard-2022/http%3A%2F%2Fwww.c7f.navy.mil%2FMedia%2FNews%2FDisplay%2FArticle%2F3143447%2Fallied-us-forces-conduct-exercise-pacific-vanguard-2022>.

termasuk dukungan dari Skuadron Patroli (VP) 5 dan Skuadron Serangan Elektronik (VAQ) 209.⁵⁶

vi. Naval Exercise Malabar 2022

Latihan ini telah berkembang dalam hal cakupan dan kemitraan serta sekarang melibatkan Amerika Serikat, India, serta negara kemitraan baru seperti Jepang dan Australia. Keempat negara tersebut berpartisipasi dalam Malabar untuk meningkatkan perencanaan kolektif, integrasi, dan penerapan taktik perang canggih di antara negara-negara yang terlibat. Latihan di laut tahun ini mencakup berbagai kegiatan pelatihan taktis tingkat tinggi, integrasi kapal selam, pelatihan perang anti-kapal selam, operasi pengisian bahan bakar multinasional di laut, latihan komunikasi, skenario perencanaan perang gabungan, latihan menembak, dan operasi pencegahan maritim.⁵⁷

Kekuatan maritim dari Australia, India, Jepang, dan AS secara rutin beroperasi bersama di Indo-Pasifik, mendorong pendekatan kooperatif terhadap keamanan dan stabilitas regional. Jepang

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ U. S. Mission India, "Japan Hosts Australia, India, U.S. in Naval Exercise Malabar 2022," U.S. Embassy & Consulates in India, 14 November 2022, <https://in.usembassy.gov/japan-hosts-australia-india-u-s-in-naval-exercise-malabar-2022/>.

memimpin latihan tahun ini. Kepemimpinan dan perencanaan latihan Malabar bergilir setiap tahun di antara negara-negara peserta, serta lokasi latihan untuk menunjukkan kemampuan gabungan dalam berlatih di seluruh Pasifik Barat dan Samudra Hindia.⁵⁸

Unit JMSDF yang berpartisipasi, yaitu JS Hyuga (DDH 181), JS Shiranui (DD 120), JS Takanami (DD 115), JS Oumi (AOE 426) bersama dengan pesawat P-1. Unit permukaan Angkatan Laut India yang terlibat termasuk FFG kelas Shivalik, Korvet kelas Kamorta, pesawat P-8I, dan personel Komando Marinir (MARCOS). Peserta Angkatan Laut Kerajaan Australia (RAN) termasuk Kapal Perang Australia Arunta (FFH 151), Stalwart (A304), dan Kapal Selam Farncomb. Kelompok Tempur Kapal Induk USS Ronald Reagan sedang melakukan operasi untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Armada ke-7 Angkatan Laut AS melakukan operasi angkatan laut yang dikerahkan maju untuk mendukung kepentingan nasional AS di wilayah operasi Indo-Pasifik. Sebagai armada terbesar Angkatan Laut AS, Armada ke-7 berkolaborasi dengan 35 negara maritim lainnya untuk membangun kemitraan yang meningkatkan

⁵⁸ Ibid.

keamanan maritim, mempromosikan stabilitas, dan mencegah konflik.⁵⁹

vii. Latihan Trilateral JMSDF dengan Angkatan Laut AS dan Korea Selatan

JMSDF secara rutin mengadakan latihan trilateral dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Laut Korea Selatan. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam kesadaran domain maritim dan kepentingan keamanan bersama. Latihan ketiga angkatan laut bertujuan untuk memahami taktik, teknik, dan prosedur satu sama lain, yang sangat penting untuk operasi gabungan. Latihan trilateral ini memperkuat hubungan pertahanan di antara ketiga negara dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja sama dengan efektif dalam menghadapi situasi maritim yang kompleks.⁶⁰

Ketiga negara dapat meningkatkan kesadaran domain maritim mereka, yang penting untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ “Japan, Republic of Korea, U.S. Navies Partner in Trilateral Maritime Exercise,” Commander, U.S. 7th Fleet, diakses 31 Mei 2024, <https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/3739256/japan-republic-of-korea-us-navies-partner-in-trilateral-maritime-exercise/http%3A%2F%2Fwww.c7f.navy.mil%2FMedia%2FNews%2FDisplay%2FArticle%2F3739256%2Fjapan-republic-of-korea-us-navies-partner-in-trilateral-maritime-exercise>.

maritim dengan cepat dan efektif. Latihan ini memperkuat kemitraan strategis antara Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, yang penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik, termasuk menanggapi aktivitas militer Tiongkok.⁶¹

B. Sea Power

Jepang dalam mempertahankan wilayah maritimnya dengan meningkatkan kapasitas pertahanan maritim, terutama pada sistem pertahanan kapal. Pada Tahun 2022, Jepang dalam menghadapi ancaman rudal balistik yang diluncurkan pada lintasan tinggi atau serangan simultan dan multipel, Kementerian Pertahanan dan Pasukan Bela Diri Jepang (MOD/SDF) mengakui kebutuhan mendesak untuk memperkenalkan dua Kapal ASEV yang memiliki kemampuan BMD yang lebih unggul dibandingkan kapal perusak Aegis (DDG) saat ini. MOD/SDF juga harus memperoleh kemampuan untuk merespons Kendaraan Luncur Hipersonik (HGV), menjadikan pembangunan kemampuan BMD baru sebagai prioritas mendesak. Delapan DDG yang ada saat ini difokuskan sepenuhnya pada misi BMD, namun dengan pengenalan dua ASEV yang didedikasikan untuk misi BMD, delapan kapal DDG tersebut dapat dialihkan kembali ke peran pertahanan maritim lainnya, meningkatkan kapasitas BMD dan respons di

⁶¹ Ibid.

wilayah barat daya Jepang. ASEV akan dilengkapi dengan rudal SM-6 untuk merespons rudal balistik anti-kapal (ASBM) dan HGV pada fase terminal, serta rudal jarak jauh seperti SSM Type-12 yang Ditingkatkan, sambil tetap mempertahankan kemampuan perang dan mobilitas setara DDG. ASEV juga akan dipersiapkan untuk dilengkapi dengan interseptor HGV masa depan yang sedang dikembangkan oleh Badan Pertahanan Rudal AS, serta akan meningkatkan stabilitas laut, kenyamanan awak, dan fitur lainnya.⁶²

3. Dimensi Kemanusiaan

Undang-Undang mengenai Tindakan untuk Menjamin Perdamaian dan Keamanan Jepang dalam Situasi yang Akan Mempengaruhi Perdamaian dan Keamanan Jepang bertujuan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menanggapi situasi yang berpotensi mempengaruhi perdamaian dan keamanan Jepang secara signifikan.

Undang-undang ini meliputi langkah-langkah seperti mendukung kegiatan logistik yang berkontribusi pada situasi yang dapat mengakibatkan serangan langsung terhadap Jepang jika tidak diatasi. Undang-undang ini mengatur bahwa SDF dapat memberikan dukungan kepada pasukan bersenjata AS dan negara-

⁶² Japan Ministry of Defense, "Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2023 Budget."

negara asing lainnya yang berpartisipasi dalam aktivitas yang mendukung tujuan Traktat Keamanan Jepang-AS dan Piagam PBB, serta organisasi serupa.⁶³

A. Kemampuan Mobilitas Militer dan Evakuasi Sipil

Jepang tidak melaksanakan kegiatan dukungan di tempat di mana pertempuran sesungguhnya sedang berlangsung. Namun, terkait dengan operasi pencarian dan penyelamatan, ketika personel yang terdampar telah ditemukan dan operasi penyelamatan telah dimulai, unit SDF diizinkan untuk melanjutkan kegiatan pencarian dan penyelamatan selama keselamatan unit tersebut terjamin.⁶⁴ Operasi SDF dalam menghalau invasi di perairan Jepang, termasuk pulau-pulau terpencil, SDF memanfaatkan sebaik mungkin transportasi sipil untuk memperkuat mobilitas persenjataan dan pasukan pertahanan, melalui integrasi fasilitas bandara dan pelabuhan di wilayah barat daya Jepang untuk mempertahankan pulau-pulau kecil secara efisien menyuplai garda pertahanan depan dan melakukan evakuasi Penduduk Sipil dengan cepat. Jepang akan memperkuat kemampuan transportasinya, melalui perluasan penggunaan kapal inisiatif pembiayaan swasta (FPI), sehingga dapat meningkatkan efisiensi mobilitas SDF dan evakuasi warga sipil.⁶⁵

⁶³ "DEFENSE of JAPAN 2023."

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ "Medium Term Defense Program (FY 2019 - FY 2023)."

B. Keberlanjutan Logistik dan Fasilitas Militer

Pasokan Persenjataan, amunisi dan bahan bakar sangat penting untuk keberlanjutan pertahanan SDF di masa yang akan datang, Jepang akan meningkatkan kapasitas produksi amunisi dan memastikan penyimpanan amunisi sesuai dengan jumlah yang diproduksi, serta memastikan jumlah bahan bakar yang diperlukan cukup jika terjadi Invasi. Jepang membangun item pengoperasian seluruh peralatan militer, serta melakukan perawatan rutin persenjataan sebagai langkah ketahanan logistik pertahanan militer Jepang. Jepang juga menyamarkan dan menyembunyikan peralatan pertahanan sebagai bentuk peningkatan keberlanjutan persenjataan di situasi darurat.⁶⁶

Perluasan penggunaan bersama fasilitas dan area akan meningkatkan basis operasi Pasukan Bela Diri Jepang (SDF), termasuk area manuver, pelabuhan, dan lapangan terbang, yang memungkinkan koordinasi operasional yang lebih erat, interoperabilitas yang lebih baik, serta peningkatan fleksibilitas dan ketahanan selama kegiatan bilateral. Penggunaan bersama fasilitas dan area Pasukan Amerika Serikat di Jepang (USFJ) di Okinawa akan sangat meningkatkan lingkungan pelatihan SDF di Okinawa, memfasilitasi pelatihan dan latihan bilateral, serta meningkatkan interoperabilitas antara SDF dan Pasukan AS. Hal ini juga akan meningkatkan kesiapan dan memastikan keselamatan penduduk lokal dalam situasi bencana. Oleh karena itu, dengan

⁶⁶ Ibid.

mempertimbangkan postur pertahanan SDF di wilayah tersebut, termasuk Kepulauan Barat Daya, serta hubungan dengan komunitas lokal, Jepang dan Amerika Serikat secara aktif terlibat dalam konsultasi, dan berbagai inisiatif sedang berjalan. Sebagai contoh, Pasukan Bela Diri Darat (GSDF) telah menggunakan Camp Hansen sejak Maret 2008 untuk pelatihan. Pengembangan area latihan di Guam dan Kepulauan Mariana Utara (Pulau Tinian, Pulau Pagan, dll.) untuk penggunaan bersama oleh SDF dan Pasukan AS juga sedang dipertimbangkan. Selain itu, penyimpanan amunisi menjadi masalah penting untuk memastikan keberlanjutan perang, dan koordinasi spesifik telah dimulai untuk penggunaan bersama tambahan penyimpanan amunisi oleh SDF di dalam Area Penyimpanan Amunisi Kadena, sebuah fasilitas dan area milik USFJ.⁶⁷

C. Perlindungan Warga Sipil

Undang-Undang Perlindungan Sipil menetapkan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah lokal serta langkah-langkah untuk evakuasi, bantuan, dan tanggap darurat dalam menghadapi bencana serangan bersenjata guna melindungi nyawa, tubuh, dan properti rakyat serta meminimalkan dampak terhadap kehidupan mereka. Jika Menteri Pertahanan menganggapnya tidak dapat dihindari setelah menerima permintaan dari gubernur prefektur

⁶⁷ “DEFENSE of JAPAN 2023.”

atau permintaan dari Kepala Tim Gugus Tugas, Menteri Pertahanan dapat memerintahkan unit SDF, dengan persetujuan dari Perdana Menteri, untuk melaksanakan langkah-langkah perlindungan sipil atau tanggap darurat ,termasuk membantu evakuasi penduduk dan pemulihan segera.⁶⁸

MOD/SDF Bekerjasama dengan organisasi pelayanan masyarakat seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan penjaga pantai dalam merespon serang terorisme dan invasi skala besar. Peran organisasi-organisasi tersebut adalah memberikan dukungan bagi SDF untuk evakuasi dan memobilisasi warga sipil di situasi tidak menentu. Pelaksanaan respon dan kemampuan tersebut dapat berjalan lancar jika terbentuk dari awal sejak masa damai sebagai antisipasi SDF untuk melindungi warga Sipil.⁶⁹

Menteri Pertahanan dapat menyelamatkan warga negara Jepang yang membutuhkan perlindungan hidup atau fisik ke area aman jika diminta oleh Menteri Luar Negeri dalam keadaan darurat di negara asing. Mengingat pengalaman termasuk pengangkutan warga negara Jepang dari Afghanistan pada Agustus 2021, Undang-Undang SDF diubah pada tahun 2022; amendemen ini menghapus pembatasan tentang sarana transportasi yang sebelumnya mensyaratkan penggunaan pesawat pemerintah dan meninjau ulang persyaratan keselamatan untuk pelaksanaannya. Selain itu, cakupan

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ “Medium Term Defense Program (FY 2019 - FY 2023).”

penerimaan transportasi diperluas untuk mencakup beberapa warga negara asing yang adalah pasangan dan anak-anak warga negara Jepang, konsul jenderal kehormatan, konsul kehormatan, dan personel lokal misi diplomatik luar negeri, dan karyawan lokal lembaga administrasi independen.⁷⁰

Menteri Pertahanan juga dapat menyelamatkan warga negara Jepang dengan melindungi atau mengambil mereka kembali atas permintaan dan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri jika ada ancaman terhadap nyawa atau tubuh dan semua dari yang berikut ini dipenuhi oleh otoritas berwenang dari negara terkait saat ini sedang bekerja untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, dan tidak ada tindakan pertempuran yang dikonfirmasi akan terjadi di area di mana langkah penyelamatan diambil; negara terkait memberikan persetujuan bagi SDF untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan termasuk penggunaan senjata; dan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas yang berwenang dari negara terkait diharapkan akan dipastikan untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan sehalus dan seaman mungkin sebagai respons terhadap bahaya yang diantisipasi.⁷¹

⁷⁰ “DEFENSE of JAPAN 2023.”

⁷¹ Ibid.

D. Keselamatan dan Ketahanan Personil SDF

Jepang dalam memastikan keseharian personil SDF dan indakan preventif kemampuan operasional personil dalam dalam situasi darurat, Jepang mengumumkan pembuatan markas komando bawah tanah dengan struktur bangunan yang lebih kokoh dan merelokasi serta konsolidasikan fasilitas untuk memastikan keamanan rantai komando. Jepang juga melakukan perawaaan terhadap fasilitas-fasilitas militer tua, serta secara bertahap membangun barak dan perumahan militer baru. Jepang berupaya mengurangi risiko dan menyelamatkan kondisi kritis personel , serta merespon invasi dengan jangka watu yang panjang dan kekuatan lebih bear, Jepang memperkuat mentranformasi fungsi medis dengan pengembangan sistem medis dan tranportasi mobilitas menuju belakang garis pertahanan, sehingga dapat meningkatkan peluang kelangungan hidup bagi setiap personil SDF.⁷²

⁷² “Medium Term Defense Program (FY 2019 - FY 2023).”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konteks dinamika geopolitik global, perhatian internasional semakin terfokus pada Asia Timur, yang menyaksikan transformasi signifikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam hal peningkatan kekuatan militer. Eskalasi aktivitas militer Tiongkok, khususnya yang termanifestasi dalam klaim sepihak atas wilayah Laut Cina Selatan dan Timur, serta peningkatan gerakan militer di sekitar Kepulauan Ryukyu dan Taiwan, telah menimbulkan kekhawatiran serius, terutama di kalangan negara-negara tetangga, termasuk Jepang. Sebagai respons terhadap tantangan ini, Jepang telah mengadopsi serangkaian langkah-langkah proaktif untuk memperkuat pertahanannya, dengan penekanan khusus pada pengembangan strategi pertahanan maritim. Tindakan ini mencakup integrasi teknologi dalam kapabilitas pertahanan maritim, peningkatan kerjasama dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat, serta modernisasi infrastruktur dan sumber daya manusia SDF.

Dalam merumuskan strategi pertahanan maritim, peneliti mengacu pada kerangka konseptual yang diperkenalkan oleh Christian Bueger, Suhirwan dan Till, yang menyoroti pentingnya Dimensi pertahanan dan kemanusiaan. Pendekatan holistik ini memungkinkan Jepang untuk tidak hanya memperjuangkan kedaulatan wilayah maritimnya, tetapi juga untuk

memberikan prioritas pada keselamatan dan kesejahteraan warga sipil yang beraktivitas di laut dan pulau terpencil, terutama di wilayah persengketaan dengan Tiongkok. Sebagai tanggapan terhadap eskalasi aktivitas militer Tiongkok, Jepang juga telah meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di sekitarnya, seperti Filipina dan Vietnam. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup bantuan dalam bentuk kapal patroli dan pelatihan, tetapi juga mencakup peningkatan kemampuan pertahanan nasional Jepang melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan.

Kemitraan strategis antara Jepang dan Amerika Serikat memegang peran kunci dalam menghadapi tantangan keamanan regional ini. Dalam serangkaian pertemuan Menteri Pertahanan antara kedua negara tersebut, mereka secara bersama-sama menegaskan komitmen mereka untuk mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Melalui upaya-upaya ini, Jepang menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempertahankan keamanan wilayah maritimnya dan berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang aman dan stabil bagi perdagangan dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dengan demikian, mereka tidak hanya melindungi kepentingan nasional mereka sendiri, tetapi juga berperan dalam menciptakan perdamaian dan kemakmuran jangka panjang di kawasan Indo-Pasifik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang strategi pertahanan maritim Jepang dalam menghadapi eskalasi aktivitas militer Tiongkok di perairan Jepang tahun 2022-2023, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pertahanan Jepang. Pertama, Jepang perlu meningkatkan kerjasama internasional dengan sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat dan Australia. Melalui latihan militer bersama dan pertukaran intelijen, Jepang dapat memperkuat kapabilitas militernya dan mempertahankan keamanannya di kawasan Asia Pasifik. Kedua, Jepang harus berinvestasi lebih banyak dalam pengembangan teknologi militer, khususnya yang terkait dengan pertahanan maritim. Teknologi mutakhir seperti sistem deteksi dini, drone maritim, dan kapal perang canggih akan sangat membantu dalam menjaga keamanan perairan Jepang dari ancaman eksternal.

Selain itu, pendekatan diplomasi juga harus tetap diutamakan. Jepang perlu membuka jalur dialog dengan Tiongkok untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan pemahaman bersama guna menghindari konflik yang lebih besar. Dalam aspek militer, peningkatan kapabilitas angkatan laut sangat penting. Jepang perlu memperkuat angkatan lautnya dengan menambah jumlah kapal perang, melatih personel, dan memodernisasi armada yang ada. Di tingkat

internasional, Jepang harus mengambil peran lebih aktif di forum-forum seperti ASEAN dan PBB untuk mendapatkan dukungan dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Pasifik.



DAFTAR PUSTAKA

Al Jazeera. "Chinese Missiles Suspected of Landing in Japan's Economic Zone."

Diakses 1 Juli 2024. <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/4/chinese-missiles-suspected-of-landing-in-japans-economic-zone>.

AP News. "Japan Detects Suspected China Submarine near Southern Island," 12

September 2021. <https://apnews.com/article/china-japan-beijing-east-china-sea-bc3ed2adae679251b654fd72699f04f5>.

BBC News. "Japan's pacifism hangs in balance as China and North Korea threats

loom." 19 Mei 2023, bag. Asia. <https://www.bbc.com/news/world-asia-65643346>.

Bueger, Christian. "What is maritime security?" ScienceDirect, 2015.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X14003327?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=880ad2d0580368e3.

"China, Russia Fly 6 Bombers Near Japan Amid Quad Summit." Diakses 30 Mei 2024.

<https://thediplomat.com/2022/05/china-russia-fly-6-bombers-near-japan-amid-quad-summit/>.

Commander, U.S. 7th Fleet. "Allied, U.S. Forces Conduct Exercise Pacific Vanguard

2022." Diakses 23 Juni 2024.

[https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/3143447/allied-us-forces-conduct-exercise-pacific-vanguard-](https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/3143447/allied-us-forces-conduct-exercise-pacific-vanguard-2022/http%3A%2F%2Fwww.c7f.navy.mil%2FMedia%2FNews%2FDisplay)

[2022/http%3A%2F%2Fwww.c7f.navy.mil%2FMedia%2FNews%2FDisplay](https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/3143447/allied-us-forces-conduct-exercise-pacific-vanguard-2022/http%3A%2F%2Fwww.c7f.navy.mil%2FMedia%2FNews%2FDisplay)

%2FArticle%2F3143447%2Fallied-us-forces-conduct-exercise-pacific-vanguard-2022.

Commander, U.S. 7th Fleet. “Japan, Republic of Korea, U.S. Navies Partner in Trilateral Maritime Exercise.” Diakses 31 Mei 2024.

<https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/3739256/japan-republic-of-korea-us-navies-partner-in-trilateral-maritime-exercise/http%3A%2F%2Fwww.c7f.navy.mil%2FMedia%2FNews%2FDisplay%2FArticle%2F3739256%2Fjapan-republic-of-korea-us-navies-partner-in-trilateral-maritime-exercise>.

Davis, Paul K., dan Peter Stan. “Concepts and Models of Escalation.” RAND Corporation, 1 Januari 1984. <https://www.rand.org/pubs/reports/R3235.html>.

“DEFENSE of JAPAN 2023.” MINISTRY of DEFENSE JAPAN, 2023. https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/wp2023/DOJ2023_EN_Full.pdf.

Dugis, Vinsensio Ma. “Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Strategik.” *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 1 (22 Februari 2018): 1. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.1.2015.1-18>.

Fathun, Laode Muhamad. “PENGARUH PENINGKATAN KEKUATAN MILITER TIONGKOK TERHADAP KEAMANAN STABILITAS REGIONAL ASIA TIMUR” 2, no. 2 (2016).

Formela, Kamil, Tomasz Neumann, dan Adam Weinrit. “Overview of Definitions of Maritime Safety, Safety at Sea, Navigational Safety and Safety in General.”

TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 13 (1 Juni 2019): 285–90.
<https://doi.org/10.12716/1001.13.02.03>.

Hille, Kathrin. “China and Russia Step up Military Co-Operation on Japan’s Doorstep,” 18 Juli 2023. <https://www.ft.com/content/3a6f7efe-b064-45a7-8125-259a51df8a20>.

India, U. S. Mission. “Japan Hosts Australia, India, U.S. in Naval Exercise Malabar 2022.” U.S. Embassy & Consulates in India, 14 November 2022. <https://in.usembassy.gov/japan-hosts-australia-india-u-s-in-naval-exercise-malabar-2022/>.

Japan Ministry of Defense. “Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2023 Budget.” Ministry of Defense. Diakses 17 Januari 2024. https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_budget/pdf/230330a.pdf.

Japan, U. S. Mission. “Joint Statement of the Security Consultative Committee (2+2).” U.S. Embassy & Consulates in Japan, 11 Januari 2023. <https://jp.usembassy.gov/joint-statement-security-consultative-committee-2plus2/>.

Jauhari, M Ghazy Ramadhan. “KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TERHADAP PENINGKATAN KEHADIRAN MILITER TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK TIMUR, 2016—2019,” 2023.

jozuka, Eric Cheung, Jessie Yeung,emiko. "China Sends 47 Aircraft across Taiwan Strait in New Military 'Strike Drill.'" CNN, 26 Desember 2022.
<https://www.cnn.com/2022/12/25/asia/taiwan-china-aircraft-incursions-intl-hnk/index.html>.

Kementerian Pertahanan Jepang. "Medium Term Defense Program (FY 2019 - FY 2023)," 2018.
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11591426/www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2019/pdf/chuki_seibi31-35_e.pdf.

Lendon, Brad. "Russia and China Unite for Live-Fire Naval Exercises in Waters near Japan." CNN, 20 Desember 2022.
<https://www.cnn.com/2022/12/19/asia/russia-china-naval-exercises-intl-hnk-ml/index.html>.

Lin-Greenberg, Erik. "Evaluating Escalation: Conceptualizing Escalation in an Era of Emerging Military Technologies." *The Journal of Politics* 85, no. 3 (Juli 2023): 1151–55. <https://doi.org/10.1086/723974>.

Lumintosari, Feyza, dan Fathia Kinarya. "Kepentingan Jepang Dalam Kerja Sama Pertahanan Dan Keamanan Dengan Australia (2020-2022)." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 3, no. 1 (20 Juni 2023): 35–48.
<https://doi.org/10.31605/lino>.

Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Announcement of Joint Development of Next-Generation Fighter Aircraft by the Leaders of Japan, Italy and the United Kingdom,” 2022. https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page6e_000318.html.

Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Quad Joint Leaders’ Statement.” Diakses 23 Juni 2024. https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1e_000401.html.

NEWS, KYODO. “Chinese navy vessel enters Japan waters near Kagoshima Pref. islands.” Kyodo News+. Diakses 3 Juli 2024. <https://english.kyodonews.net/news/2023/02/219ec09fe4a0-chinese-navy-vessel-enters-japan-waters-near-kagoshima-pref-islands.html>.

Nugroho, Rendy Adityo. “Strategi Peningkatan Keamanan Taiwan Dalam Menghadapi China.” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 2, no. 1 (9 Mei 2022): 1–11. <https://doi.org/10.31605/lino>.

Prastini, Meira, Sirwan Yazid Bustami, dan Kinanti Rizsa Sabilla. “STRATEGI PERTAHANAN JEPANG DALAM MERESPON AGRESIVITAS MILITER TIONGKOK DI ASIA TIMUR MELALUI PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN AUSTRALIA TAHUN 2014,” t.t.

Prime Minister’s Office of Japan. “Written Interview with Prime Minister KISHIDA Fumio by the Lithuanian Radio and Television (LRT).” Diakses 22 Juni 2024. https://japan.kantei.go.jp/101_kishida/statement/202307/11interview.html.

Rafsanjani, Lalu Azhar, Lalu Putrawandi Karjaya, dan Khairur Rizki. “Rivalitas Amerika Serikat (AS) dan China dalam Menjadi Security Orderer di Asia

Timur.” *Indonesian Journal of Global Discourse* 2, no. 1 (21 November 2020): 27–44. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i1.6>.

Ramadhan, Alfonz Maulana, dan Akmal Tawakal. “KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SHINZO ABE TERHADAP PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG DITINJAU DARI SECURITY DILEMMA THEORY.” *GLOBAL INSIGHT JOURNAL* 8, no. 1 (17 Mei 2023). <https://doi.org/10.52447/gij.v8i1.6607>.

“STRATEGI PERTAHANAN JEPANG DI BAWAH ALIANSI JEPANG-AMERIKA SERIKAT DALAM MENGHADAPI PENINGKATAN PENGARUH TIONGKOK - CORE.” Diakses 14 Mei 2024. <https://core.ac.uk/display/89562172>.

Suhirwan, Suhirwan. “Indonesia Sea Defense Strategy In Overcoming Maritime Threats.” *International Journal of Education and Social Science Research* 4, no. 3 (Mei 2021): 205–33. https://ijessr.com/uploads2021/ijessr_04_452.pdf.

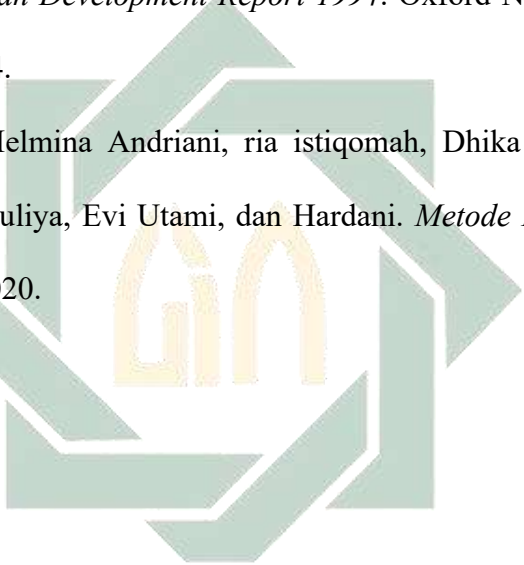
Suradinata, Ermaya. “Dinamika Pergeseran Geopolitik Ke Asia Timur.” <https://rm.id/baca-berita/kolom/192231/dinamika-pergeseran-geopolitik-ke-asia-timur>, 12 Oktober 2023. <https://rm.id/baca-berita/kolom/192231/dinamika-pergeseran-geopolitik-ke-asia-timur>.

Till, Geoffrey. “Maritime Strategy in a Globalizing World.” *Orbis* 51, no. 4 (1 Januari 2007): 569–75. <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2007.08.002>.

Uliana Sari, Annisa. “Dilema Keamanan : Urgensi Remiliterisasi Jepang Pada Rezim Shinzo Abe.” *Medium* (blog), 8 April 2023.
<https://medium.com/@ksmironfire/dilema-keamanan-urgensi-remiliterisasi-jepang-pada-rezim-shinzo-abe-469291e261cc>.

United Nations. *Human Development Report 1994*. Oxford New York, N.Y: Oxford Univ. Pr, 1994.

Ustiawaty, Jumari, Helmina Andriani, ria istiqomah, Dhika Sukmana, Roushandy Fardani, nur auliya, Evi Utami, dan Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LAMPIRAN

Lampiran Japan National Defense Strategy

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

DEFENSE BUILDUP PROGRAM

December 16, 2022

Table of Contents

I Program Guidelines	
II Major Programs Regarding SDF's Capabilities	
1 Stand-off Defense Capabilities	
2 Integrated Air and Missile Defense Capabilities	
3 Unmanned Defense Capabilities	
4 Cross-domain Operation Capabilities	
(1) Capabilities in the Space Domain	
(2) Capabilities in the Cyber Domain	
(3) Capabilities in the Electromagnetic Domain	
(4) Capabilities in the Ground, Maritime, and Air Domains	
5 Command and Control / Intelligence-related Functions	
(1) Enhancing Command and Control Functions	
(2) Enhancing Information Gathering and Analysis Functions	
(3) Responses to Integrated Information Warfare With Special Regard to the Cognitive Dimension	
6 Mobile Deployment Capabilities / Civil Protection	
7 Sustainability and Resiliency	
(1) Procurement of Various Ammunitions	
(2) Securing Fuel	
(3) Improving the Operational Availability of Defense Equipment	
(4) Facilities Improvement	
III Organization of Self-Defense Forces (SDF)	
1 Joint Operation Structure	
2 Japan Ground Self-Defense Force (GSDF)	
(1) Level of Defense Capability to Possess	
(2) Reorganization of the Major Units	
3 Japan Maritime Self-Defense Force (MSDF)	
(1) Level of Defense Capability to Possess	
(2) Reorganization of the Major Units	
4 Japan Air and Space Self-Defense Force (ASDF)	

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

- (1) Level of Defense Capability to Possess
- (2) Reorganization of the Major Units
- 5. Optimizing Organizational Capacity
- IV Strengthening the Japan-U.S. Alliance
 - 1 Strengthening Japan-U.S. Defense Cooperation
 - 2 Steady Implementation of Measures to Support Stationing of U.S. Forces in Japan
- V Collaboration with Like-minded Countries and Others
 - 1 Bilateral/Multilateral Training and Exercises
 - 2 Equipment and Technology Cooperation
 - 3 Capacity Building Assistance
- VI Elements Supporting Defense Capabilities
 - 1 Training and Exercises
 - 2 Reinforcing Collaboration and Cooperation with the Japan Coast Guard
 - 3 Collaboration with Local Communities
 - 4 Reinforcing Policy Making Functions
- VII Protection of Life, Person and Property of Japanese Nationals / Utilizing Defense Capability and Measures for Global Security Cooperation
 - 1 Measures to Large-Scale Disasters
 - 2 Efforts for Maritime Security and Use of the Airspace based on Existing International Rules
 - 3 International Peace Cooperation Activities
- VIII New Measures for Early Deployment of Defense Equipment
- IX Defense Production and Technological Base as Virtually Integral Part of a Defense Capability
 - 1 Reinforcing Defense Production Base
 - 2 Reinforcing Defense Technological Base
 - (1) Stand-Off Defense Capabilities
 - (2) Capabilities to Respond to HGVs, etc.
 - (3) Capabilities to Respond to Drones and Swarm Attacks
 - (4) Measures for Unmanned Assets
 - (5) Measures for Next-Generation Fighter Aircraft
 - (6) Reinforcing Other Deterrence and Response Capabilities
 - 3 Promoting Transfer of Defense Equipment and Technology
 - 4 Promotion of Various Measures and Institutional Development
- X Reinforcing the Foundation for SDF Personnel, to Fulfill Abilities as Core of Defense Capabilities

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

- 1 Reinforcing Human Resource Base
 - (1) Reinforcement of Recruitment Measures
 - (2) Utilization of SDF Reserve Personnel and Others
 - (3) Effective Use of Human Resources
 - (4) Improvement of Living and Working Environment, etc.
 - (5) Human Resource Development
 - (6) Improving Treatment and Reemployment
- 2 Transformation of Medical Functions
- XI Optimization Efforts
 - 1 Equipment
 - 2 Personnel
- XII Quantities of Major Procurement
- XIII Expenditures
- XIV Notes
- Appendix 1
- Appendix 2
- Appendix 3

I. Program Guidelines

In accordance with the “National Defense Strategy” (approved by the National Security Council and Cabinet on December, 16, 2022), Japan will fundamentally reinforce its “Multi-Domain Defense Force,” through the synergy of organically integrated capabilities including space, cyber, and electromagnetic domains, and is capable of sustained conduct of flexible and strategic activities during all phases from peacetime to armed contingencies, focusing on the capabilities of our opponents and new ways of warfare. By FY 2027 or by five years from now, Japan will strengthen its defense capabilities to the point at which Japan is able to take the primary responsibility for dealing with invasions against its nation, and disrupt and defeat such threats while gaining support of its ally and others. Furthermore, in approximately 10 years from now, Japan will make further efforts to better attain this defense objective and will reinforce its defense capabilities to the point at which it will be possible to disrupt and defeat invasions against its nation much earlier and at a further distance.

Given the guiding thoughts above, Ministry of Defense/Self-Defense Forces (hereinafter referred to as “MOD/SDF”) will effectively and efficiently build, maintain and operate defense capabilities based on the following program guidelines.

- 1 The functions and capabilities required for the defense of Japan are, firstly, Japan needs capabilities with which to disrupt and defeat invading forces over long distances, thereby defending invasion itself. Japan therefore will reinforce “stand-off defense capabilities” and “integrated air and missile defense capabilities”.

Secondly, should deterrence fail and invasion of Japan occur, Japan would need to ensure asymmetric advantage by leveraging, in addition to these capabilities, manned as well as unmanned assets and gain superiority across domains such as underwater, surface, and air. To this end, Japan will reinforce “unmanned defense capabilities,” “cross-domain operation capabilities,” and “command and control/intelligence related functions”.

Lastly, Japan would also need to operate in a swift as well as persistent manner so as to force the opponent to give up invasion. For this, Japan will reinforce “mobile deployment capabilities/civil protection” and

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

“sustainability and resiliency.”

Additionally, Japan will also place emphasis on the defense production and technology base, characterized as virtually integral part of a defense capability, as well as areas such as the human resource base that supports our defense capability.

- 2 In procuring equipment, by properly combining the introduction of new, high performance equipment, along with life extension and improvement of existing equipment, MOD/SDF will efficiently secure necessary and sufficient quality and quantity of defense capability. In this regard, MOD/SDF will strengthen its project management throughout its equipment life-cycle, including during its research and development activities, and reduce the life-cycle costs to improve cost-effectiveness. In addition, MOD/SDF will steadily realize acceleration of defense equipment deployment which is particularly urgent and significant from a policy perspective of the areas that could directly affect the SDF's current and future ways of warfare by incorporating advanced civilian technologies.
- 3 In the face of Japan's aging population with a declining birth rate, and with no prospect of an increase in the number of recruits, MOD/SDF will comprehensively promote various measures to reinforce human resource base such as strengthening recruitment efforts, utilizing SDF Reserve Personnel and others, promoting women's participation, raising the retirement age for uniformed SDF personnel, utilizing diverse and distinguished personnel including retired uniformed SDF personnel, improving living and working environment, developing the human resources, improving treatments, and supporting reemployment, etc.
- 4 To further reinforce the joint deterrence capabilities of Japan and the United States in an integrated manner, Japan will promote cooperation, etc. related to cross-domain operations, including space, cyber, and electromagnetic domains. In addition, in order to reinforce the infrastructure to support effective joint response capabilities in all phases, Japan will reinforce efforts related to information security and cybersecurity, as well as equipment and technology cooperation to

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

promote information sharing between Japan and the United States. In addition, measures to support the stationing of U.S. Forces in Japan will be steadily implemented.

In line with the vision of the Free and Open Indo-Pacific (FOIP), to strategically promote multifaceted and multilayered security operations, Japan will further promote establishing policy frameworks such as Reciprocal Access Agreement (RAA), Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA), General Security of (Military) Information Agreement (GSOMIA/GSOIA), and transfer of defense equipment and technology agreement, while also promoting defense cooperation and exchanges including bilateral/multilateral training and exercises, defense equipment and technology cooperation, capacity building, and interchanges among military branches.

- 5 In fundamentally reinforcing defense capabilities, Japan will, while adhering to scrap-and-build approach, optimize SDF's organization and authorized strength as well as equipment. We will also further our ongoing efforts toward more efficient procurement, which have achieved significant cost reductions. In addition, to account for Japan's aging population with a declining birth rate, Japan will robustly promote automation, labor-saving and optimization.

II Major Programs regarding SDF's Capabilities

In order for Japan to buildup defense capabilities to the point at which Japan is able to take the primary responsibility for dealing with invasions against its nation, and disrupt and defeat such threats while gaining support of its ally and others by FY 2027. Japan will place emphasis on implementing the following major programs listed from 1 to 7 in fundamentally reinforcing defense capabilities.

1 Stand-Off Defense Capabilities

In order to reinforce capabilities to conduct diverse responses from outside of the threat envelope and against vessels and landing forces invading Japan, MOD/SDF will continue development and production of the prototype of upgraded Type-12 surface-to-ship missile (develop surface-, ship-, and air-to-ship models), upgraded Hyper

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

Velocity Gliding Projectile and hypersonic missiles. MOD/SDF will extend the ranges of its various missiles, such as by upgrading Hyper Velocity Gliding Projectile and hypersonic missiles. In order to fundamentally reinforce defense capability as soon as possible, MOD/SDF will procure mass-produced rounds for the above-mentioned standoff missiles, and will also continue to steadily procure foreign-made stand-off missiles, such as U.S.-made Tomahawks.

In addition, MOD/SDF will proceed research and development for further diversifying launch platforms, and will develop and procure vertical missile launch system (VLS) that can be equipped on submarines and a system that can be equipped on transport aircraft, aiming to improve the operational capability of standoff missiles.

In order to ensure the effectiveness of stand-off defense capabilities, MOD/SDF will enhance functions of information collection and analysis as well as command and control by acquiring imagery intelligence, etc. using satellite constellations and introducing unmanned aerial vehicles (UAV) and target observation rounds, from the perspective of effective collection of target information. Since the operation of these stand-off missiles requires a series of command and control including the collection of target information and the assignment of targets to each unit to be conducted in a unified manner, a posture based on joint operation will be established. In addition, a series of functions necessary for the development and operation of stand-off missiles will be established by building additional ammunition storage facilities for storing stand-off missiles and other equipment, as well as facilities necessary for testing and maintenance, including securing facilities that can be used for live-firing.

2 Integrated Air and Missile Defense Capabilities

In order to enhance capabilities to detect and track threats such as Hypersonic Glide Vehicles (HGV), MOD/SDF will procure and upgrade ground-based warning and control radars (FPS) etc., as well as procure a future warning and control radar. In addition, MOD/SDF will improve its capability to respond to HGVs and other such weapons with interceptor missiles with upgraded capabilities (PAC-3 MSE) by upgrading the

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

surface-to-air guided missile PATRIOT system and introducing a new radar (LTAMDS).

In order to respond more effectively to various situations, MOD/SDF will begin reviewing the organization and deployment of fire units and establish a multi-layered air defense system in key areas together with mid-range ground-to-air guided missile units, and conduct unit operations for deployment from peacetime. MOD/SDF will also promote the upgrade of base air defense surface-to-air missile (SAM). In addition, research and studies will be conducted on a guided missile system which is capable of responding to HGVs and other such weapons at the glide phase.

In order to enhance the capability to respond to HGVs and other such weapons, MOD/SDF will upgrade the Type 03 medium-range surface-to-air guided missile (modified), and also procure missiles such as interceptor missiles for ballistic missile defense (SM-3 Block IIA), interceptors with upgraded capabilities (PAC-3MSE), and long-range ship-to-air missiles (SM-6).

To achieve effective and efficient response through networking, MOD/SDF will acquire a network system that enables fire control network between destroyers and other vessels (FC network) and will possess Cooperative Engagement Capability (CEC). In addition, by modifying the information coordination central (ICC) of the surface-to-air guided missile PATRIOT system, various guided missile systems will be networked together.

To strengthen Japan's air defense capabilities, MOD/SDF will procure Aegis System Equipped Vessels that will primarily conduct BMD operations.

MOD/SDF will expeditiously develop capabilities to deal with small unmanned aircraft, etc., by non-kinetic means through a combination of directed energy weapons such as high-power lasers and high-power microwaves (HPMs).

Counterstrike capabilities are SDF's capabilities that leverage stand-off defense capability and other capabilities. In cases where armed attack against Japan has occurred, and as part of that attack ballistic missiles and other means have been used, counterstrike capabilities enable Japan to mount effective counterstrikes against the opponent's territory.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

Counterstrikes are done as a minimum necessary measure for self-defense and in accordance with the Three Conditions for Use of Force. Operation of this counterstrike capability will be conducted under unified command and control based on joint operations.

3 Unmanned Defense Capabilities

In order to accomplish missions while minimizing human loss, SDF will expeditiously procure various types of unmanned assets, promoting initiatives to optimize the existing equipment system and personnel deployment. In procuring these assets, MOD/SDF will aim to secure both safety and capability to effectively carry out our mission.

To conduct seamless intelligence, surveillance, reconnaissance, and targeting (ISRT), SDF will procure long-endurance UAVs and ship-borne unmanned assets that contribute to maritime surveillance, reconnaissance UAVs that can continuously collect target information in the threat envelope of an opponent, as well as a variety of unmanned assets for ISRT. In addition, to implement rapid transport of supplies to widely dispersed deployed units, remote bases, and naval vessels, MOD/SDF will consider introducing transportation UAVs and take necessary measures.

To disrupt and defeat an invasion against Japan, MOD/SDF will procure utility/attack UAVs and miniature attack UAVs that effectively retains various attack functions to enable itself to search and identify personnel, vehicles, naval vessels from the air and quickly respond to targets.

MOD/SDF will develop and procure unmanned surface vehicles (USVs) that can be linked to naval vessels and effectively conduct various operational maneuvers. Various types of unmanned underwater vehicles (UUVs) will also be developed to gain underwater superiority.

In addition, unmanned ground vehicles (UGVs) and UAVs will be effectively combined to improve the efficiency of security and protection systems at garrisons, bases, and critical facilities. MOD/SDF will also enhance collaboration between manned and unmanned aircraft, as well as strengthen its ability to operate multiple unmanned assets simultaneously.

4 Cross-Domain Operation Capabilities

(1) Capabilities in the Space Domain

In order to improve cross-domain capabilities, including the operation of stand-off missiles, various capabilities such as information gathering and communications utilizing the space domain will be further improved. Specifically, MOD/SDF will establish satellite constellation to improve the detection and tracking of target, with enhancing Japan-U.S. cooperation and using images from commercial satellites as supplementary endeavors. In addition, MOD/SDF will conduct required technological demonstrations to improve capabilities such as detection and tracking of HGVs using satellites, considering the possibility of cooperation with the U.S. Furthermore, in order to cope with the increasing demand for satellite communications, MOD/SDF will make efforts to establish multiple layers of communication band with higher resiliency in addition to the conventional X-band communications.

In response to the space domain, SDF will further enhance capability to disrupt C4I and other capabilities of opponent. In addition, in order to enhance the capability for Space Domain Awareness (SDA), MOD/SDF will promote various efforts, including the development of SDA satellites scheduled for launch in FY2026, as well as further studies on the operation of multiple SDA satellites. Furthermore, in order to enhance the resilience of Japan's space system including satellites, MOD/SDF will promote the use of multiple positioning signals including Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) and commercial satellites, and start development and demonstration of technology related to resilience of satellite communication.

Regarding cooperation with other countries, in addition to promoting information sharing with the U.S. and other countries on SDA, MOD/SDF will strengthen cooperation such as multilateral shared use of communication waves with high resiliency.

In order to strengthen the organizational structure and human resource base for the space domain, MOD/SDF will engage with relevant organizations such as JAXA, as well as allied and like-minded countries such as the U.S. to secure necessary human resources for space, such as by establishing a framework to effectively utilize knowledge and experience on space gained among relevant ministries.

(2) Capabilities in the Cyber Domain

In line with the government-wide cybersecurity policy which will be comprehensively coordinated in a centralized manner, MOD/SDF will enhance its cybersecurity capability, while also promoting initiatives that contribute to strengthening cooperation with relevant ministries and agencies, critical infrastructure providers, and defense industry. MOD/SDF will establish a posture to secure command and control capabilities and high-priority equipment systems, to assure SDF's ability to perform its mission, and to support the cyber defense of the defense industry even under cyberattacks.

Therefore, considering the latest cyber threat situation, capability of MOD/SDF in the cyber domain will be strengthened, based on an assumption that there is no longer safe network, transitioning from the traditional idea that perimeter security is sufficient to maintain the network safety. Introducing security functions based on the "Zero Trust" concept will be considered. "Risk Management Framework (RMF)" based on a mindset that manages risks continuously, by analyzing, assessing and appropriately managing risks continuously after introduction of information systems, will be introduced. Protection posture of equipment systems and facility infrastructure systems will be strengthened. Based on an assumption that threats may have already intruded into our network, cyber threat hunting capability will be improved to detect the threats early. In addition, efforts will be made to support strengthening cybersecurity measures for defense industry, etc.

In order to strengthen the cybersecurity posture of MOD/SDF, MOD/SDF will reorganize the GSDF Signal School into the GSDF System and Signal/Cyber School to expand the educational infrastructure to train cyber personnel. Furthermore, efforts to develop capability to disrupt opponent's use of cyberspace for an attack against Japan, will be strengthened.

In order to strengthen the capability to implement these initiatives as an organization as a whole, the number of cyber personnel belonging to cyber-related units such as the SDF Cyber Defense Command will be expanded to approximately 4,000 by the end of FY

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

2027, and MOD/SDF will provide training to its personnel engaged in cyber-related tasks such as system procurement, maintenance, and operations. In addition to the increase of cyber personnel belonging to cyber-related units, these efforts will bring the total number of MOD/SDF cyber personnel to approximately 20,000 by around FY2027. Further reinforcement of cyber defense architecture is intended in the future.

(3) Capabilities in the Electromagnetic Domain

Along with reinforcing SDF's communication and radar jamming capabilities, MOD/SDF will strengthen electronic warfare capabilities by enhancing ability to detect and identify electromagnetic waves and acquiring means of deception using electromagnetic waves. In addition, MOD/SDF will expand its use of electromagnetic waves to take countermeasures against small UAVs using lasers and other means. Furthermore, MOD/SDF will reinforce electromagnetic domain management functions which reasonably manage and coordinate SDF's use of electromagnetic waves.

To this end, MOD/SDF will make the following efforts: Procurement of network electronic warfare system (NEWS) with communication and radar jamming capabilities, development of stand-off electronic warfare aircraft to jam communications and other functions from outside of their threat envelope and stand-in jammers to use various types of electronic jamming within the threat envelope; Improvement of signal detection and identification capabilities of naval vessels and fixed-wing patrol aircraft by installing radio wave detection equipment; development of anti-aircraft electronic warfare equipment to jam radar from ground. Furthermore, MOD/SDF will verify the provision of jamming capabilities to fixed-wing patrol aircraft and take measures as necessary. In addition, MOD/SDF will start operation of vehicle-mounted laser devices for responding to small UAVs and take measures for early deployment of directed energy technologies such as high-power laser systems and high-power microwaves (HPM). Along with adding the functions to monitor and manage the use of electromagnetic domain in each SDF system, MOD/SDF will work closely with the relevant ministries and agencies to ensure SDF's use

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

of spectrum necessary for its activities.

(4) Capabilities in the Ground, Maritime, and Air Domains

MOD/SDF will accelerate the acquisition of equipment, etc. and capability improvement, etc. in each of the SDF services, and strengthen capabilities in the ground, maritime, and air domains that form the basis of cross-domain operations. MOD/SDF will actively utilize advanced technology to steadily upgrade equipment, etc. in each of the SDF services, and enhance advanced operational capabilities to collaborate with unmanned assets.

5 Command-and-Control and Intelligence-related Functions

(1) Enhancing Command-and-Control Functions

In order to ensure a swift and reliable command and control, MOD/SDF will establish resilient communications, system network, and data infrastructure, establish a real-time command and control posture, conduct studies on command and control capabilities that enables unified command of each SDF service, and take measures as necessary.

To this end, MOD/SDF will develop a cloud as a common infrastructure to reinforce information sharing function for cross-domain operations; upgrade the SDF central command system to strengthen the command and control function and its connection with related ministries and agencies; procure a future command and control system to strengthen GSDF's autonomous operational capability; upgrade the command and control system to further speed up the decision-making cycle in the MSDF; upgrade Japan Aerospace Defense Ground environment (JADGE) to strengthen the resilience of the command and control function in the ASDF; and enhance the mobility and flexibility of command and control function ; procure a space operation command and control system which centrally commands and controls the operation of space-related equipment and reinforce resilience of the satellite use. Additionally, MOD/SDF will enhance the Defense Information Infrastructure (DII) necessary for sharing those information.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

(2) Enhancing Information Gathering and Analysis Functions

MOD/SDF will establish a seamless intelligence gathering and analysis scheme by persistently collecting information on military trends in the vicinity of Japan and fundamentally reinforcing our capability and posture to process, analyze, and disseminate such information, as well as establish a posture that can promptly provide information that contributes to policy decisions and SDF unit operations. In addition, MOD/SDF will examine the ideal state of information sharing with U.S. forces and joint operations for unmanned assets, and take necessary measures.

To this end, the Defense Intelligence Headquarters (DIH), which plays a central role in intelligence functions for the defense of Japan, will strengthen the capabilities of each function, such as signal, imagery, human, and open-source intelligence (SIGINT, IMINT, HUMINT, and OSINT), while expanding the training base for analysts, etc., enhancing the system for intelligence collection and analysis, including the utilization of geospatial intelligence (GEOINT), and augmenting its defense attaché system. The SDF will build a satellite constellation for acquiring target detection and tracking capabilities, which will be complemented by various initiatives such as the strengthening of cooperation with the United States and the use of commercial satellites, as well as the strengthening of information gathering capabilities from space domain using information-gathering satellites and commercial satellites. In addition, various types of UAVs, etc. that are indispensable for effective ISR implementation will be procured.

(3) Responses to Integrated Information Warfare with Special Regard to the Cognitive Dimension

In the international community, emphasis is being placed on information warfare, which is an attempt to create a favorable security environment by influencing the public opinion and decision-making of other countries through disinformation and strategic communications, etc., and minimizing the impact to one's own decision-making, even when conflict has yet to arise. MOD/SDF will establish a system and posture that ensures the capability to cope with information warfare.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

To this end, the DIH, which plays a central role in responding to integrated information warfare, will strengthen the system for information collection, analysis, and communication. In addition, the following functions will be developed: automatic collection and analysis of open-source information using artificial intelligence (AI), which will enable continuous collection and analysis of information on trends in each country; automatic collection of information on social networking sites, etc., to determine the authenticity of information communicated by each country; and future forecasting functions for estimating the security situation.

6 Mobile Deployment Capabilities / Civil Protection

In order to secure capabilities for swift and reliable transportation of necessary units to defeat the invasion of islands to the southwest region, MOD/SDF will procure various transportation assets such as transport ships (LSVs, LCUs and maneuverable boats), transport aircraft (C-2), aerial refueling/ transport aircraft (KC-46A, etc.), and transport/ utility helicopters (CH-47J/JA, UH-2). In addition, MOD/SDF will secure additional private finance initiative (PFI) vessels specialized for mass transportation of vehicles and containers to supplement the maritime transportation capability.

To enhance self-sufficiency in transportation to southwestern regions, MOD/SDF will procure transportation vehicles (container trailers) and cargo handling equipment (large cranes and large forklifts). In addition, MOD/SDF will conduct research and development of a landing support system to improve the efficiency of transportation toward islands where the size of seaports is limited. At the same time, MOD/SDF will make efforts to reduce transportation needs by stockpiling supplies in the southwestern region.

In addition, in order to enhance the effectiveness of the SDF's mobile deployment and civil protection, the government as a whole will work on measures to develop and strengthen airports and seaports, and others, particularly in the southwestern region, and take necessary measures to enable SDF to use facilities such as existing airports and seaports, as operational infrastructure. Furthermore, the government as a whole will deepen collaboration with relevant organizations

regarding the expansion of the use of civilian vessels and aircraft for SDF's maneuver and deployment, and coordinate and cooperate to systematically implement civil protection measures employing various transport assets of the SDF, in addition to civilian vessels and aircraft. In doing so, the government as a whole will strengthen civil protection training for armed attack situations as well as secure various evacuation facilities. In addition, MOD/SDF will promote various measures such as reinforcing SDF units capable of also responding to civil protection, and utilizing SDF Reserve Personnel.

7 Sustainability and Resiliency

(1) Procurement of Various Ammunitions

Procure required quantities of various ammunitions, including standoff missiles such as the Type 12 surface-to-ship guided missile, interceptor missiles for ballistic missile defense (SM-3 Block IIA), interceptor missiles with upgraded capabilities (PAC-3MSE), long-range ship-to-air missiles (SM-6), and Type 03 medium-range surface-to-air guided missile (modified) promptly. In order to mass-produce ammunitions quickly and stably, MOD/SDF will encourage the defense industry to expand its domestic manufacturing capacity. Furthermore, MOD/SDF will strengthen maintenance posture for the various ammunitions.

In addition, in order to meet the increasing storage requirements for ammunitions, MOD/SDF will promote the expansion of ammunition storage facilities and the disposal of unused ammunitions.

(2) Securing fuel, etc.

MOD/SDF will secure necessary amount of fuel for SDF operations. In addition, in order to secure fuel requirements quickly and stably, MOD/SDF will build new fuel tanks while also renting private fuel tanks. In addition, MOD/SDF will secure necessary quantities of food and clothing.

(3) Improving the Operational Availability of Defense Equipment

By securing necessary budget for maintenance and material, with lead time in consideration, while dealing with the increasingly

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

sophistication and complexity of defense equipment, MOD/SDF will eliminate the number of non-mission capable equipment caused by material shortage and maximize the number of operationally available equipment by FY 2027. To this end, the supply warehouse will be renovated to improve the precision of supply and demand forecasts and to shorten the time it takes for units to receive parts. In increasing the number of operationally available units, MOD/SDF will promote the outsourcing of maintenance and other operations to outside parties in order to make effective use of limited resources. In addition, MOD/SDF will promote the introduction of digital transformation (DX) in the logistics support field to optimize maintenance and upkeep. In addition, MOD/SDF will expand comprehensive contracts, including Performance Based Logistics (PBL) where outcomes are acquired through performance-based arrangements that will deliver SDF's requirements in maintenance.

(4) Facility Improvement

In conjunction with the acquisition of various types of ammunition, including standoff missiles, SDF will secure necessary ammunition storage facilities. In securing the ammunition storage facilities, SDF will pursue and promote efficient joint operations among the SDF services, joint use of U.S. ammunition storage facilities, and dispersed deployment to islands from the viewpoint of ensuring the resiliency of the ammunition.

In order to protect major equipment and command posts, etc., and ensure a tenacious fighting posture, MOD/SDF will establish underground basing, reinforce facilities, take electromagnetic pulse (EMP) measures for command posts, construct dispersal pads for fighter aircraft, build hardened alert shelters, and establish redundant utility infrastructures. In addition, the base security function will be strengthened while reducing the number of personnel.

In addition, MOD/SDF will develop facilities to enable efficient operation of new equipment such as unmanned assets.

When renovating existing facilities, protective measures against explosives, nuclear, biological, and chemical weapons, electromagnetic waves, and guerrilla attacks shall be provided.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

Structural reinforcement of facilities in accordance with their functions and importance, and relocation and consolidation of facilities to ensure stand-off distance shall also be implemented.

In order to prevent the functional decline of SDF facilities in the event of large-scale disaster, MOD/SDF will promote countermeasures against disasters such as tsunamis, starting from bases and camps that are expected to be damaged significantly and are important for operations. In the future, SDF will improve the resiliency of defense facilities and infrastructure in bases and camps in order to adapt and respond to various challenges associated with climate change, and to fulfill SDF's missions and roles.

MOD/SDF will smoothly execute facility improvements in a focused manner over a five-year period, while utilizing the knowledge of relevant ministries and agencies as well as private sector.

III Organization of Japan Self-Defense Forces

Based on the program guidelines, the structures of each SDF services shall be developed as described in 1 through 5.

1 Joint Operation Structure

- (1) A Permanent Joint Headquarters will be established in order to build a system capable of seamlessly conducting cross-domain operations at all stages from peacetime to contingency, with the aim of strengthening the effectiveness of joint operations among each SDF services. In this regard, in light of the rapidly increasing severity of the security environment surrounding Japan, MOD/SDF will make every effort to pursue the establishment of a Permanent Joint Headquarters as soon as possible and, upon the new establishment of the Permanent Joint Headquarters, SDF will examine how each unit, including joint units, should be structured.
- (2) For further improvement of capabilities in the cyber domain, including constant and continuous monitoring of MOD/SDF's network and systems as well as the capability to disrupt opponent's use of cyberspace for an attack against Japan, SDF will possess a cyber defense unit as a joint unit, in order to fundamentally reinforce cyber defense capability.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

- (3) In addition, a new maritime transport unit will be established as a joint unit to improve the mobile deployment capabilities to the southwestern region.

2 Japan Ground Self-Defense Force

(1) Level of Defense Capability to Possess

- (a) Regarding the basic operational units, the 15th Brigade will be reorganized into a division in order to strengthen the defense architecture in the southwestern region. The other eight divisions, five brigades, and one armored division will be operated on the basis of rapid deployment in order to deter and respond immediately to various situations effectively and rapidly. In addition, units with specialized functions such as airborne units, amphibious rapid deployment units and air rapid deployment units will be also operated on the basis of rapid deployment.

In this regard, based on a favorable training environment, one division, two brigades, and one armored division that maintain a high level of proficiency will be placed in Hokkaido on the premise that they will be deployed and transported rapidly by the integrated transport capability.

As a premise for the above measures, GSDF will thoroughly ensure optimizing organizational capacity, and will consider how to structure the posture in the mid- and long-term span.

- (b) In order to strengthen stand-off defense capabilities, surface-to-ship missile units equipped with upgraded Type 12 surface-to-ship missiles will be retained. Furthermore, units equipped with Hyper Velocity Gliding Projectile, and a long-range guided missile unit equipped with upgraded Hyper Velocity Gliding Projectile and hypersonic missiles will be newly established.
- (c) In order to protect important bases, etc. from various airborne threats, surface-to-air missile units equipped with upgraded Type 03 medium-range surface-to-air guided missiles (modified) will be retained.

(2) Reorganization of the Major Units.

- (a) In order to strengthen cross-domain capabilities, GSDF will newly

establish a new anti-aircraft, and the electronic warfare unit and reinforce the electronic warfare unit on islands. Furthermore, a new multi-purpose unmanned aerial vehicle unit that retains information gathering and attack capabilities, etc., will be established. In addition, a new unit will be established to ensure advantages in information warfare, including in the cognitive dimension, in coordination with cyber and electronic warfare.

- (b) In order to strengthen sustainability and resiliency, the logistics support system will be strengthened by establishing a new branch depot in the southwestern region, and reorganizing the Ground Material Control Command to centrally operate each logistic depot.
- (c) In order to secure the increased personnel necessary to strengthen stand-off defense capabilities, cyber capabilities, etc., MOD/SDF will abolish units mainly composed of the SDF Ready Reserve Personnel, and allocate the regular uniformed SDF personnel belonging to the units to fulfill the personnel requirements. In addition, MOD/SDF will manage SDF Ready Reserve Personnel as replacements.

3 Japan Maritime Self-Defense Force

(1) Level of Defense Capability to Possess

- (a) To conduct persistent and multilayered information gathering and surveillance in the waters around Japan in peace time, MSDF will possess surface units strengthened by the introduction of patrol vessels and other vessels so that it can persistently respond to an increasing volume of activities, such as ensuring security of maritime traffic, which is the foundation of stable economic activities, and conducting overseas deployment for security cooperation with other countries. And in a contingency, in order to secure Japan's territory and the waters around Japan and to ensure security of maritime traffic, MSDF will possess strengthened and increased destroyer units and minesweeper units, as well as strengthened patrol helicopter units to enable effective and sustained execution of various operations such as anti-

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

submarine warfare, anti-surface warfare, and anti-mine warfare. In addition, MSDF will procure Aegis System Equipped Vessels that will primarily conduct BMD operations

- (b) To conduct information gathering and surveillance in the waters around Japan continuously in peace time, and to gain and maintain underwater supremacy, a critical area for cross-domain operations, during contingency, MSDF will possess strengthened submarine units.
- (c) To conduct persistent and multi-layered information gathering and surveillance in the waters around Japan in peace time, and to conduct various operations including reconnaissance, targeting, and anti-submarine warfare in a contingency, MSDF will possess strengthened fixed-wing patrol aircraft units.

(2) Reorganization of the Major Units

- (a) To enhance the capability of responding to integrated information warfare, including the cognitive dimension, and to develop a posture to enable swift decision-making, MSDF will conduct necessary research and development. In addition, MSDF will newly establish an Information Warfare major unit to carry out comprehensive information warfare through consolidating units with intelligence, cyber, communications, meteorology and oceanography functions.
- (b) To establish a multilayered surveillance posture, to secure underwater and maritime superiority, and to reduce loss of human resources, MSDF will introduce various unmanned assets, such as UAVs, USVs including the use of existing manned vessels, and UUV, as well as newly establishing unmanned asset units.
- (c) MSDF will establish a system that can sustainably carry out unit operations that require a high level of speed and volume of activities, under the joint operation system, through reorganizing the structure of the major units and establishing new units as

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

necessary.

- (d) MSDF will improve the capability of Self-Defense Fleet Headquarters, etc. responsible for the operation of the Joint Task Force, to improve warfare sustainability. In addition, MSDF will initiate a review of logistics posture and take necessary measures to ensure the sustainability and robustness of MSDF.
- (e) Destroyers and Frigates (DDG, DD, FFM), and other vessels will be equipped with stand-off missiles, such as upgraded Type-12 surface-to-ship missile.
- (f) In addition to (e) above, to gain underwater supremacy, MSDF will develop a submarine (SS) equipped with Vertical Launching System (VLS) with the aim of acquiring stand-off missiles carrying submarines.
- (g) MSDF will decommission vessels that have been in service for a considerable amount of years and have limitations in expandability, etc., and increase the number of labor-saving frigate (FFM), etc., at an early date. In addition, in order to enable diverse operations such as distributed maneuver operations, MSDF will increase the number of air defense destroyers and improve the air defense and electronic warfare capabilities of destroyers and frigates (DDG, DD, and FFM). Furthermore, to enhance mine warfare capabilities, the number of minesweepers that control unmanned minesweeping assets will be increased, and the number of replenishment ships will be increased to strengthen logistical support capabilities on the sea. In addition, in order to respond to air attacks in a contingency, etc., the modification of destroyers ("Izumo" type) will be promoted to enable the operation of fighter aircraft (F-35B).
- (h) MSDF will procure fixed-wing patrol aircraft (P-1) with enhanced capability and patrol helicopter (SH-60K (upgraded version)), and improve the electronic warfare, anti-ship attack, and other capabilities of fixed-wing patrol aircraft.

4 Japan Air Self-Defense Force

(1) Level of Defense Capability to Possess

(a) ASDF will possess a warning and control unit equipped with a ground-based warning and control radar to conduct persistent warning and surveillance of the airspace around Japan including the vast airspace over the Pacific Ocean, as well as to detect and track new airborne threats such as HGVs in addition to ballistic missiles flying toward Japan. In addition, ASDF will possess airborne warning and control units consisting of reinforced airborne warning units to effectively monitor and control the airspace around Japan for a longer period of time in times of heightened tensions such as the so-called gray-zone situations.

(b) The ASDF will possess a greatly enhanced fighter aircraft unit in terms of both quality and quantity, where fighter aircraft and their supporting functions can work in unison to provide a comprehensive posture for Japan's air defense and other operations. In addition, to ensure fighter units can continue to fight tenaciously in various air operations of increasing intensity in the airspace around Japan, etc., ASDF will possess an enhanced aerial refueling/transportation unit and air rescue unit.

(c). ASDF will possess an enhanced air transport unit to effectively conduct mobile deployment of troops, etc. and international peace cooperation activities, etc.

(d) In addition to coordinating with the GSDF's surface-to-air missile units in conducting air defense in critical areas, ASDF will possess an enhanced fire unit to respond to increasingly diverse and complex airborne threats, with the capability to respond in the terminal phase, providing multi-layered protection to Japan from ballistic missile attacks.

(e) ASDF will possess a specialized space domain unit with enhanced SDA capabilities to ensure the stable use of space.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

(f) ASDF will possess an unmanned aircraft unit to collect information in areas relatively remote from Japan and to conduct persistent surveillance in the air when the situation becomes tense.

(2) Reorganization of the Major Units.

(a) In order to further refine and strengthen the quality and quantity of Japan's air capability, ASDF will accelerate the pace of replacement of fighter aircraft that are not suitable for modernization (F-15) with fighter aircraft (F-35A and F-35B). In addition, ASDF will continue to upgrade capabilities for modernized fighter aircraft (F-15), such as improving its electronic warfare capability, equipping stand-off missiles, and increasing the number of equipped missiles. Furthermore, with regard to fighter aircraft (F-2), from the viewpoint of strengthening stand-off defense capability, upgrade program will be promoted for a total of two squadrons for them to carry upgraded Type 12 surface-to-ship missile, etc. In addition, ASDF will conduct necessary studies by FY2027, and take necessary measures in order to further advance the quantitative enhancement of air capability. In this regard, studies on the possibility of utilizing unmanned aerial vehicles will be conducted.

(b) Joint development of the next-generation fighter aircraft with the UK and Italy will be promoted, while ensuring freedom of modification and interoperability with the allied country, so that by the end of FY 2035, when fighter aircraft (F-2) are expected to start retiring, fighter aircraft capable of securing and maintaining air superiority in the future can be delivered. In addition to the fighter aircraft itself, development of systems including unmanned aerial vehicles, etc., will be undertaken with the possibility of international collaboration in sight.

(c) Furthermore, for the sake of efficient training of pilots of cutting-edge fighter aircraft such as the F-35 and next-generation

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

fighter aircraft, ASDF will take necessary measures after studying the ideal education system, including the integration of ground training and flight training by training aircraft as one education system.

(d) In order to continue the battle tenaciously, a system for rapid development of deployment infrastructure, etc. will be established so that mobile and dispersed operations can be carried out at various locations. In addition, necessary studies will be conducted on operational concepts of air capability so that air capability can be flexibly concentrated and directed to the front of the aggression of Japan.

(e) In order to respond to high-intensity air operations and from the viewpoint of persistent combat, the aerial refueling and transport aircraft (KC-46A, etc.) will be increased in order to strengthen the aerial refueling function and rescue aircraft (UH-60J) will be replaced. In addition, in order to strengthen the air defense posture in the airspace around Japan, including the vast airspace over the Pacific, ASDF will promote the deployment of mobile warning and control radars, etc., on the islands on the Pacific side, as well as increase airborne early warning aircraft (E-2D). In order to implement rapid maneuvering deployment of ground units, etc., ASDF will procure transport aircraft (C-2).

(f) In order to improve the operational capability of stand-off missiles, ASDF will introduce unmanned aerial vehicles that can persistently collect target information inside the opponent's threat envelope, and new operational intelligence units will be established to strengthen the intelligence function necessary for the execution of the unit's mission.

(g) ASDF will continue to upgrade the capabilities of surface-to-air missile PATRIOT system and others in order to respond to increasingly diverse and complex airborne threats.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

- (h) In order to strengthen the space operation capability, development of SDA posture will be promoted steadily, and a new specialized space domain missions unit commanded by a general will be established, and the "Air Self-Defense Force" will be renamed to "Air and Space Self-Defense Force".

5 Optimizing Organizational Capacity

The number of SDF personnel in the GSDF, MSDF, and ASDF will be reviewed as necessary to optimize organizational capacity, targeting the level at the end of FY2022. In addition, the capacity necessary to strengthen the joint operation system will be transferred from each SDF, and GSDF personnel will be transferred to MSDF and ASDF, to meet the increased personnel requirements of MSDF and ASDF. To this end, approximately 2,000 GSDF personnel will be transferred to joint unit, MSDF and ASDF, respectively.

During the period of this plan, necessary measures will be taken to secure the necessary number of personnel without increasing the total number of SDF personnel.

IV Strengthening the Japan-U.S. Alliance

1 Strengthening Japan-U.S. Defense Cooperation

In order to further reinforce deterrence capabilities of Japan and the United States in an integrated manner, Japan will establish a posture to work together with the United States on a regular basis and promote cooperation with the United States in cross-domain operations including space, cyber and electromagnetic domain and measures to improve interoperability, cooperation in the use of Japan's counterstrike capabilities, air-defense, anti-surface warfare and anti-submarine warfare, mine warfare, amphibious operations, airborne operations, ISRT, protection of assets and facilities, and logistic support. In addition, Japan will improve its responsive capabilities, including the readiness and interoperability of the Alliance, through more advanced and practical exercises and training.

In order to deter unilateral changes to the status quo by force and such attempts and occurrence of various situations, Japan will further expand and deepen joint Flexible Deterrent Options (FDO) and intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR), and will on a regular basis increase

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

joint/shared use of Japanese and U.S. facilities, and promote mutual deployment of both units to their respective facilities for training or other purposes. In addition, Japan will further develop coordination functions between Japan and the United States, and will realize closer operational coordination with like-minded countries and others with the Japan-U.S. Alliance as its core.

In order to reinforce the infrastructure to support effective joint responses in all phases, Japan will reinforce measures related to information security and cybersecurity for facilitating information sharing between Japan and the United States, and will further enhance defense equipment and technology cooperation through joint analysis and joint research in cutting-edge technology, joint development and production of defense equipment, improvement in mutual interchangeability, sharing and reinforcing of various networks, expansion of production and maintenance capability of U.S. military equipment in Japan, and reinforcement of supply-chain.

2 Steady Implementation of Measures to Support the Stationing of U.S. Forces in Japan

From the perspective of not only supporting the stable presence of U.S. Forces in Japan but also strengthening deterrence and response capabilities of the Japan-U.S. Alliance, Japan will steadily secure funding for expenses related to the stationing of U.S. Forces in Japan, including Host Nation Support.

V. Collaboration with Like-minded Countries and Others

While guided by the vision of Free and Open Indo-Pacific (FOIP), Japan will further promote bilateral and multilateral defense cooperation and exchanges based on the recognition that creating a security environment that is desirable for Japan is an extremely important and essential initiative that contributes to Japan's defense itself and also relates to its basic foundations. In particular, considering the policy on collaboration with like-minded countries and others indicated in the National Defense Strategy, in addition to high-level exchanges, policy dialogues, service-to-service exchanges and personnel exchanges such as liaison officers, Japan will appropriately combine, depending on characteristics of each SDF services, and strategically implement specific initiatives taking

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

characteristics of the region as well as situation of each country into account, such as strategic port calls and air visits, bilateral/multilateral training and exercises, defense equipment and technology cooperation, capacity building, and International Peace Cooperation Activities, in order to improve interoperability among SDF and armed forces of like-minded countries and to strengthen Japan's presence.

Based on such significance of defense cooperation and exchanges, in order to further collaborate mutually and conduct specific and thoroughgoing initiatives, Japan will proceed with the improvement of operation procedures, development of organizational systems, review of institutions including treatment, and establishment of infrastructure such as hotlines between countries including secure communications, and will further reflect needs concerning defense cooperation and exchanges in SDF operations. Japan will also strive to collaborate with relevant ministries and agencies as well as with other countries, nongovernmental organizations and the private sector, and strategically disseminate information on Japan's initiatives. In doing so, Japan will particularly emphasize the following.

1 Bilateral/Multilateral Training and Exercises

Taking their significance as defense cooperation and exchanges into account, Japan will promote bilateral/multilateral training and exercises including logistics cooperation. Through this, Japan will demonstrate the intention and capability to create a desirable security environment and will also seek to improve interoperability with like-minded countries and strengthen cooperative relationships with them.

2 Equipment and Technology Cooperation

Considering that cooperation in defense equipment is an initiative that spans more than half a century from conception to retirement, Japan will strengthen initiatives for equipment and technology cooperation including overseas transfers of defense equipment and international joint development and strive to enhance our partners' military capabilities and strengthen mid- and long-term relationships with those countries. In particular, these initiatives should be combined with other efforts such as defense cooperation and exchange, training and exercises, and capacity-building to be promoted effectively. In this regard, Japan will

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

consider the transfer of equipment that has reached a considerable number of years in service and has limited expandability to like-minded countries through early decommissioning or early removal from service.

3 Capacity Building

Japan will further strengthen its efforts of capacity-building to armed forces and others of countries in the Indo-Pacific region, aiming to create a desirable security environment for Japan, while promoting the strengthening of relations with the countries to be assisted. In this regard, Japan will coordinate thoroughly with diplomatic policy, and work together with its ally and like-minded countries such as the United States and Australia, so as to maximize results. In addition to those for Southeast Asian countries, capacity-building for Pacific Island countries will be expanded

VI Elements Supporting Defense Capabilities

1 Training and Exercises

To effectively respond to various contingencies and enhance the deterrence effectiveness, MOD/SDF will conduct bilateral and multilateral training and exercises with Australia, India, and European and Southeast Asian countries in addition to SDF's joint training and exercises and Japan-U.S. bilateral training and exercises, in a planned and visible way to demonstrate Japan's intention and capability that unilateral changes to the status quo by force and such attempts will not be tolerated. In doing so, MOD/SDF will seek to enhance and strengthen training and exercises as FDO which are flexibly implemented according to the situation, as well as enhance the content of training and conduct new training utilizing favorable training environments overseas, based on the development of Reciprocal Access Agreement (RAA) and other measures.

In addition, to maximize the capabilities of SDF units in a contingency, MOD/SDF will expand the establishment and utilization of training areas and other facilities in Hokkaido and other areas in Japan, and steadily establish and enhance the necessary training infrastructure in Japan. In addition to expanding the joint/shared use of U.S. military facilities and areas by SDF and the use of civilian airport

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

and seaport facilities, MOD/SDF will enhance training for rapid deployment of its units to islands such as those in the southwestern region, joint training, and civil protection training, etc., with relevant organizations such as the police, Japan Coast Guard, firefighting services and local governments to appropriately respond to infringements that do not amount to armed attacks from outside as well as armed attacks in the vicinity of remote islands.

In order to expand such training, it is necessary to obtain the understanding and cooperation of related local governments and local residents. Therefore, while taking all possible measures to ensure the safety of training, MOD/SDF will give due consideration to the surrounding environments of training infrastructures, including training ranges in Hokkaido and other areas in Japan.

2 Reinforcing Coordination and Cooperation with the Japan Coast Guard

In order to appropriately respond to any types of contingencies, coordination and cooperation with Japan Coast Guard will be further strengthened. To this end, MOD/SDF will deepen the information sharing and coordination mechanism with Japan Coast Guard, as well as enhance various response procedures and training, including developing procedures to have the Minister of Defense control the Japan Coast Guard in an armed attack situation and conducting joint training.

3 Collaboration with Local Communities

To enable SDF and U.S. Forces in Japan to seamlessly and effectively conduct activities on a daily basis, Japan will strive to gain understanding and cooperation from local governments and residents around their facilities.

Japan will actively engage in public relations activities regarding the policies and activities of MOD/SDF and also the role of U.S. Forces in Japan on a regular basis, and coordinate to accommodate the requests and situations of the local communities, while fulfilling accountability. At the same time, Japan will continue to promote measures to improve the living environment of areas around defense facilities including those against noise the perspective of promoting cooperation to the defense of Japan.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

In addition, in light of the fact that in some regions, the very existence of SDF units contribute greatly to the maintenance and revitalization of local communities, and the transportation of emergency patients by SDF support the local medical service, MOD/SDF will give due consideration to the characteristics of the regions and the contribution to the local economy in order to gain understanding of the local governments and residents upon reorganization of units as well as placement and operation of SDF camps and bases. In addition, based on the national government's policy on contracts concerning small and medium-sized enterprises (SMEs), MOD/SDF will promote various measures that contribute to local economies, such as securing opportunities for local SMEs to receive orders, while also taking efficiency into consideration.

4 Reinforcing Policy-Making Functions

In order for SDF to fully exert its capabilities and response to the increasingly severe, complex, and rapid-paced strategic environment, strategic and agile defense policy planning and making are required including such domains as space, cyber and electromagnetic spectrum and MOD/SDF will fundamentally reinforce its functions. In this regard, MOD/SDF will establish a consultation framework to obtain policy advice from experts. Also, MOD/SDF will strengthen its posture to comprehensively advance future way of “warfare” for SDF and how to utilize and nurture cutting-edge technologies as well as apply those technology to defense necessary for this from a strategic perspective, while closely cooperating with relevant ministries and agencies, private research institutions, and private companies particularly defense industry as their core. Furthermore, in order to promote such efforts and support the formulation of policies, MOD/SDF will review and reinforce its research system led by National Institute for Defense Studies and reinforce its functions as an intellectual base.

In addition, MOD/SDF will contribute promoting security education by dispatching lecturers to educational institutions and enhancing public symposiums, etc., so that citizens can accurately recognize knowledge and information on security policy. MOD/SDF will also promote various measures to further utilize social networks, which are

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

becoming increasingly diverse, and to enhance our ability to disseminate information, including in foreign languages. In addition, in order to further strengthen the research and education functions of MOD/SDF, centering on National Institute for Defense Studies, MOD/SDF will expand networks and organizational collaboration with domestic and foreign research and education institutions, universities, think tanks, and other organizations.

VII Protection of Life, Person and Property of Japanese Nationals and Measures for International Security Cooperation

1 Response to Large-Scale Disasters

In the event of various types of disasters including natural disasters such as the Nankai Trough Earthquake, nuclear disasters, and other special disasters, MOD/SDF will take all possible measures to ensure initial response promptly by transferring and deploying units of sufficient scale, while maintaining joint operations as the basis of its operations.

At the same time, measures will be taken to strengthen the response posture, such as the procurement of UAVs(near-field), helicopter satellite communication systems (helicopter SATs), lifesaving systems, and emergency power supplies.

In addition, in close coordination and cooperation with related ministries and agencies, local governments, and the private sectors, MOD/SDF will promote various measures such as conducting various training and exercises, formulating plans, and securing alternative functions and deployment infrastructure in the event of a disaster.

Furthermore, including in areas where many nuclear power plants are located, MOD/SDF will conduct training in cooperation with related organizations, verify coordination procedures, and take necessary measures after examining such issues as securing deployment infrastructure in the vicinity of nuclear power plants.

2 Measures for Maritime Security and Use of the Airspace based on Existing International Rules

Recognizing that open and stable seas and the use of the airspace based on existing international rules are the foundation of peace and

prosperity of Japan as a maritime nation, and based on the vision of a FOIP, MOD/SDF will promote efforts such as port calls by naval vessels and aircraft on various occasions with other countries that share awareness of maritime security and the use of airspace based on existing rules such as through joint training and exercises, equipment and technologies cooperation, capacity building and information sharing. In this way, MOD/SDF will actively and visibly demonstrate our willingness and capability for the stability of the maritime order and the use of the airspace based on existing international rules.

3 International Peace Cooperation Activities

In line with the Legislation for Peace and Security, Japan will continue to promote international peace cooperation activities, while giving comprehensive consideration to such factors as purposes of mission, situation in host country, and political and economic relations between Japan and host countries. In particular, by making good use of accumulated experiences, Japan will actively promote activities such as dispatch of embedded personnel to mission headquarters, capacity building related to UN PKO such as the UN Triangular Partnership Program (TPP), and the dispatch of staff members to UN headquarters, etc., in order to contribute to the improvement of the security environment. In addition, in order to strengthen the systems concerning international activities including rescue or transportation of Japanese nationals overseas in the unstable international situation, the Central Readiness Regiment and the International Operations Training Unit will be integrated to form a new international operations force with high readiness and high technical capabilities in the field of facilities and unmanned aircraft operation, etc.

MOD/SDF will expand curriculum of the Japan Peacekeeping Training and Research Center, and given the importance of cooperation with relevant ministries and agencies, foreign countries, and non-governmental organizations, MOD/SDF will strengthen the cooperation with them through efforts such as providing educational opportunities to not only SDF personnel but also other personnel from various backgrounds.

Regarding the SDF's operation facility in Djibouti for counter-piracy

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

operations, MOD/SDF will promote renewal/upgrade to ensure its long-term and stable utilization for regional security cooperation, including the protection and transportation of Japanese nationals abroad in the Middle East and Africa.

VIII New Measures for Early Deployment of Defense Equipment

MOD/SDF will steadily realize acceleration of defense equipment deployment which is particularly urgent and significant from a policy perspective of the areas that could directly affect the SDF's current and future operations. Those areas include stand-off defense capabilities, maritime assets, soft kills, unmanned defense capabilities, AI, next-generation information and communications, space domain, DX, high-power energy and integrated information warfare. For acceleration of defense equipment deployment, MOD/SDF will receive proposals from the defense-related companies or incorporate advanced civilian technologies through start-up companies, domestic research institutes and other organizations.

To this end, MOD/SDF will establish a new framework to deploy defense equipment within the next five years and to operate it with intensive iterations of operational verification, evaluation, and improvement, in addition to flexibly reviewing administrative procedures, contracting methods and other rules of MOD/SDF that might be obstacles to this acceleration of deployment efforts, and to realize its full-scale operation within approximately the next 10 years.

IX Defense Production and Technological Base as Virtually Integral Part of a Defense Capability

1 Reinforcing Defense Production Base

While Japan's defense industry is responsible for each stage of the equipment life cycle, the equipment and defense industry are inseparable. In this context, the defense production and technological bases are virtually integral part of a defense capability.

While the defense business requires a large investment of management resources to meet advanced performance requirements and maintenance measures, companies are facing diverse issues;

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

profitability is lower than the level defined by the procurement system, the industry is currently considered as unattractive because sales channels are limited to SDF, and growth is not expected, and various risks, such as supply chain risks and cyberattacks, are apparent.

In order to address these issues, MOD/SDF will make defense industry more attractive, by adopting method to evaluate each company's quality management, cost management and delivery management for defense business to calculate company's costs and profits accurately. In addition, MOD/SDF will adopt a method of acquiring equipment that further emphasizes the viewpoint of maintaining and strengthening the domestic infrastructure while developing company's predictability for projects, such as the plan-and-proposal method. As for equipment to be procured under the Foreign Military Sales (FMS) procurement, efforts will be made to promote the participation of domestic companies, as well as to streamline and improve efficiency.

In order to cope with various risks and maintain and strengthen the defense production bases, appropriate fiscal measures and financial support will be provided for companies' initiatives such as upgrading manufacturing and other facilities, strengthening cybersecurity, making supply chains more resilient, and business succession.

MOD/SDF will conduct supply chain surveys to identify supply chain risks and promote new entrants to the supply chain to strengthen the supply chain and incorporate advanced commercial/basic technologies. Furthermore, MOD/SDF will cooperate with defense authorities of allies and like-minded countries, etc., to mutually complement supply chains. In this way, the supply chain will be strengthened to contribute to stable procurement.

Since the protection of information from intelligence activities and cyberattacks by foreign countries, or other cause, is a prerequisite for defense production and international equipment and technology cooperation, MOD/SDF will reinforce industrial security system while taking measures for steady implementation of Standards on Cybersecurity Measures for Defense Industry as well as for formulation and application of Defense Industrial Security Manual. In addition, MOD/SDF will implement sensitive technology security in conjunction

with economic security measures such as the patent application non-disclosure system.

2 Reinforcing Defense Technology Base

MOD/SDF will realize acceleration of defense equipment development through various efforts concerning R&D by identifying specific projects necessary for future warfare and organizing the entire picture up to the acquisition. Based on the integrated equipment system, which is systematically organized for future battles from the viewpoint of joint operations, MOD/SDF will intensively invest in equipment/technology fields (1)-(6) that are directly linked to future battles. Furthermore, by improving the efficiency of the R&D process, including improving the capabilities of conventional equipment, and by introducing new methods, MOD/SDF will realize shortening the time required for R&D and lead to the acceleration of defense equipment deployment.

At the same time, MOD/SDF will establish a mechanism to promptly abolish projects for research and development with low prospects for results.

In order to secure technological superiority in the future, and realize advanced capabilities ahead of other countries, MOD/SDF will pursue and implement technological cooperation, including international joint research and development and research and development that incorporates a wide range of advanced commercial/basic technologies, and at the same time will invest heavily in technologies that can be directly linked to defense applications, aiming to acquire technologies at an early stage. In doing so, MOD/SDF will promote collaboration with projects in related ministries and agencies and actively utilize the results of those projects.

Based on the above, the policy division, the operational division, and the technological division will work in unison to promote measures related to the study of future battle strategies and the utilization of advanced technologies.

From the perspective of gathering Japan's scientific and technological capabilities, MOD/SDF will strategically release the information on technological fields and research and development prospects that it

enhances predictability for companies and others. In addition, in order to fundamentally reinforce the functions to produce defense innovation and groundbreaking equipment, etc., a new research institute will be established in Acquisition, Technology and Logistics Agency (ATLA) after FY2024 through scrap-and-build, the R&D -related organizations of the agency, and the strengthening of the R&D system will be implemented. In addition, from the viewpoint of effective implementation of initiatives related to advanced technologies, MOD/SDF will strongly promote technological cooperation not only with domestic research institutes but also with allies and like-minded countries such as the United States, Australia, and the U.K.

Promote the development of equipment that anticipates equipment transfer from the development stage and review of SDF's original specifications. In developing equipment, MOD/SDF will consider cost reductions in the mass production and maintenance phases. In addition, regarding conventional technologies such as ammunition and vehicles, measures would be taken to maintain the production and technological infrastructure.

(1) Stand-Off Defense Capabilities

Japan will acquire capabilities to deal with vessels and landing forces invading Japan, including its remote islands, from locations outside of threat zones.

- a. Continue development of upgraded Type-12 surface-to-ship missile (surface-, ship-, and air-to-ship missiles), aiming to complete development of the surface- type by the end of FY2025, the ship- type by the end of FY2026, and the air-type by the end of FY2028 for the air-type.
- b. Buildup submarine-type stand-off defense capabilities that can be launched from submarines that can operate in a highly covert manner.
- c. Continue research on Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP) for island defense that fly at high altitude and high speed to hit ground targets, aiming to complete the project for the early deployment by the end of FY2025. In addition, upgraded HVGP for island defense will be developed to defeat the opposing forces invading the islands, from more distant areas

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

in the mainland, etc.

- d. Promote research on hypersonic weapons, which are difficult to be intercepted by traveling at hypersonic speeds, aiming to complete the project by FY2031, and consider the development of derivative types.
- e. Research on new anti-ship guided missile for island defense that has a longer-range, low radar cross section (RCS), and higher mobility, while having multiple functions through modularization.

(2) Capabilities to Respond to HGVs, etc.

MOD/SDF will acquire technologies to deal with Hypersonic Glide Vehicle (HGV) threats and others that are difficult to detect or intercept with existing equipment.

- a. Develop upgraded Type-03 Medium-Range SAM (modified) with capability of responding to HGV and ballistic missiles in addition to cruise missiles, etc.
- b. Conduct research and studies on guided missile systems for responding to HGV threats that travel at hypersonic speeds at high altitudes with high maneuverability.

(3) Capabilities to Respond to Drones and Swarm Attacks

MOD/SDF will aim to acquire and promptly equip technologies to economically and effectively respond to the rapidly growing airborne threat of drone swarms.

- a. Continue research on various types of high-energy lasers to intercept drones and other airborne threats.
- b. Continue research on technologies to intercept drones and other objects by radiating them with high-power microwaves (HPM).

(4) Unmanned Assets

In order to promote unmanned and labor-saving defense equipment, MOD/SDF will acquire technologies related to UUVs while reviewing existing equipment systems and personnel assignments.

- a. Conduct research on technologies such as UUV-UUV control to

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

enhance operational capabilities in the underwater domain.

- b. Conduct research on operational support technology to control multiple unmanned combat vehicles (UGVs) from a manned vehicle, autonomous driving technology, etc.
- c. Conduct research on technologies related to USVs in order to further reduce personnel and achieve unmanned waterborne vessels.

(5) Measures for Next-Generation Fighter Aircraft

- a. Steadily promote joint development of the next-generation fighter aircraft with the UK and Italy, aiming to complete development by the end of FY2035. Research and development will also be promoted for a combat support unmanned aircraft to be collaborating with manned aircraft such as the next-generation fighter aircraft.
- b. In conducting research and development of these technologies, Japan-led development will be realized by ensuring freedom of modification for timely and appropriate upgrade in the future and domestic production and technological bases for high readiness, etc. on the premise that the aircraft maintains the capability to effectively counter numerically superior opponents.

(6) Reinforcing Other Deterrence and Response Capabilities

- a. Continue research on future railguns to improve the capability of intercepting various airborne threats.
- b. Conduct research on technology of jamming device that misleads radar and other radio wave equipment into believing that multiple threats exist by giving false information.
- c. Conduct research to reflect the technology to support commanders' decision-making into equipment by analyzing the course of action using AI to cope with the complex and fast changing combat situations.
- d. Research and develop the next generation signal intelligence aircraft, which will be the successor to the multipurpose aircraft (EP-3), with improved target information collection capability, etc.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

- e Develop new small mines that are compact and can be controlled remotely in order to lay mines quickly from naval vessels on alert watch, etc.
- f. Begin research and development of hypersonic surface-to-air guided missiles utilizing the results of elemental research on hypersonic guided missiles.

3 Promotion of Defense Equipment Transfer

Transfer of defense equipment and technology overseas is not only a strategic tool of foreign and defense policy to build effective partnerships with allied and like-minded countries and to deter unilateral changes to the status quo by force or invasion of Japan, but also effective in ensuring the growth of the defense industry through the expansion of defense equipment market. From this perspective, the government will take the lead in promoting appropriate overseas transfer of defense equipment and technology by further cooperation between the public and private sectors. The government will also establish a fund and provide corporate assistance as necessary.

4 Promotion of Various Measures and Institutional Development

In order to implement the above policies, necessary budgetary measures, etc., as well as necessary legislation and financing of projects with a high policy nature through the use of government financial institutions, etc., will be provided, and the status of their execution will be constantly verified and the system will be revised as necessary.

X Strengthening the Foundation for SDF Personnel to Fulfill Abilities as Core of Defense Capabilities

1 Reinforcing Human Resource Base

In order to fundamentally reinforce defense capabilities, MOD/SDF will reinforce the human resource base by securing necessary uniformed SDF personnel and civilian officials and others, and by conducting study of necessary systems, while paying attention to the facts that individual SDF personnel are required to have more knowledge, skills, and experience than ever before and that MOD/SDF needs to develop SDF personnel who have a background to reliably deal with cross-

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

domain operations, information warfare, and others. In this regard SDF personnel who work on research and development will be secured and their knowledge and skills will be developed. In addition, MOD/SDF will reinforce its education, especially focusing on domains such as cyber, and utilize civilian workforce in these domains. To this end, an environment will be created in which all SDF personnel can demonstrate their abilities even as they face life events such as childcare, childbirth, and nursing care, and MOD/SDF will take comprehensive measures focusing on the entire life cycle starting from recruitment, including reskilling of SDF personnel.

(1) Enhancing Recruitment Efforts

In order to stably secure excellent human resources in the severe recruiting environment with a declining number of people eligible for recruitment due to a declining birthrate, MOD/SDF will promote various recruiting measures such as digitalization of recruitment PR, and strengthen the functions of the Provincial Cooperation Offices and the cooperation with local governments and related organizations.

In addition, from the viewpoint of improving the attractiveness of fixed-term SDF personnel, MOD/SDF will review the system of Candidates for SDF personnel and improve support for the re-employment and learning at universities, etc., after the completion of their term of service. Furthermore, in light of the declining birthrate and higher education level, measures to expand the recruitment of untenured officers and to broaden the recruitment base to include college graduates, etc., should be promoted. At the same time, MOD/SDF will secure high-quality human resources at an early stage through the expansion of the SDF scholarship student system.

Furthermore, in order to incorporate human resources with specialized knowledge and skills who are expected to be active in fields such as cyber and space domains, a new SDF personnel system will be established to enable flexible recruitment and appointment, and necessary measures will be taken to utilize human resources from the private sector, including retired SDF personnel.

(2) Utilization of SDF Reserve Personnel and Others.

In order for SDF Reserve Personnel and others to effectively supplement regular SDF personnel in the changing operational environment and diversifying missions of SDF, MOD/SDF will not only improve their sufficiency rates but also fundamentally review and reinforce the system of SDF Reserve Personnel and others. To this end, after reviewing the roles of SDF Ready Reserve Personnel and SDF Reserve Personnel, MOD/SDF will expand the recruitment of them from civilians with no experience in the SDF and review the current system in light of their age limits and training periods, and other issues.

(3) Effective Use of Human Resources

MOD/SDF continues to actively recruit female SDF personnel and appoint them according to their motivation, ability, and aptitude, as well as develop an educational infrastructure that supports their activities, and systematically develop women's quarters in the military barracks and naval vessels with an eye to increasing the number of female SDF personnel.

In addition, in order to further utilize human resources with abundant knowledge, skills, and experience, the retirement age for SDF personnel will be raised while paying attention to their military strength, and the duties in which re-enrolled SDF personnel can be engaged in will be greatly expanded.

Curbing mid-career retirements is an urgent issue, therefore a survey on SDF personnel's attitude towards mid-career retirement will be conducted in order to contribute to the consideration of effective measures to curb mid-career retirement. Taking into consideration the special nature of the missions and service environment, MOD/SDF will constantly review and implement necessary measures.

(4) Improvement of Living and Working Environment, etc,

Recognizing that there is no place for harassment which ruins the mutual trust among SDF personnel and shakes the very foundation

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

of the entire organization, MOD/SDF will establish new measures based on the findings of the expert panel and other reviews on harassment prevention, and ensure that all SDF personnel are fully aware of them. In addition, MOD/SDF will develop an organizational environment of zero tolerance for harassment with continuous review of the measures taken to ensure that they are in line with the times.

In addition, MOD/SDF will steadily develop housing necessary for introducing and reorganizing units as well as ensuring readiness. MOD/SDF will also systematically take measures against aging and earthquake of barracks and housing, including modernization and preventive maintenance. Furthermore, the living and working environment for personnel will be improved by ensuring the required number of living and working equipment, replacing aging equipment, and ensuring the required number of daily consumables. In doing so, Japan will place consideration on creating a comfortable working environment even in special environments such as naval vessels. Through these measures, MOD/SDF will aim to improve the morale of SDF personnel.

In addition to promoting efforts to ensure work-life balance, including the development and dissemination of systems that support a good balance between family and work, MOD/SDF will promote measures such as the development of childcare facilities and temporary childcare for children during emergency visits for the office based on the needs of SDF personnel. In addition, MOD/SDF will expand measures to support families in cooperation with local governments and related organizations.

(5) Human Resource Development

In order to secure human resources who can contribute to more advanced cross-domain joint operations, MOD/SDF will strengthen the education on joint operations in the educational institutions such as the Joint Staff College and staff colleges of each service. Each SDF service, National Defense Academy, and National Institute for Defense Studies will strengthen their education and research contents and architecture for cyber domain and others for securing

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

and providing skilled human resources who can become the core of SDF units. In addition, MOD/SDF will transform the Japan Ground Self-Defense Force High Technical School into a combined school of each service, as well as a coeducational school by accepting female students.

In addition, in order to further promote mutual complementation between each service of the SDF, MOD/SDF will integrate their educational programs and promote effective and efficient education and research by utilizing state-of-the-art technologies.

Furthermore, the 1st and 2nd Service Schools of the Maritime Self-Defense Force will be integrated in order to implement unified education and improve educational effects, and the T-7/T-4 successor aircraft and related systems will be upgraded to optimize the flight education and training environment for the so-called 5th generation fighter pilot training.

(6) Improving Treatment and Reemployment

Through conducting a survey of SDF personnel's overtime work, etc., MOD/SDF will make salaries and allowances based on the special nature of their missions and work environment, and continue to give due treatment to personnel engaged in harsh missions, especially on naval vessels and radar sites. In addition, treatment will be improved given the fact that missions are increasing such as the counterstrike capability. MOD/SDF will conduct research on the salary systems of military personnel in other countries, and consider how SDF personnel should be paid in the future. MOD/SDF will promote measures concerning honors and privileges for those well-deserved for achievements through many years of diligent services for their duties as SDF personnel.

In addition, given that it is the responsibility of the government to secure the livelihood of uniformed SDF personnel after retirement under the early retirement system or fixed-term service system, MOD/SDF will further improve and strengthen reemployment support by enhancing the career guidance and job training opportunities for SDF personnel scheduled for retirement, and by strengthening cooperation with local governments, relevant

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

organizations, and private companies, etc.

2 Transformation of Medical Functions

In order to cope with various situations and respond to diverse missions in Japan and abroad, MOD/SDF will promote integrated medical operations by unifying medical functions common to all SDF units, build a posture that can mobilize the full strength of SDF's medical force, including the National Defense Medical College, and promote fundamental reforms to improve the combat trauma care capabilities.

In order to save the lives of personnel who are performing their duties in a contingency without regard for danger, it is necessary to establish a seamless medical care and evacuation posture from the front line to the destination hospital. For this purpose, it is necessary to strengthen the respective medical functions first aid at the front line, medical evacuation by utilizing various assets of each service to transport wounded personnel to the destination hospital, and the SDF hospitals.

First, for the first aid at the front line, MOD/SDF will increase the number of frontline combat medics certified as assistant nurse and paramedic, and further strengthen the foundation for education and training. In addition, a new joint training course for damage control surgery following first aid at the frontline will be established to systematically train personnel. Furthermore, MOD/SDF plans to provide necessary education and training regarding surgical operations on board naval vessels for those who have completed the above course in order to strengthen onboard medical care capability.

For aero medical evacuation, new training equipment will be introduced, and an education and training environment will be established to improve first-aid capabilities during transport of wounded and sick. In implementing these education and training programs, MOD/SDF will standardize, integrate and improve common knowledge and skills among each force.

MOD/SDF considers enhancing the functions and survivability of the SDF Naha Hospital is an effective measure in strengthening medical capacity in the southwestern region. MOD/SDF will take measures for SDF Naha Hospital such as increasing the number of beds, adding

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

medical departments, and building underground facilities. Other SDF hospitals that can be a destination will be strengthened similarly when they are reconstructed.

Since most of medical functions are common to all SDF units, MOD/SDF will promote standardizing medical equipment and materials in consideration of interoperability between each SDF service. In addition, in order to enable Self-Defense Forces hospitals and other facilities to obtain the medical information of each SDF member in a timely manner without distinction between the SDF services, the medical record of each member would be digitized, and a system would be established to enable prompt retrieval and viewing of medical record for each member.

Most deaths in war are due to exsanguination from bomb wounds, gunshot wounds, and other similar causes. To prevent such deaths, it is extremely important to secure blood products for transfusion, and MOD/SDF would consider establishing a system to autonomously secure and stockpile blood products. In addition, in order to secure medical oxygen, which is as important as blood products in war wound care, MOD/SDF will also acquire oxygen concentrators and other relative equipment.

In addition, MOD/SDF will strengthen education and research, including combat trauma care capabilities improvement, at the National Defense Medical College in light of modern medical technology evolution. The National Defense Medical College Hospital, which is the clinical site, is to be strengthened to accommodate the acceptance of those wounded in war, in addition to advanced medical education for medical and nursing officers and skill improvement for the medical personnel of SDF. In order to accommodate the acceptance of those wounded in war, the hospital will undergo a drastic reform of its operation, and its functions will be strengthened by utilizing opportunities such as the reconstruction of the hospital. As a complement to these efforts, efforts will also be made to ensure that medical and nursing officers receive training outside the department.

XI. Optimization Efforts

1 Equipment

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

For GSDF, in order to optimize the air structure, the air units of divisions and brigades will be abolished with some exceptions, and helicopter functions will be concentrated in each district unit, while the functions of anti-tank and combat helicopters (AH) and observation helicopters (OH) will be transferred to UAVs and UAVs for utility/attack and surveillance, etc. The functions of AHs and OHs will be transferred to UAVs and UAVs for reconnaissance and other purposes. In doing so, the minimum functions necessary will be maintained by arming existing helicopters, etc.

For MSDF, the number of fixed-wing patrol aircraft (P-1) acquisitions will be partially reviewed in conjunction with the acquisition of a dwell UAV to enhance offshore surveillance capabilities over a wide area. The number of patrol helicopters (SH-60K (upgraded version)) acquired will be partially revised due to a review of the shipboard requirements, including the installation of fighter aircraft (F-35B) on destroyers (Izumo class). Proceed with the discontinuation of the use of multi-purpose aircraft (U-36A).

For ASDF, in order to optimize the aircraft types, it will move forward with the elimination of the use of rescue search aircraft (U-125A) and other aircraft.

Further efforts for effective and efficient acquisition of equipment include: cost reduction through planned and stable acquisition of equipment by expanding the application of long-term contracts, improving the predictability of companies and promoting efficient production, procurement in consideration of the supply-demand situation of equipment including that of other countries, and narrowing down SDF-unique specifications that cause costs to rise. In addition, the SDF's own unique procurement system, which takes into account the supply-demand situation of equipment, including that of other countries, and the narrowing of specifications, etc., will enhance the effectiveness of project management throughout the equipment life cycle.

2 Personnel

In addition to transferring the capacity necessary to strengthen the joint operation system from each of the SDF, GSDF personnel will be transferred to MSDF and ASDF to optimize the organizational capacity

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

of the SDF, based on the increase of required personnel by MSDF and ASDF. To this end, approximately 2,000 GSDF personnel will be transferred to joint unit, MSDF and ASDF.

In addition, the number of all SDF officers will not be increased, but rather a review of existing units and the use of outside labor force, such as private-sector contractors, will be promoted.

XII Quantities of Major Procurement

Targets to be achieved in five years and approximately in ten years for the defense capabilities to be fundamentally reinforced under this program are shown in Appendix 1.

The specific scale of the major procurement of defense equipment listed in II and III above is shown in Appendix 2.

In addition, the major formation quota and the specific scale of the major procurement of defense equipment, etc. in approximately 10 years are shown in Appendix 3.

XIII Expenditures

- 1 The expenditure aiming for the implementation of defense capability buildup described in this program for the next five years from FY2023 to FY2027 amount to approximately ¥43 trillion.
- 2 The annual defense budgets for FY2023 to FY2027 under this program amount to approximately ¥40,500 billion in total (approximately ¥8,900 billion in FY 2027), on the assumption that the following additional measures will be taken.
 - (1) Based on the progress of each project, further accelerate the improvement of SDF facilities in an agile and flexible manner (approximately ¥1,600 billion);
 - (2) Utilize the settlement surplus in the general account further when the surplus is larger than the expected settlement surplus in 6 (approximately ¥900 billion).

In light of the increasingly severe fiscal conditions and the significance of other budgets related to the lives of the people, in harmony with other measures taken by the Government, further optimization and rationalization of defense buildup will be

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

thoroughly implemented, by means of suspending the use of equipment whose importance has decreased, reviewing projects of low cost-effectiveness, optimizing equipment procurement through cost management/reduction and long-term contracts, and securing other revenues. If the surplus does not increase to the above-mentioned level, MOD/SDF will secure financial resources virtually through these initiatives.

In the budget formulation process of each fiscal year, MOD/SDF will take care to respond to unforeseen circumstances such as changes in the security environment. On top of that, MOD/SDF will examine the progress, effectiveness, and feasibility of each project, including the equipment procurement shown in Appendix 2, and revise projects flexibly, if necessary.

- 3 The expenses based on contracts (material expenses) to be newly concluded to implement this program amount to approximately ¥43,500 billion (excluding the amount corresponding to payments for the period outside of the program that contribute to improving project efficiency, such as maintenance), and the future obligation for each fiscal year is to be managed appropriately.
- 4 Since measures such as for equipment procurement and maintenance, facility maintenance, R&D, and system maintenance will be intensively implemented during the next five years from FY2023 to FY2027 under this program, MOD/SDF will make efforts to appropriately take these into account and proceed defense buildup in a stable and sustainable manner in the subsequent program based on the FY2027 standard.
- 5 This program will be reviewed, if necessary, based on the medium to long-term defense and fiscal outlook, considering various factors at home and abroad such as the international environment at the time, trends in technological standards including Information and Communication Technology (ICT), and the situation of the economic power and fiscal bases supporting the reinforcement of defense capabilities.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

6 To secure financial resources for the stable sustainment of defense capabilities after FY2027 as well as for covering this program from FY2023 to FY2027, necessary measures will be implemented in both expenditure and revenue areas, such as reform of expenditures, utilization of settlement surplus, creation of defense capability reinforcement funds utilizing non-tax receipts, and tax measures.

XIV Notes

In order to reduce the burden on Okinawa Prefecture and other local communities, specific measures regarding the review of the U.S. military force posture in Japan and SACO (Special Action Committee on Okinawa) related projects will be steadily implemented.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

Appendix Table 1 Targets for Fundamentally Enhanced Defense Capabilities and Timeline for Achievement

Fields	By 5 years until FY 2027*	Approx. 10 Years Later
	If an invasion of Japan occurs, Japan will respond with primary responsibility and buildup defense capabilities to disrupt and defeat the invasion while gaining support from its ally and others.	Further efforts to ensure the defense concept described on the left (buildup defense capabilities to disrupt or to defeat invasion at an earlier and more distant location)
Stand-Off Defense Capabilities	● Acquire practical capability to operate stand-off missiles	● Acquire capabilities to operate more advanced stand-off missiles ● Secure required sufficient quantities
Integrated Air and Missile Defense Capabilities	● Reinforce capability to respond to Hypersonic Weapons ● Reinforce capability to respond to miniature Unmanned Aerial Vehicles (UAV)	● Reinforce wide-area air defense capabilities ● More efficient and effective UAV countermeasures
Unmanned Defense Capabilities	● Expand the use of UAV to strengthen capabilities to practically operate	● Reinforce capability to control multiple unmanned assets simultaneously, etc.
Cross-Domain Operation Capabilities/Civil Protection	● Reinforce Space Domain Awareness (SDA), cybersecurity capabilities, and electromagnetic domain capabilities, etc. ● Reinforce ground, sea, and air domain capabilities that become basis of cross-domain operations	● Further reinforce space operation capability ● Further reinforce cybersecurity capability to enable support for entities other than SDF ● Strengthen ground, maritime, and air capabilities to work with UAV
Command and Control/Intelligence-related Functions	● Accelerate decision-making through the use of Artificial Intelligence (AI), etc., while strengthening the resiliency of the network ● Strengthen information acquisition and analysis in both strategic and tactic information, including responses in the cognitive dimension	● Reinforce information gathering and analysis capabilities through the use of AI, etc., while enhancing the system for persistent information gathering and sharing

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

Mobile Deployment Capabilities	● Reinforce the SDF's transportation and supply capabilities (deployment/civil protection), including enhancement of the SDF's transportation assets and use of PFI vessels, etc.	● Further enhancements of transportation capability ● Accelerate transportation and supply by improving supply centers, etc.
Sustainability and Resiliency	● Increase quantity of ammunitions and missiles ● Ensure maximum mobility of equipment except during maintenance ● Improve the resiliency of defense facilities for contingencies ● Secure required ammunition depots, etc.	● Maintain and ensure adequate inventory of ammunitions and guided missiles ● Maintain the mobility ratio ● Further strengthening of defense facilities ● Further securing of ammunition depots and other facilities c, etc. commensurate with ammunition requirements
Defense Production and Technological Bases	● Establish strong defense production bases through measures to strengthen the supply chain, etc. ● Focused investment in equipment areas directly linked to future warfare, and a significant reduction in research and development periods ● Early deployment of defense equipment	● Realize innovative equipment ● Maintain strong defense production bases ● Maintain strong defense production bases
Human Resource Base	● Secure the necessary number of high-quality human resources from a wide range of sources, including the private sector, by strengthening recruitment capabilities and establishing a new SDF personnel system. ● Reinforce education and research (cyber and other domains, joint operations, medical) ● Improvement of living and working environments and treatment by taking necessary measures against aging barracks and housing and eliminating equipment shortages	● Even amid a declining population eligible for recruitment, continuously and stably secure the necessary human resources, including those with specialized knowledge and skills. ● Further strengthen education and research ● Foster an organizational environment in which all members can demonstrate their individual abilities while maintaining high morale

※ Accelerate investment in improving mobility, securing ammunition, and fortifying key defense facilities to maximize the use of existing equipment, while focusing on fundamentally strengthening core areas of future defense capabilities, such as stand-off defense and unmanned asset defense capabilities.

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

Appendix Table 2

Classification	Equipment Type	Procurement Quantity
(1) Stand-off Defense capabilities	Upgraded Type-12 surface-to-ship missile (Surface-, Ship-, Air-ship) Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP) Hypersonic Guided Missile Ship-to-surface cruise guided missile (Tomahawk)	Surface-type 12 Units - - -
(2) Integrated Air and Missile Defense capabilities	Type 03 Medium-Range Surface-to-Air Missile (modified) Aegis System-Equipped Vessels Airborne Early Warning Aircraft(E-2D) Interceptor Missiles for Ballistic Missile Defense (SM-3 Block IIA) Interceptor Missiles with Upgraded Capabilities (PAC-3MSE) Long-Range Ship-to-Air Missiles SM-6	14 Units 2 ships 5 aircraft - - -
(3) Unmanned Defense Capabilities	Various UAVs USV UGV UUV	- - - -
(4) Cross-Domain Capabilities	Destroyer Submarine Patrol Vessel Fixed-wing Patrol Aircraft (P-1) Fighter (F-35A) Fighter (F-35B) Fighter Upgrade (F-15) Stand-off Electronic Warfare Aircraft Network Electronic Warfare System (NEWS)	12 ships 5 ships 10 aircraft 19 aircraft 40 aircraft 25 aircraft 54 aircraft 1 aircraft 2 types
(5) Command and Control/ Intelligence-related Functions	Signals Intelligence Aircraft (RC-2)	3 aircraft
(6) Mobile Deployment Capabilities and Civil Protection	Transport Vessels Transport Aircraft (C-2) Aerial Refueling and Transport Aircraft (KC-46A, etc.)	8 ships 6 aircraft 13 aircraft

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

Appendix Table 3 (approximately 10 years later)

Classification	Future Posture		
Joint Units	Cyber Defense Units		1 squadron
	Maritime Transport Units		1 group
Ground Self-Defense Force	Active-Duty Personnel		149,000 people
	Major Units	Basic Operational Units	9 divisions 5 brigades 1 armored division
		Airborne Units Amphibious Units Air Transport Units	1 airborne brigade 1 amphibious rapid deployment brigade 1 helicopter brigade
		Stand-off Missile Units Joint Units	7 surface-to-ship guided missile regiments
			2 battalions (hyper velocity gliding projectile Intended for the defense of remote islands)
			2 long-range guided missile units
		Surface-to-Air Guided Missile Units	8 anti-aircraft artillery groups
		Electronic Warfare Units (incl. anti-aircraft electronic warfare units)	1 electronic warfare operations unit (incl. 1 anti-aircraft electronic warfare unit)
		Unmanned Vehicle Units	1 multi-purpose unmanned aerial vehicle unit
		Information Warfare Units	1 unit
Maritime Self-Defense Force	Major Units	Surface Vessels Units (Destroyers and Minesweeper vessels)	6 groups (21 divisions)
		Submarine Units	6 divisions
		Patrol aircraft Units (Fixed-wing Patrol aircraft Units)	9 divisions (4 divisions)
		Unmanned Vehicle Units	2 divisions
		Information Warfare Units	1 unit

[Provisional Translation as of January 17, 2023]

Classification	Future Posture		
	Major Equipment	Destroyers (Aegis-Equipped Destroyers)	54 (10)
		Aegis System Equipped Vessels	2
Air Self-Defense Force	Major Units	Patrol Vessels	12
		Submarines	22
		Combat Aircraft	Approx. 170
		Air Warning & Control Units	4 Aircraft Control & Warning Wings
		Fighter Aircraft Units	1 AEW wing (3 squadrons)
		Aerial Refueling/Transport Units	13 squadrons
		Air Transport Units	2 squadrons
		Surface-to-Air Guided Missile Units	3 squadrons
	Major Equipment	Space Domain Mission Units	4 groups (24 fire squadrons)
		Unmanned Aerial Vehicle Units	1 squadron
	Major Equipment	Operational Intelligence Units	1 squadron
		Combat Aircraft	Approx. 430
		Fighters	Approx. 320

Note 1: 14 out of the 15 divisions/brigades are operated on the basis of rapid deployment.

Note2 : Regarding the number of fighter aircraft units and fighters, necessary studies will be conducted by FY 2027 and necessary measures will be taken in order to further advance the quantitative enhancement of air capability. In this regard, the possibility of utilizing unmanned aerial vehicles will be studied.

